

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
DI KABUPATEN CIREBON
JAWA BARAT**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**Agus Suprastia
D4E000093**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2002**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
DI KABUPATEN CIREBON, PROPINSI JAWA BARAT**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Agus Suprastia
D4E 000093

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 16 September 2002

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I,



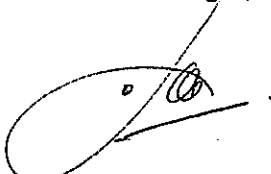
Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD

Anggota Tim Penguji lain :



1. **Prof. Drs. Hartoyo**

Pembimbing II,



Dra. Susi Sulandari, M.Si



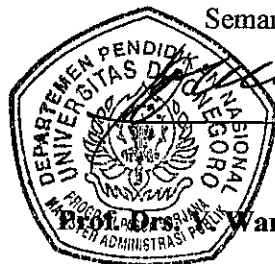
2. **Dra. Sri Suwitri, M.Si**

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelas Magister Sain

16 SEP 2002

Tanggal : _____

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik
Universitas Diponegoro
Semarang



Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD

Sebab aku telah belajar,
dalam keadaan apapun, untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku.

(Filipi 4 : 11,13 KJV).

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 September 2002



Agus Suprastia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS), PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KABUPATEN CIREBON, PROPINSI JAWA BARAT”**. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan akhir dalam menyelesaikan perkuliahan Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Konsentrasi Magister Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari, bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini, yang disebabkan oleh keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dalam menganalisis maupun dari segi waktu yang tersedia. Penulis dengan lapang dada menerima saran, masukan dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan tesis ini.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan juga tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Rektor Universitas Diponegoro dan Pengelola Program Magister Ilmu Administrasi beserta staf, yang telah memberikan**

pelayanan yang baik dan penyediaan fasilitas yang menunjang penyelesaian studi selama mengikuti pendidikan.

2. **Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D. dan Ibu Dra. Susi Sulandari, M.Si**, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya dalam hal bimbingan materi dan juga memotivasi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
3. **Bapak Drs. Ali Mufiz, MPA** selaku wali siswa selama menyelesaikan perkuliahan.
4. **Bapak Deputy Kepala Bappenas Bidang Regional dan Sumber Daya Alam (Prof.Dr.Ir.Herman Haeruman, JS), Bapak Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan Bappenas (Ir.Tatag Wiranto, MURP), dan Bapak Pemimpin Proyek PPK, PMD (Ir.Tono Kartono)**, yang secara kedinasan telah banyak memberikan masukan dan membuka cakrawala Penulis terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan perdesaan dalam hubungannya dengan *Local Economic Development*.
5. **Bapak Drs. Kalinga, MM** selaku Sekretaris II dan Pemimpin Proyek PAP-PPK Kabupaten Cirebon, **Ibu Ir. Nunung Siti Nurjanah**, selaku Kasubdin Ekonomi Bappeda Kabupaten Cirebon, serta **Bapak Ir. Sutapa**, selaku fasilitator program PPK Kabupaten Cirebon yang telah banyak membantu Penulis dalam pengumpulan data, dan beberapa informasi penting dalam penulisan tesis ini.

6. **Bapak Prof. Drs. Hartoyo dan Ibu Dra. Sri Suwitri, M.Si** selaku Dosen Penguji, yang telah banyak memberikan saran, kritik dan masukan khususnya pada saat Penulis mempertahankan tesis ini di depan dewan penguji.
7. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan mendorong Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga pemikiran dan sumbang saran Penulis yang dituangkan dalam tesis ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya kepada instansi yang terkait dengan fungsi-fungsi perencanaan dan pengembangan suatu model kebijakan.

Jakarta, September 2002

Penulis

Agus Suprastia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.	
A. Implementasi Kebijakan.....	17
B. Isi Kebijakan.....	25
C. Kemampuan Pelaksana.....	26
D. Lingkungan.....	29

	E. Hubungan Antar Variabel.....	33
	F. Hipotesis.....	37
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Rancangan Penelitian	39
	B. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian	40
	C. Lokasi Penelitian	40
	D. Variabel Penelitian	42
	E. Jenis dan Sumber Data	49
	F. Instrumen Penelitian.....	50
	G. Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel	51
	H. Teknik Pengumpulan Data	53
	I. Teknik Analisis Data	55
	J. Teknik Pengujian Hipotesis.....	56
BAB IV	: GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.	
	A. Kondisi Geografis dan Demografis	61
	B. Kondisi Prasarana dan Sarana	62
	C. Kondisi Perekonomian	65
	D. Kondisi Sosial dan Budaya.....	68
	E. Kebijakan Pembangunan.....	77
BAB V	: DESKRIPSI PROGRAM PPK.	
	A. Latar Belakang.....	86
	B. Ruang Lingkup	88

	C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.....	90
	D. Sasaran Kelompok dan Lokasi	91
	E. Prinsip Pengelolaan	91
	F. Pendekatan.....	92
	G. Pengorganisasian	92
	H. Pendanaan.....	95
	I. Tenaga Bantuan Teknis	96
	J. Pelaporan	98
	K. Pengawasan.....	99
	L. Evaluasi	100
	M. Studi Dampak	100
BAB VI	: ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM	
	PENGEMBANGAN KECAMATAN.	
	A. Analisis Tabel Tunggal.....	101
	B. Kesimpulan Masing-masing Variabel	160
	C. Analisis Tabel Silang Antar Variabel.....	164
	D. Pengujian Hipotesis	169
	E. Diskusi.....	171
BAB VII	: PENUTUP.	
	A. Kesimpulan.....	173
	B. Saran-saran	177
DAFTAR PUSTAKA	179

DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
TABEL I.1	: Daftar Dana Bantuan Pembangunan untuk Mendukung Program Jaring Pengaman Sosial	5
TABEL I.2	: Jumlah Desa Pelaksana Program PPK	11
TABEL I.3	: Alokasi Dana Program PPK di Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat (Komponen BLN)	12
TABEL III.1	: Jumlah Sampel Penelitian Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.....	52
TABEL IV.1	: Jumlah Desa dan Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Keadaan sampai dengan Desember 2001.....	70
TABEL IV.2	: Urutan Peringkat Kecamatan Miskin Penerima Dana Program PPK Kabupaten Cirebon Tahun 2001	71
TABEL V.1	: Jumlah Kecamatan Penerima Bantuan Dana Program PPK Tahun 1998/1999 s/d 2001.....	88
TABEL V.2	: Alokasi Dana Program PPK berdasarkan Jumlah Penduduk per Kecamatan.....	96
TABEL V.3	: Jumlah Konsultan Program PPK Dari Tahun 1998/1999 s/d 2001.....	98

TABEL VI.1	:	Pendapat tentang kebijakan program PPK dalam bentuk modal produksi	101
TABEL VI.2	:	Pendapat tentang kebijakan program PPK dalam bentuk peralatan produksi	101
TABEL VI.3.	:	Pendapat tentang kebijakan program PPK dalam bentuk uang	102
TABEL VI.4	:	Pendapat tentang kebijakan program PPK dalam bentuk peraturan-peraturan khususnya tentang kejelasan petunjuk pelaksanaan.....	102
TABEL VI. 5	:	Pendapat tentang kebijakan program PPK dalam bentuk peraturan-peraturan khususnya tentang kejelasan petunjuk teknis.....	103
TABEL VI.6	:	Pendapat tentang kebijakan program PPK dalam bentuk peraturan-peraturan khususnya tentang proses penyampaian dana.....	104
TABEL VI.7.	:	Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan tentang kriteria penerima bantuan dana	104
TABEL VI.8	:	Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan tentang sanksi bagi penerima bantuan dana.....	105
TABEL VI.9.	:	Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan tentang petunjuk terhadap pendampingan bagi fasilitator.....	105

TABEL VI. 10	:	Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan tentang petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan bagi pelaksana program	106
TABEL VI.11	:	Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan tentang petunjuk terhadap pengembangan usaha.....	107
TABEL VI.12	:	Kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh kelompok sasaran, khususnya mengenai kesesuaian pemahaman kelompok sasaran dengan isi kebijakan.....	107
TABEL VI.13	:	Kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh kelompok sasaran, khususnya mengenai tingkat pemahaman kelompok sasaran dengan isi kebijakan.....	108
TABEL VI.14	:	Kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh pelaksana program, khususnya mengenai kesesuaian pemahaman pelaksana dengan isi kebijakan	109
TABEL VI.15	:	Kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh pelaksana program, khususnya mengenai tingkat pemahaman pelaksana dengan isi kebijakan	109
TABEL VI.16	:	Penilaian terhadap kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh pelaksana program , khususnya mengenai penguasaan materi program failitator	110
TABEL VI.17	:	Penilaian terhadap kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh pelaksana program , khususnya tentang pemahaman sasaran akhir dari fasilitator	110

TABEL VI.18 :	Kejelasan tata cara penerimaan bantuan dana oleh kelompok sasaran, khususnya mengenai syarat penerimaan bantuan dana	111
TABEL VI.19 :	Kejelasan tata cara penerimaan bantuan dana oleh kelompok sasaran, khususnya mengenai prosedur pengajuan bantuan dana	112
TABEL VI.20 :	Kejelasan tata cara penerimaan bantuan dana oleh kelompok sasaran, khususnya mengenai jangka waktu penyampaian bantuan sejak pengajuan dana	112
TABEL VI.21 :	Kejelasan peraturan penggunaan bantuan dana oleh kelompok sasaran , khususnya mengenai kesesuaian pemahaman kelompok sasaran dengan peraturan penggunaan bantuan dana	113
TABEL VI.22 :	Kejelasan peraturan penggunaan bantuan dana oleh kelompok sasaran , khususnya tingkat pemahaman kelompok sasaran dengan peraturan penggunaan bantuan dana	114
TABEL VI.23 :	Pendapat terhadap output yang diharapkan dari pembuat kebijakan oleh pelaksana program, khususnya tentang pemahaman output program dari fasilitator.	114
TABEL VI.24 :	Pendapat terhadap output yang diharapkan dari pembuat kebijakan oleh pelaksana program, khususnya tentang pemahaman output program dari Camat.....	115

TABEL VI.25 :	Pendapat terhadap output yang diharapkan dari pembuat kebijakan oleh pelaksana program, khususnya tentang pemahaman output program dari Kelurahan /LKMD.....	116
TABEL VI.26 :	Syarat minimal pendidikan formal yang harus dimiliki oleh pelaksana program PPK	116
TABEL VI.27 :	Pendapat mengenai standart minimal pendidikan non formal yang dimiliki oleh pelaksana program PPK, khususnya tentang pelatihan umum	117
TABEL VI.28 :	Pendapat mengenai standart minimal pendidikan non formal yang dimiliki oleh pelaksana program PPK, khususnya tentang pelatihan tentang program PPK	118
TABEL VI.29 :	Pendapat mengenai standart minimal pendidikan non formal yang dimiliki oleh pelaksana program PPK, khususnya mengenai pengalaman sebagai pelaksana.....	118
TABEL VI.30 :	Pemahaman yang dimiliki oleh pelaksana berkaitan dengan isi kebijakan	119
TABEL VI.31 :	Pemahaman yang dimiliki oleh pelaksana program berkaitan dengan sosialisasi program	119
TABEL VI.32 :	Ketrampilan yang dimiliki pelaksana dalam pelaksanaan program	120
TABEL VI.33 :	Kecakapan yang dimiliki pelaksana dalam menjalankan tugas	121

TABEL VI.34 :	Ketelitian yang dimiliki pelaksana dalam menjalankan tugas	121
TABEL VI.35 :	Keseriusan yang dimiliki pelaksana dalam menjalankan tugas	122
TABEL VI.36 :	Wawasan pelaksana terhadap seleksi penerima bantuan dana untuk kelompok sasaran	122
TABEL VI.37 :	Wawasan pelaksana terhadap ketepatan bantuan dana untuk Kelompok sasaran berkaitan dengan kriteria penerima	123
TABEL VI.38 :	Wawasan pelaksana terhadap ketepatan bantuan dana untuk kelompok sasaran dengan skala prioritas penerima	124
TABEL VI.39 :	Wawasan pelaksana terhadap penyimpangan penggunaan dana untuk kelompok sasaran	124
TABEL VI.40 :	Wawasan pelaksana tentang pemecahan masalah dalam pelaksanaan program	125
TABEL VI.41 :	Kedisiplinan pelaksana dalam menjalankan tugas	125
TABEL VI.42 :	Kedisiplinan pelaksana dalam memantau (monitoring) Pelaksanaan program	126
TABEL VI.43 :	Kedisiplinan pelaksana dalam mengevaluasi pelaksanaan program	127
TABEL VI. 44 :	Kedisiplinan pelaksana dalam membuat laporan penilaian program, khususnya tentang akurasi laporan pelaksanaan program	127

TABEL VI.45 :	Kedisiplinan pelaksana dalam pembuatan laporan penilaian program, khususnya tentang intensitas laporan pelaksanaan program	128
TABEL VI.46 :	Kedisiplinan pelaksana dalam pembuatan laporan penilaian program, khususnya tentang faktualitas laporan pelaksanaan program	129
Tabel VI.47 :	Perhatian masyarakat penerima program terhadap pendidikan	129
TABEL VI.48 :	Sifat-sifat yang dimiliki masyarakat penerima Program Pengembangan Kecamatan dalam menerima saran dan kritik	130
TABEL VI. 49 :	Penerimaan masyarakat penerima program terhadap Pembangunan	131
TABEL VI.50 :	Perhatian penerima program terhadap peningkatan Ekonomi	131
TABEL VI.51 :	Sifat penerima program terhadap gotong royong	132
TABEL IV.52 :	Perilaku masyarakat penerima program terhadap keterlibatan dalam kegiatan program	132
TABEL VI.53 :	Perilaku masyarakat penerima program tentang penerimannya terhadap kegiatan program	133
TABEL VI.54 :	Senang tidaknya masyarakat penerima program berperan serta pada kegiatan program	133

TABEL VI.55 :	Sikap masyarakat terhadap isi kebijakan Program Pengembangan Kecamatan	134
TABEL VI.56 :	Kepercayaan terhadap keberhasilan pelaksanaan program	134
TABEL VI.57 :	Penerimaan masyarakat penerima program terhadap keseluruhan isi kebijakan program	135
TABEL VI.58 :	Ada tidaknya kegiatan transaksi ekonomi	135
TABEL VI.59 :	Kondisi ekonomi yang ada di wilayahnya	136
TABEL VI.60 :	Kondisi ekonomi hasil pertanian	136
TABEL VI.61 :	Dukungan masyarakat terhadap keberhasilan program PPK	137
TABEL VI.62 :	Dukungan Kondisi alam terhadap ekonomi masyarakat.....	137
TABEL VI.63 :	Dukungan kondisi alam untuk tempat pariwisata	138
TABEL VI.64 :	Dukungan kondisi alam untuk lahan perikanan yang produktif	138
TABEL VI.65 :	Tersedianya jalan yang memadai	139
TABEL VI.66 :	Tersedianya transformasi yang memadai	139
TABEL VI.67 :	Kesediaan tempat transaksi ekonomi yang memadai	140
TABEL VI.68 :	Ketersediaan hotel atau penginapan yang memadai	140
TABEL VI.69 :	Sikap terhadap isi kebijakan program	141
TABEL VI.70 :	Kepercayaan masing-masing individu terhadap keberhasilan pelaksanaan program	141

TABEL VI.71 :	Penerimaan masing-masing individu terhadap keseluruhan isi program	142
TABEL VI.72 :	Dukungan secara individu terhadap program Diwilayahnya	142
TABEL VI.73 :	Harapan individu terhadap hasil dari pelaksanaan Program dapat meningkatkan ekonomi	143
TABEL VI.74 :	Harapan individu tentang hasil pelaksanaan program dapat membantu kebutuhan keluarga	143
TABEL VI.75 :	Harapan individu dari hasil pelaksanaan program untuk membantu meningkatkan kelompok/ masyarakat	144
TABEL VI.76 :	Penerimaan program dari institusi-institusi terkait.....	145
TABEL VI.77 :	Partisipasi institusi terkait terhadap kegiatan program.....	145
TABEL VI.78 :	Partisipasi institusi terkait dalam memfasilitasi kegiatan program	146
TABEL VI.79 :	Kepedulian institusi terkait dalam mengawasi dan membantu menyelesaikan masalah pada pelaksanaan program	146
TABEL VI.80 :	Dukungan institusi terkait untuk keberhasilan program...	147
TABEL VI. 81 :	Hubungan kerjasama Bappeda bidang ekonomi dengan fasilitator	147
TABEL VI. 82 :	Hubungan kerjasama antara Camat dengan fasilitator.....	148
TABEL VI.83 :	Kerjasama antara antara Kepala Desa, LKMD dengan fasilitator	148

TABEL VI.84 :	Sosialisasi program yang dilakukan Bappeda bidang ekonomi	149
TABEL VI.85 :	Sosialisasi program yang dilakukan oleh Camat.....	149
TABEL VI. 86 :	Sosialisasi Program PPK yang dilakukan oleh Kepala Desa dan LKMD	150
TABEL VI.87 :	Pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi program PPK yang diberikan.....	150
TABEL VI.88 :	Ketepatan alokasi waktu yang direncanakan.....	151
TABEL VI.89 :	Ketepatan rangkaian / urutan kegiatan dengan perencanaan program.....	151
TABEL VI.90 :	Kesesuaian kegiatan dengan daerah program.....	152
TABEL VI.91 :	Kesesuaian dana dengan kegiatan program.....	152
TABEL VI.92 :	Keberhasilan komunikasi yang diterima masyarakat.....	153
TABEL VI.93 :	Tingkat keberhasilan perencanaan program yang dirasakan masyarakat.....	153
TABEL VI.94 :	Tingkat keberhasilan pelaksanaan program yang dirasakan masyarakat	154
TABEL VI.95 :	Tingkat kecukupan dana dengan pelaksanaan program.....	154
TABEL VI.96 :	Keberhasilan penyaluran dana pada pelaksanaan program.....	155
TABEL VI.97 :	Pemerataan penyaluran dana pada pelaksanaan program.....	155

TABEL VI.98 :	Kelancaran penyaluran dana bantuan kepada kegiatan ekonomi masyarakat.....	156
TABEL VI. 99 :	Kelancaran penyaluran dana bantuan untuk kegiatan prasarana.....	156
TABEL VI.100 :	Tingkat manfaat program terhadap masyarakat.....	157
TABEL VI.101 :	Tingkat keberhasilan pelaksanaan program.....	157
TABEL VI.102 :	Kesesuaian hasil pelaksanaan program dengan time schedule.....	158
TABEL VI.103 :	Kesesuaian manfaat program dengan perencanaan program.....	158
TABEL VI.104 :	Kesesuaian tujuan program dengan perencanaan program.....	159
TABEL VI.105 :	Kesesuaian sasaran program dengan perencanaan program	159
TABEL VI. 106 :	Isi Kebijakan.....	160
TABEL VI.107 :	Kemampuan pelaksana.....	161
TABEL VI. 108 :	Lingkungan.....	162
TABEL VI. 109 :	Implementasi Program Pengembangan Kecamatan.....	163
TABEL VI. 110 :	Hubungan antara Isi Kebijakan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan.....	165
TABEL VI.111 :	Korelasi antara isi kebijakan dengan Implementasi Kebijakan Program PPK.....	166

TABEL VI.112 :	Hubungan antara kemampuan pelaksana dengan Implementasi Program PPK di Kabupaten Cirebon.....	166
TABEL VI. 113 :	Korelasi Rank Kendal antara variabel Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi Program PPK.....	167
TABEL VI. 114 :	Hubungan antara lingkungan dengan Implementasi PPK di Kabupaten Cirebon.....	168
TABEL VI. 115 :	Hasil korelasi Rank Kendall antara variabel lingkungan dengan variabel Implementasi PPK.....	169
TABEL VI. 116 :	Korelasi antara variabel isi kebijakan, kemampuan pelaksana, dan lingkungan dihubungkan dengan implementasi program PPK	170
TABEL VI. 117 :	Korelasi antara isi kebijakan, kemampuan pelaksana, dan lingkungan secara bersama-sama terhadap implementasi	171

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		Halaman
GAMBAR 1	: Model Implementasi Kebijakan Menurut Quade.....	20
GAMBAR 2	: Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle...	22
GAMBAR 3	: Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat	24
GAMBAR 4	: Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).....	31
GAMBAR 5	: Bagan Struktur Organisasi	94

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Rekapitulasi Hasil Program Pengembangan Kecamatan Berdasarkan Penggolongan Jenis Kegiatan Tahun I (1998/1999).
- LAMPIRAN 2 : Rekapitulasi Hasil Program Pengembangan Kecamatan Berdasarkan Penggolongan Jenis Kegiatan Tahun II (1999/2000).
- LAMPIRAN 3 : Rekapitulasi Hasil Program Pengembangan Kecamatan Berdasarkan Penggolongan Jenis Kegiatan Tahun III (2001).
- LAMPIRAN 4 : Rekapitulasi Bantuan Program Pengembangan Kecamatan Propinsi Jawa Barat Phase I Tahap I.
- LAMPIRAN 5 : Rekapitulasi Bantuan Program Pengembangan Kecamatan Propinsi Jawa Barat Phase I Tahap II.
- LAMPIRAN 6 : Rekapitulasi Bantuan Program Pengembangan Kecamatan Propinsi Jawa Barat Phase I Tahap III.
- LAMPIRAN 7 : Peta Wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- LAMPIRAN 8 : Peta Wilayah Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.
- LAMPIRAN 9 : Peta Wilayah Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon

- LAMPIRAN 10 : Bagan Perencanaan Lokasi Sasaran.
- LAMPIRAN 11 : Bagan Tahap Persiapan dan Sosialisasi.
- LAMPIRAN 12 : Bagan Perencanaan Usulan Kegiatan.
- LAMPIRAN 13 : Bagan Perencanaan Pemilihan Kegiatan.
- LAMPIRAN 14 : Bagan Penyaluran Pencairan Dana PPK.
- LAMPIRAN 15 : Bagan Pelaksanaan Kegiatan.
- LAMPIRAN 16 : Bagan Jenis Kegiatan dan Pelestarian Dana.
- LAMPIRAN 17 : Bagan Input, Proses, Output Bantuan PPK
- LAMPIRAN 18 : Bagan Struktur Organisasi.
- LAMPIRAN 19 : Bagan Pemantauan.
- LAMPIRAN 20 : Gambar Kegiatan Pengaspalan Jalan.
- LAMPIRAN 21 : Gambar Kegiatan Plurisasi Jalan Lingkungan
- LAMPIRAN 22 : Gambar Kegiatan Pembangunan Irigasi.
- LAMPIRAN 23 : Gambar Kegiatan Pembangunan MCK Umum.
- LAMPIRAN 24 : Gambar Kegiatan Rehabilitasi Madrasah.
- LAMPIRAN 25 : Gambar Kegiatan Rehabilitasi Jembatan.

ABSTRAKSI

Krisis ekonomi mempunyai dampak yang sangat memprihatinkan terhadap peningkatan pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan, daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan merosot serta jumlah penduduk miskin bertambah. Salah satu intervensi Pemerintah dalam menanggulangi dampak tersebut adalah meluncurkan kebijakan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net Policy*). Sesuai dengan RAPBN Tahun 1998/1999, 1999/2000 dan 2001 salah satu Program PJPS adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pedesaan.

Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat yang mendapat lokasi dana PPK di Propinsi Jawa Barat menarik untuk diteliti keberhasilan dan implementasinya karena kondisi masyarakat yang relatif masih terbelakang meskipun relatif dekat dengan DKI, DI. Yogyakarta, serta merupakan daerah perbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah.

Studi ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara isi kebijakan, kemampuan pelaksana dan lingkungan dengan implementasi Program Pengembangan Kecamatan dalam mendukung program JPS di Kabupaten Cirebon Tahun 2001. Berdasarkan telaahan literatur dan pertimbangan empiris, studi ini memusatkan perhatiannya pada variabel kebijakan, variabel kemampuan pelaksana dan variabel lingkungan.

Dengan mengambil sample secara proporsional random sampling terhadap aparat pelaksana, masyarakat dan tenaga pendamping, dan menggunakan teknik kuesioner, observasi, wawancara mendalam, serta analisis data secara kuantitatif dan kualitatif, maka diperoleh hasil bahwa variabel kebijakan, variabel kemampuan pelaksana dan variabel lingkungan, cukup berpengaruh terhadap Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, korelasi secara bersama-sama antara isi kebijakan, kemampuan pelaksana, lingkungan, dengan Implementasi Program PPK di Kabupaten Cirebon, diperoleh hasil 0,141, artinya ada hubungan yang positif tetapi lemah karena hasil korelasi tersebut dibawah 0,5.

ABSTRACT

Agus Suprastia, *Implementation of Safety Net Policy of Sub district Development Program in Cirebon District of West Java.,* Theses. Magister of Public Administration Post Graduate Program Diponegoro University 2002.

The Economic crises has had a serious impact on the unemployment rate both in the urban and rural areas and lowering people's purchasing power. Education and health conditions have drastically decreased while number of people living below poverty line are growing. To overcome the such impacts, the government have established a social safety net program (Jaring Pengaman Sosial/ JPS). According to 1998/1999, 1999/2000 and 2001 state budget (RAPBN), one of JPS Program is sub-district/rural development program (PPK). The objective of the study is to discribe the corelation of policy content, implementoe capability, environment and implementation of sub-district/rural development in supporting JPS program at the year 2001 in Cirebon District. Based on literature review and empirical justifications,these study choose three independent variables. They are content of policy, capability of executing agencies and characteristics of district environment. By using Proportional Random Sampling, the sample is taken toward related implementor apparatus, some community members and staff using questionare technique, observation, in-depth interview, qualitative and quantitative data analysis. The results shows that the three independent variables influence the implementation of sub-district/rural development program in Cirebon District. The figure of the whole corelation of policy content, implementor capability, environment and implementation of PPK program is 0.41. It means that there is a weak positive corelation, because the corelation results is under 0.5.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pelaksanaan pembangunan di negara Indonesia, sampai dengan pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan keberhasilan. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang disertai oleh semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 1996, jumlah penduduk Indonesia (perkotaan dan perdesaan) yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 34,16 juta jiwa atau 17,55 % naik menjadi 47,97 juta jiwa atau 23,43 % pada tahun 1999. (Laporan BPS Pusat, 2002)

Krisis ekonomi ini disebabkan oleh masalah fundamental dan keadaan khusus (*shock*). Masalah fundamental adalah tantangan internal dan eksternal, dimana yang *pertama* berkenaan dengan kesenjangan yang ditandai dengan adanya pengangguran dan kemiskinan, sedangkan yang *kedua* yaitu berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan daya saing menghadapi era perdagangan bebas. Keadaan khusus adalah bencana alam kekeringan yang datang bersamaan dengan krisis moneter. Krisis ini bukan saja melanda Indonesia tetapi juga negara-negara Asia lainnya. Krisis ekonomi ditandai dengan melemahnya nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (Todaro, 1999).

Pertanyaan krisis yang dapat diajukan kemudian adalah apakah masyarakat yang miskin akibat krisis ekonomi masih memiliki kemampuan untuk bangkit atau tidak, terlebih lagi bagi mereka yang sudah demikian secara struktural pada pemerintahan Soeharto? Tahun-tahun pertama pelaksanaan JPS (1998) sangat diwarnai oleh kelemahan dan kekurangannya bukan hanya dalam pendataan orang miskin dan penganggur, tapi juga lemah dalam mekanisme penentuan target (area dan group), alokasi distribusi, organisasi, pemantauan, dan sistem evaluasi. Tidak salah bila ada yang bilang, program JPS ini cuma proyek dalam kepanikan. Lebih dari itu, JPS ini merupakan proyek yang disentralisasikan di pusat tanpa mengikut sertakan daerah, juga tanpa melibatkan masyarakat atau LSM pada mulanya. Bahkan kebanyakan birokrat baik yang di pusat maupun daerah merasa terbebani kerana minimnya biaya operasional dan koordinasi (Pheni Chalid, Republika, 13 September 2001).

Setelah mengalami kontraksi hebat pada tahun 1998 sebesar – 13,01 % akibat krisis, ekonomi Indonesia seperti halnya ekonomi di negara-negara lain di kawasan ASEAN, mulai mengalami pertumbuhan positif, meskipun sebenarnya masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (*recovery*) ekonomi yang sesungguhnya.

Menurut para pakar ekonomi, perbaikan ekonomi nasional sendiri dalam arti sebenarnya baru akan terwujud sekitar tiga sampai lima tahun lagi. Terlepas dari benar tidaknya ramalan para pakar ekonomi tersebut, yang jelas PDB menurut harga konstans tahun 1993 memperlihatkan bahwa tahun 1999 ekonomi Indonesia

mulai tumbuh sekitar 0,3 %, dilanjutkan dengan tahun 2000 (periode Triwulan I s/d III) dengan pertumbuhan sekitar 4,5 %, yaitu dibandingkan periode Triwulan I sd III tahun 1999. Tumbuhnya ekonomi Indonesia pada tahun 2000 tersebut lebih disebabkan oleh pertumbuhan positif pada sektor bangunan yaitu sebesar 10,78 %, dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,16 % (Laporan dan Evaluasi Ekonomi Indonesia, BPS, 2000).

Dampak dari kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, adalah meningkatnya angka pengangguran baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Menurut BPS, jumlah penganggur pada usia kerja 15 tahun keatas (kota+desa) pada tahun 1998 telah mencapai 14,74 juta orang, naik menjadi 18,98 juta orang pada tahun 1999. Namun jumlah tersebut menurun pada tahun 2000 menjadi 5,81 juta orang yang kemudian naik lagi menjadi 8,00 juta orang pada tahun 2001.

Dipihak lain, krisis juga mengakibatkan kesulitan keuangan pemerintah maupun swasta, bahkan tidak sedikit sektor swasta harus menutup usahanya. Yang lebih memprihatinkan, krisis menyebabkan terjadinya ledakan pengangguran di perdesaan maupun perkotaan, sehingga yang menjadi tantangan adalah bagaimana merumuskan langkah nyata untuk segera terlepas dari kondisi dan kembali kepada arah pembangunan normal.

Kemiskinan memang tidak bisa diatasi oleh orang-orang miskin saja. Banyak yang bilang kemiskinan di Indonesia adalah kemiskinan struktural, artinya kemiskinan yang terjadi merupakan proses *kausalitas* sebuah sebab akibat kebijakan formal maupun nonformal. Kebijakan formal menyangkut kebijakan

negara, sedangkan kebijakan nonformal mengarah pada tingkah laku masyarakat (Republika, 19 Mei 2001).

Dikatakan pula oleh Pheni Chalid dalam Republika, 13 September 2001, bahwa : Program-program JPS menghasilkan solusi konkret untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yaitu mengurangi pertumbuhan orang miskin. Munculnya wirausahawan baru yang berasal dari sarjana yang ter phk setelah kasus bank beku operasi. Tentang berkelanjutan program JPS, Presiden dalam pidatonya di depan anggota DPR-RI tanggal 20 Januari 2000 meminta agar program JPS disempurnakan. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius terhadap nasib orang miskin.

Mengingat demikian luas dan kompleksnya konsep kemiskinan dan lingkungan maka menjadi penting untuk memahami relasi atau hubungan diantaranya. Selain itu, diperlukan kemampuan mengidentifikasi kebijakan dan pilihan kelembagaan yang tepat dalam penerapannya. Dalam hubungan dengan kemiskinan, perhatian mendasar kita akan kapasitas pemanfaatan lingkungan jangka panjang (keberlanjutan) bagi penyediaan kebutuhan dasar dan berbagai kesempatan bagi peningkatan kualitas kehidupan dan peradaban umat manusia.

Pengalaman menunjukkan dengan pembenaran kebijakan pembangunan sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan, tidak serta merta terjadi. Untuk itu perlu perumusan dan implementasi cara-cara baru, dengan melibatkan segenap kelompok utama pembangunan, (Bali Post, 24 Mei 2002, hal.12).

Dalam upaya menanggulangi dampak krisis ekonomi tersebut pemerintah melaksanakan jaring pengaman sosial (*Social safety net program*). Prioritas dalam program jaring pengaman sosial adalah : (1) peningkatan ketahanan pangan (*food security*), (2) penciptaan lapangan kerja produktif (*employment creation*), (3) pengembangan usaha kecil dan menengah (*small and medium enterprises*), dan (4)

perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan (*social protection*) (Bappenas, 2001).

Kebijakan jaring pengaman sosial diimplementasikan dalam 17 sektor pembangunan dengan akumulasi dana sebesar Rp. 17.25 triliun, yang ditempuh melalui tiga jalur pelaksanaan yaitu melalui : (1) kebijaksanaan pembangunan sektor melalui mekanisme DIP sektor, (2) kebijaksanaan pembangunan regional melalui SPABP (Inpres), dan (3) kebijaksanaan khusus program perluasan jaring pengaman sosial (PJPS) yang dituangkan dalam mekanisme SPABP (Inpres), (Bappenas, 2000).

Tabel 1 berikut menggambarkan alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program Jaring Pengaman Sosial dengan melalui 3 (tiga) jalur pelaksanaan.

Tabel 1

Daftar Dana Bantuan Pembangunan untuk Mendukung
Program Jaring Pengaman Sosial.
(Dana Bantuan Pembangunan Daerah Termasuk Rupiah Murni dan BLN)

No.	Komponen	Tujuan	Jumlah
1	Bantuan Pembangunan Desa.	Mengembangkan kegiatan sosial ekonomi rakyat melalui peningkatan produksi dan pemasaran barang dan jasa masyarakat pedesaan; pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendukung desa tertinggal, peningkatan kemampuan sumber daya manusia; penguatan kelembagaan masyarakat; pengembangan lembaga dana dan perkreditan milik masyarakat desa untuk mendorong pemupukan modal.	Rp.476,9 miliar
2	Bantuan Pembangunan Desa Tertinggal.	Meningkatkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui bantuan langsung kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan sosial ekonomi produktif, bantuan pendampingan bagi kelompok masyarakat, dan bantuan pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal.	Rp.204,6 miliar

3	Bantuan Pembangunan Dati II.	Mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dengan sasaran penduduk miskin serta daerah dan keluarga yang rawan kemiskinan, melalui program padat karya, pemugaran dan pembangunan pasar kecamatan bagi pedesaan yang membutuhkan pasar, rehabilitasi SD dan MI, rehabilitasi Puskesmas, serta pengembangan produksi pertanian melalui program penyuluhan pertanian lapangan (PPL), pembangunan pertanian terpadu, pembinaan masyarakat tertinggal di pedesaan, dan penghijauan.	Rp.3,765 triliun
4	Bantuan Pembangunan Dati I.	Menunjang upaya penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pemulihan dan pemantapan perekonomian melalui berbagai sektor kegiatan dalam APBD tingkat I, rehabilitasi lahan kritis melalui kegiatan reboisasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang mampu mengairi 1,6 juta ha lahan pertanian pangan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan, program pengembangan wilayah, serta pengelolaan kawasan lindung.	Rp.1,741 triliun
5	Bantuan Pembangunan SD.	Memperluas cakupan pendidikan guna mengurangi jumlah anak putus sekolah.	Rp.594,9 miliar
6	Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.	Membantu upaya memperkuat jaring pengaman sosial di bidang kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi anak dan remaja, penyediaan obat-obatan, peningkatan dan perluasan puskesmas, pendidikan dan pelatihan bidan dan tenaga paramedis, pelayanan kesehatan daerah terpadu, penyehatan lingkungan permukiman, serta penyediaan air bersih.	Rp. 845,9 miliar
7	Bantuan PMT-AS.	Penyediaan makanan tambahan dan obat cacing.	Rp.414,5 miliar
8	Program Perlu-Asan Jaring Pe-Ngaman Sosial/ PJPS.	Bantuan langsung ditujukan kepada masyarakat dan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Bantuan digunakan untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, didasarkan pada kebutuhan pasar, baik	Rp. 2,713 triliun

		pasar, baik domestik maupun luar negeri, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat yang mendukung secara langsung kegiatan ekonomi masyarakat, serta pelatihan keterampilan dan manajemen usaha ekonomi masyarakat dalam rangka pengembangan lebih lanjut kegiatan ekonomi produktif.	
	JUMLAH		Rp.10.755,8 Triliun

Sumber : Bappenas, Agustus 2000.

Secara umum kebijakan jaring pengaman sosial bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat upaya penanggulangan dampak krisis, terutama bagi penduduk rentan krisis yang berada di desa/kelurahan yang paling parah terkena dampak krisis.

Arah kebijaksanaan program JPS adalah : (1) mengamankan penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat, (2) memberikan kesempatan kerja seluas mungkin dalam kegiatan ekonomi produktif melalui pola padat karya untuk membantu mereka yang menganggur agar dapat membeli kebutuhan pokok, (3) menjamin pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar tetap dapat dijangkau oleh masyarakat luas, dan (4) menumbuh kembangkan kembali kegiatan ekonomi rakyat terutama untuk kegiatan ekonomi dengan skala usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan peran kelembagaan koperasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat secara produktif dan benar-benar berjiwa kooperatif (Sumodiningrat, 1998).

Program JPS diharapkan dapat menampung berbagai program yang ditujukan langsung kepada masyarakat melalui satu mekanisme penyaluran dan pengolahan keuangan yang lebih terpadu, transparan, dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), serta berkelanjutan (*sustainable*).

Penajaman arah program JPS adalah untuk memperluas penciptaan kesempatan kerja dengan menerapkan pola padat karya. Penciptaan kesempatan

kerja dilakukan guna menghadapi masalah pengangguran. Kebijakan diarahkan kepada keterpaduan program khusus dan reguler dengan fokus pada pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang kriterianya adalah : (1) bersekala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah, (2) pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat, (3) perlindungan sosial masyarakat, serta (4) peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.

Secara khusus, program perluasan jaring pengaman sosial (PJPS) lebih menitik beratkan partisipasi aktif masyarakat melalui bimbingan dan pendampingan. Program ini merupakan program jangka pendek, tetapi diharapkan mempunyai dampak yang berkelanjutan. Secara umum tujuan dari program Perluasan Jaring Pengaman Sosial adalah : (1) menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat, serta kesempatan usaha, (2) meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat untuk menggerakkan kembali kegiatan perekonomian rakyat, dan (3) memelihara sistem pelayanan masyarakat dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Program Pengembangan Kecamatan/PPK Perdesaan merupakan bagian dari usaha nasional dalam mengentaskan kemiskinan yang lebih dulu dicanangkan. Tujuan umumnya adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan bantuan langsung bagi masyarakat melalui kecamatan dan memberdayakan lembaga-lembaga yang ada dalam struktur desa maupun

kecamatan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Unit Daerah Kerja Pembangunan (Sekretariat Tim Koordinasi Program PPK Pusat, 2002).

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan pengembangan lebih lanjut dari program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Masyarakat dengan difasilitasi oleh aparat merupakan subyek utama sekaligus pemanfaat PPK yang memutuskan sendiri kegiatan pembangunan secara musyawarah sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian PPK juga merupakan wahana pengembangan kapasitas bagi masyarakat dan aparat melalui kegiatan pengambil keputusan yang demokratis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun keberlanjutan manfaat kegiatan.

Program PPK merupakan model pembangunan kelembagaan masyarakat yang berkelanjutan yang menerapkan prinsip pembangunan partisipatif. Model pembangunan partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal khususnya di pedesaan dalam wadah musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan. Melalui PPK, bantuan langsung berupa hibah bergulir diberikan kepada desa dan dikoordinasi oleh kecamatan.

Tujuan umum dari program PPK ini adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung pertumbuhan kegiatan ekonomi di desa. Sedangkan tujuan khusus adalah : (1)

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan, (2) meningkatkan kegiatan usaha dan memperluas lapangan kerja, (3) menyediakan prasarana dan sarana kegiatan ekonomi, (4) meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dan aparat dalam kegiatan pembangunan. (Sekretariat Tim PPK Pusat, 2001).

Program PPK ini berpedoman pada program pembangunan yang pokok-pokoknya mencakup : (1) perumusan program kegiatan apa yang diperlukan masyarakat dan menjadi prioritas masyarakat, (2) siapa penerima atau penanggung jawab kegiatan, (3) lokasi kegiatan, (4) berapa besar dana untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari swadaya masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat atau bantuan luar negeri, serta (5) bagaimana mekanisme penyaluran bantuan yang langsung menjangkau masyarakat, bagaimana bantuan dimanfaatkan, bagaimana pelaporan pelaksanaan kegiatan dan bagaimana pelestarian hasilnya dilakukan.

Perkembangan jumlah desa pelaksana serta jumlah dana yang disalurkan (dana bantuan Bank Dunia) pada program PPK di Propinsi Jawa Barat sampai dengan Pebruari 2002 berdasarkan laporan Tim Survey Program PPK Bappeda Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 :

**Junlah Desa Pelaksana Program PPK
Propinsi Jawa Barat Tahun 1998/1999 s/d 2001
(keadaan s/d Pebruari 2002)**

No.	Tahun	Jumlah Desa	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kabupaten	Jumlah Dana
1	1998/1999	491	65	13	42.500.000
2	1999/2000	871	89	17	81.000.000
3	2001	1.680	119	14	107.750.000

Sumber : Bappeda Jabar, 2002.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Cirebon Tahap I pada tahun I (1998/1999) dan tahun II (1999/2000) dilaksanakan di 5 Kecamatan dengan jumlah desa pada tahun I sebanyak 47 desa dan tahun II sebanyak 62 desa, dan pada tahun III (2001) dilaksanakan di 8 Kecamatan, dengan jumlah desa sebanyak 126 desa. Alokasi dana tahun I masing-masing Kecamatan mendapatkan Rp. 750.000.000,- kecuali Kecamatan Mundu Rp. 500.000.000,- Sedangkan alokasi tahun II masing-masing Kecamatan mendapatkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- kecuali Kecamatan Mundu Rp. 750.000.000,- Kemudian pada tahun ke III masing-masing Kecamatan mendapatkan dana sebesar Rp. 1.000.000,- Untuk lebih jelasnya, alokasi dana Program PPK di Kabupaten Cirebon tahap I pada tahun I s/d III, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Alokasi Dana Program PPK di Kabupaten Cirebon
Propinsi Jawa Barat (Komponen BLN)

No.	Kecamatan	Tahun 1998/1999 (Rp)	Tahun 1999/2000 (Rp)	Tahun 2001 (Rp)
1.	Ciwaringin	750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2.	Plumbon	750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.	Astanajapura	750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
4.	Mundu	500.000.000	750.000.000	1.000.000.000
5.	Waled	750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
6.	Palimanan	0	0	1.000.000.000
7.	Klangenan	0	0	1.000.000.000
8.	Kapetakan	0	0	1.000.000.000
	Jumlah	3.500.000.000	4.750.000.000	8.000.000.000

Sumber : Sekretariat Tim Koordinasi PPK Kab.Cirebon, 2002.

Studi implementasi kebijakan yang komprehensif merupakan kebutuhan mutlak bagi institusi pemerintah yang ingin menyukseskan dan mencapai keberhasilan program-programnya. Kebijakan baru ataupun penyempurnaan program sebelumnya yang dihasilkan melalui serangkaian studi implementasi kebijakan yang komprehensif paling tidak akan menghindarkan terjadinya pengulangan kesalahan pada masa lalu. Dengan demikian studi implementasi kebijakan ini sangat penting dalam arti praktis.

Studi implementasi Program PPK menarik untuk dicermati mengingat sangat penting bagi *policy maker* dalam membuat suatu analisis kebijakan yang menekankan pentingnya mekanisme perguliran dana bantuan langsung (*revolving block grant*) dan pengembangan suatu model pembangunan kelembagaan masyarakat yang berkelanjutan serta menerapkan prinsip pembangunan partisipatif.

Masih ada masyarakat di Kabupaten Cirebon yang beranggapan bahwa perencanaan PPK terlalu lama, dana yang berasal dari pemerintah adalah hibah (bantuan cuma-cuma), serta kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan kegiatan masih tergolong rendah. Angsuran pengembalian PPK tahun I mengalami kelambatan yang disebabkan oleh : (1) pemanfaat tidak dapat bayar atau pembayaran tidak kontinyu karena gagal panen, musibah, nakal dan tidak ada pembinaan dari kelompok, (2) pengurus kelompok tidak menagih kepada anggota atau dana setoran yang ada terpakai oleh ketua kelompok. (3) TPK, Ketua I LKMD dan Kepala desa belum tercipta kesepakatan antara komponen terhadap tugas dan tanggung jawab.

Kabupaten Cirebon selain relatif dekat dengan Propinsi Jawa Tengah, juga merupakan daerah titik pertemuan arus komunikasi dan transportasi perbatasan Propinsi Jawa Barat dengan Propinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta. yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan (*growth center*), sehingga sangat menarik diamati model pengembangan kelembagaan masyarakat yang berkelanjutan dan menerapkan prinsip pembangunan partisipatif.

Dari informasi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan didorong oleh adanya Laporan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program PPK Pusat tentang keluhan dan kendala yang dihadapi masyarakat. Secara umum keluhan tersebut terkait dengan kemampuan pelaksana, karakteristik masyarakat, dan karakteristik kecamatan.

Untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut berjalan maka studi ini akan membahas bagaimana “Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam mendukung Kebijakan Jaring Pengaman Sosial” di Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.

Permasalahan yang akan diangkat pada studi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah isi kebijakan mempunyai hubungan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
2. Apakah kemampuan pelaksana mempunyai hubungan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
3. Apakah lingkungan mempunyai hubungan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
4. Apakah isi kebijakan, kemampuan pelaksana dan lingkungan, mempunyai hubungan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui hubungan antara isi kebijakan, dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui hubungan antara kemampuan pelaksana, dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui hubungan antara lingkungan, dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
4. Untuk mengetahui hubungan antara isi kebijakan, kemampuan pelaksana, lingkungan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka mensukseskan kebijakan Jaring Pengaman Sosial melalui Program Pengembangan Kecamatan/PPK.
2. Sebagai bahan pembelajaran terhadap pemerintah dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan, terutama menyangkut pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi masyarakat di daerah, program pemberdayaan masyarakat, program penguatan kemampuan pemerintahan daerah khususnya dalam memperkuat kapasitas institusi perencanaan di daerah, program pengembangan ekonomi lokal serta program-program terkait lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu komponen dari keseluruhan proses kebijakan publik yang terjadi. Proses kebijakan, menurut Ripley dan Franklin (1997), terdiri dari beberapa tahap penting, yaitu : tahap formulasi, tahap implementasi, dan tahap penilaian terhadap *performance*.

Sejalan dengan pendapat Muhadjir Darwin (1993), bahwa proses implementasi bukanlah proses mekanis dimana setiap sektor akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai dengan scenario pembuat kebijakan, tetapi merupakan proses kegiatan yang acapkali rumit, diwarnai perbenturan kepentingan antar aktor yang terlibat baik sebagai administrator, petugas lapangan atau kelompok sasaran. Selama proses implementasi beragam interpretasi atas tujuan, target dan strategi implementasi dapat berkembang. Selain itu berbagai faktor dapat menimbulkan penundaan, penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan arah kebijakan. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa gagalnya suatu kebijakan bukan karena salahnya tujuan atau target yang dirumuskan tetapi karena lemahnya proses implementasi.

Implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan, pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan (*action*) untuk mencapai tujuan diselenggarakannya pada tahap implementasi kebijakan. Sehubungan dengan hal ini Dye mempertegas bahwa program-program dipandang sebagai sebuah proses kebijakan pemerintah yang ditetapkan, dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Sementara itu George C. Edward III menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan (dalam Wahab, 1999 : 124)

Dikatakan pula oleh Warrela, bahwa tujuan dari implementasi adalah menyelesaikan transisi dari renstra ke manajemen strategi dengan memasukkan strategi yang telah diadopsi ke seluruh sistem yang relevant. Mengembangkan program, proyek, rencana tindakan, budget, dan proses implementasi yang efektif akan membawa strategi terpilih menjadi lebih hidup dan menghasilkan nilai real bagi organisasi (masyarakat) dan stakeholdernya.

Ditegaskan pula oleh Jones (1984) tentang implementasi kebijakan, bahwa :
“ Implementation is easy to understand in the abstract. Getting the job done and doing it common shorthand definitions of the term. But doing it is not always so simple. It may not be a well defined object; doing may require more people. Under

these circumstances, implementation is process of getting additional resources so as to figure out what is to be done “.

Pernyataan Jones diatas menyimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan tidaklah sesederhana sebagaimana yang dirumuskan. Kebijakan yang didefinisikan diatas lebih merupakan tindakan yang mengarah pada suatu tujuan, baik menyangkut apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh *policy makers* dan atau pelaksana kebijakan.

Dikatakan oleh Walter Wiilliams (dalam Jones, 1991), bahwa masalah yang paling penting dalam implementasi adalah :

“Hal memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengorganisasian dengan cara tertentu. Dan cara tersebut adalah : bahwa apa yang dilakukan memiliki kemiripan nalar dengan keputusan tersebut, serta berfungsi dengan baik di dalam lingkup lembaganya. Hal terakhir mengandung pesan yang lebih jelas dibandingkan dengan kesulitan dalam menjembatani jurang pemisah antara keputusan kebijakan dengan bidang kegiatan yang dapat dikerjakan”.

Sedangkan menurut Pressman dan Wildausky (dalam Wahab, 1999 : 54), implementasi adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dengan kata lain implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan. Oleh karenanya interaksi antar elemen-elemen yang ada merupakan suatu rangkaian yang dilakukan untuk mengantarkan program/kebijakan kearah efek yang diharapkan.

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn disebut sebagai “*A Model of The Policy Implementation Process*”. Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-

konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Atas dasar pandangan seperti ini, kedua ahli ini kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijaksanaan menurut : (1) jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, (2) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Hal lain yang dikemukakan oleh kedua ahli diatas ialah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan meliputi variabel : (1) ukuran dan tujuan kebijaksanaan, (2) sumber-sumber kebijaksanaan, (3) ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (5) sikap para pelaksana, (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Quade (1984), dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran dan faktor-faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan/tensions, dan kemudian diikuti dengan tindakan tawar menawar (transaksi). Dari transaksi tersebut kemudian diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Selanjutnya Quade (1984; 310) memberikan gambaran bahwa ada 4 variabel yang harus diteliti dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, yaitu :

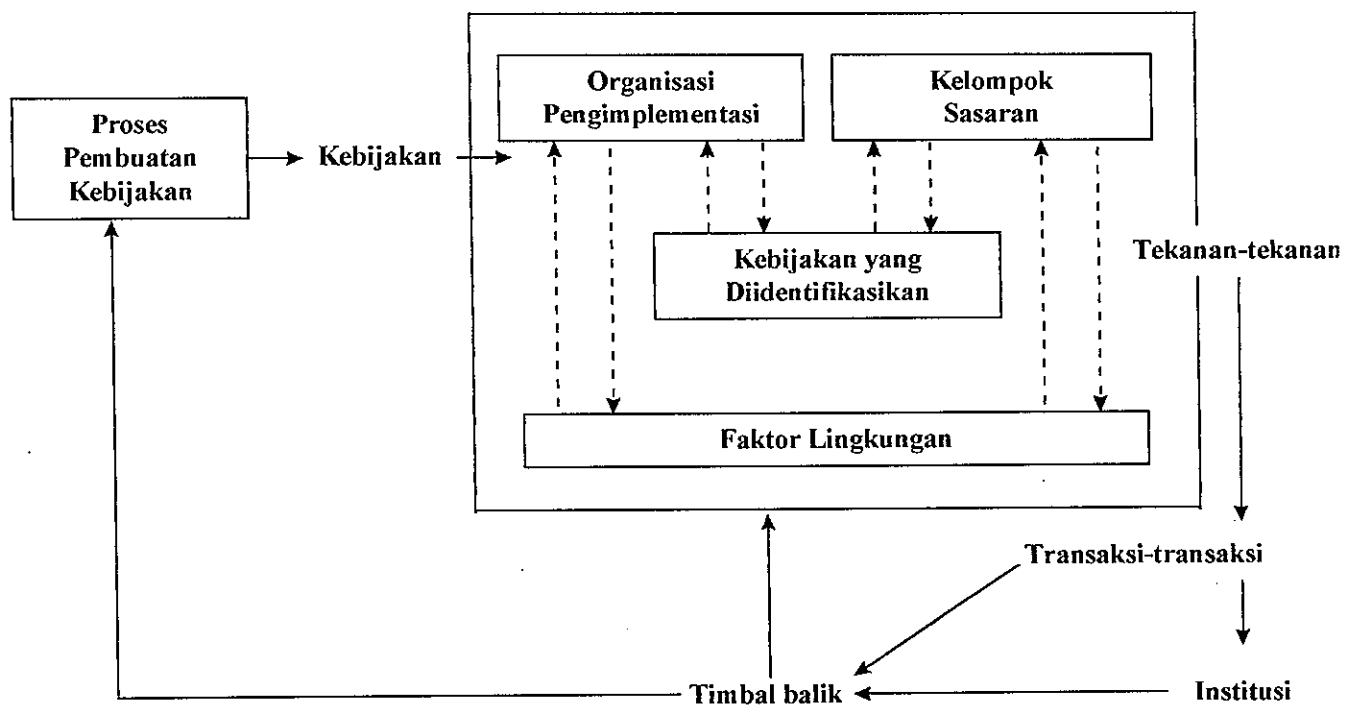
1. *The idealized policy, that is the idealized pattern of interaction that those who have defined the policy attempting to induce.*

2. *The target group, defined as those who are required to adopt new pattern of interaction by the policy and who must change to meet its demands.*
3. *The implementing organization, usually a unit of the government bureaucracy responsible for implementation of the policy and.*
4. *Environmental factors; those element in the environment that influenced by the policy implementation.*

Proses implementasi kebijakan menurut Quade, dapat digambarkan sebagaimana gambarkan 1 sebagai berikut :

Gambar 1

Model Implementasi Kebijakan Menurut Quade



Grindle (1980), mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi aktifitas implementasi suatu kebijakan dalam 2 kelompok variabel yaitu *contents* dan *context* kebijakan yang bersangkutan Hasil dari aktifitas tersebut sebagai *outcomes*, yaitu *impact on society, individual, or group* dan *change and its acceptance*. Selanjutnya, untuk mengevaluasi implementasi dan dampak kebijakan, Grindle secara eksplisit mengatakan "*Its success or failure can be evaluated in terms of the capacity actually to deliver program as designed. In turn, overall policy implementation can be evaluated by measuring program outcomes against policy goals*".

Aktifitas-aktifitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh *contents* dan *context* kebijakan yang bersangkutan. *Pertama*, terdiri dari segala karakter yang ada pada kebijakan itu sendiri. *Kedua*, terdiri dari segala karakter yang ada di lingkungan dimana proses implementasi berlangsung.

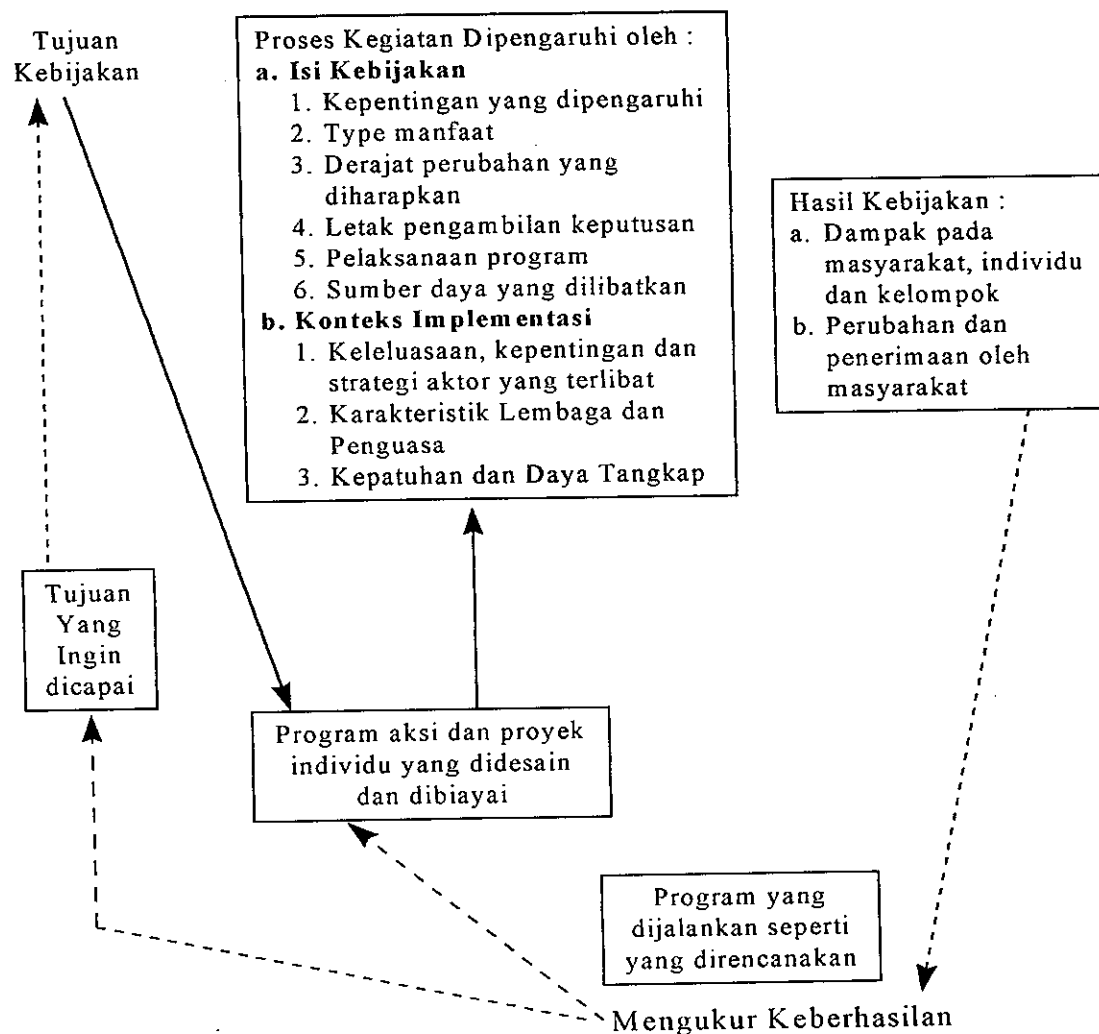
Dalam kelompok variabel *contents*, Grindle mengidentifikasi variabel-variabel : (1) kepentingan yang dipengaruhi, (2) jenis keuntungan, (3) luasnya perubahan yang diinginkan, (4) tempat pembuatan keputusan, (5) pelaksana program, dan (6) sumberdaya yang dimiliki atau digunakan. Sedangkan dalam kelompok variabel *context*, Grindle mengidentifikasi variabel-variabel : (1) kekuatan, (2) kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat, (3) karakteristik regim dan kelembagaan, (4) serta kepatuhan dan tanggung jawab.

Selanjutnya oleh Grindle (dalam Wibawa, 1992 : 26) dikatakan bahwa :

“Menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dengan hasil-hasil kegiatan pemerintah, karena itu implementasi kebijakan membutuhkan adanya sistem pelaksanaan dimana perangkat khusus dirancang dengan harapan untuk mencapai tujuan akhir”.

Model implementasi kebijakan menurut Grindle, yang digambarkan oleh Wibawa, sebagaimana gambar 2 berikut ini :

Gambar 2
Model Implementasi Kebijakan
Menurut Grindle



Lebih lanjut, Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (dalam Wahab, 1997) mengembangkan model "*A Frame Work For Implementation Analysis*" (Kerangka Kerja Bagi Analisis Implementasi). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu : (1) mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan, (2) kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, dan (3) pengaruh lingkungan pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

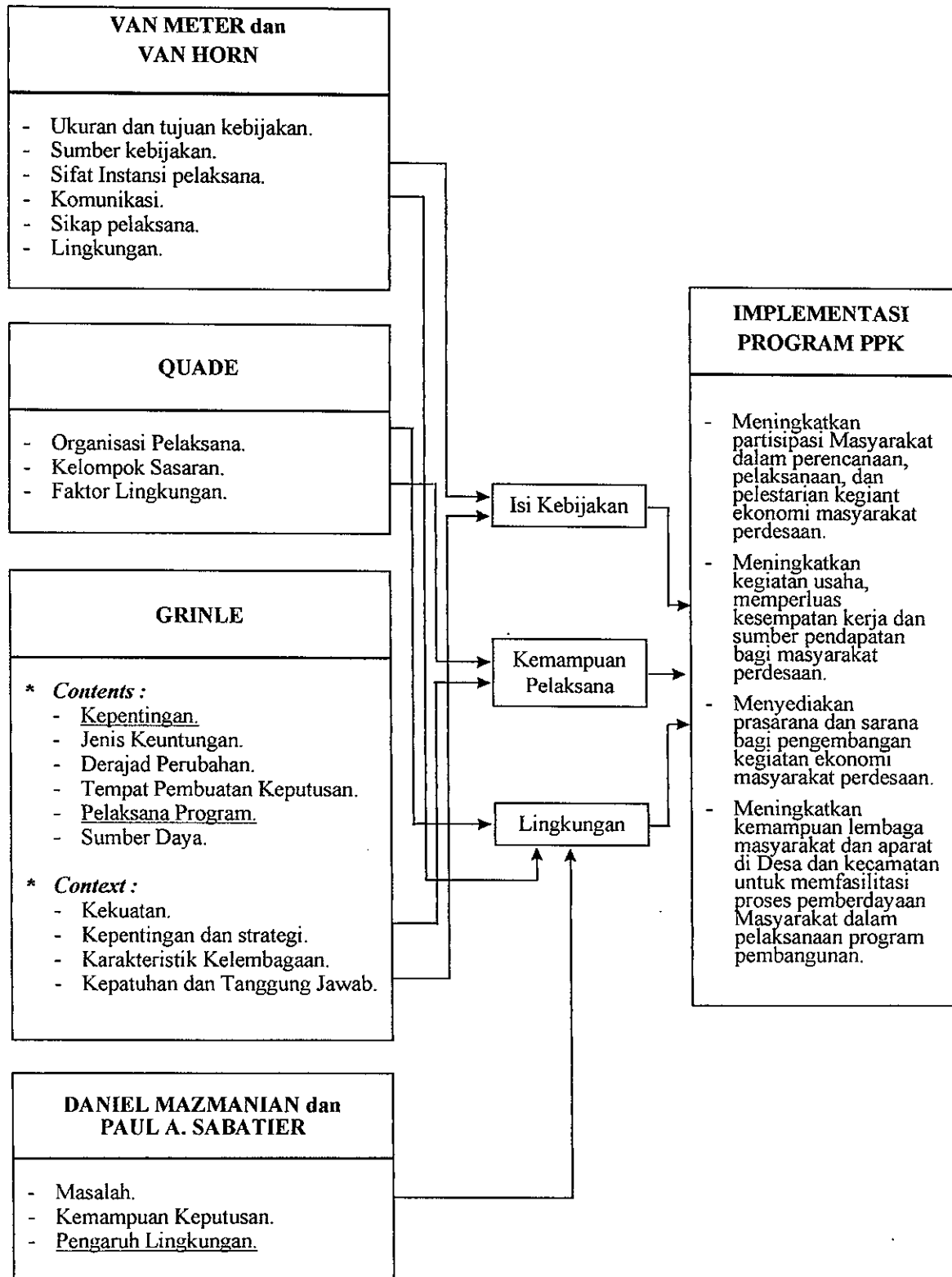
Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup : kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

Dari berbagai teori yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan mengadopsi dari beberapa teori tersebut, yaitu akan mengambil faktor-faktor yang dipandang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai adopsi dari beberapa teori yang telah disampaikan diatas, sebagai berikut :

Gambar 3

**Faktor-faktor yang mempengaruhi
Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan
di Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat.**



B. Isi Kebijakan.

Dikatakan oleh Grindle (1980), bahwa implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang meliputi : (1) kepentingan yang dipengaruhi, (2) type manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksanaan program, (6) sumber daya yang dilibatkan.

Berkaitan dengan isi kebijakan, lebih lanjut dijelaskan bahwa sebuah kebijakan akan sulit diimplementasikan apabila isi kebijakan menyangkut banyak kepentingan didalamnya. Begitu pula sebuah kebijakan atau program yang jelas memberikan manfaat, akan lebih mudah dilaksanakan. Tipe manfaat juga berkaitan dengan derajat perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan. Selain itu program juga akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan jika terlalu menuntut perubahan sikap dan perilaku kelompok sasaran. Kebijakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang lebih sulit diimplementasikan jika dibandingkan dengan kebijakan yang secara nyata memberikan manfaat langsung terhadap kelompok sasaran. Keputusan-keputusan yang dibuat selama formulasi kebijakan juga menunjukkan siapa yang bertanggung jawab di dalam implementasi programnya, dan keputusan-keputusan seperti ini akan mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan.

Variabel mudah/tidaknya masalah dikendalikan mencakup : kesukaran-kesukaran teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.

Sedangkan menurut Goggin (1980), dalam mengukur state decession atau isi dan pesan kebijakan, maka tergantung dari : (1) besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, maka semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan, (2) bentuk-bentuk kebijakan memuat antara lain : (a) kejelasan kebijakan, (b) konsistensi pelaksanaan, (c) frekuensi pelaksanaan, (d) diterimanya pesan secara benar.

C. Kemampuan Pelaksana.

Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kata bagian kemampuan seseorang sendirinya juga kata sifat/keadaan yang ditujukan pada sifat atau keadaan seseorang yang ada. Dalam buku manajemen bahasa Inggris, kata kemampuan adalah terjemahan dari "ability" tidak merupakan istilah baku dalam berbagai ulasan yang menyangkut pada pegawai. Istilah yang baku dan umum digunakan ialah "skill" yang sering diterjemahkan menjadi "kecakapan". Hal ini berbeda dengan penggunaan bahasa Indonesia yang kata-kata "mampu/kemampuan" sudah hampir menjadi baku bahkan didalam hal percakapan sehari-hari, sepanjang mengenai kerja/perbuatan orang. Sebagai contoh nyata dapat dilihat pada berbagai surat keputusan pengangkatan pegawai dalam tugas/jabatan tertentu, terdapat istilah/kata-kata yang menyatakan "mampu/kemampuan" dengan demikian kata "kemampuan" sudah baku penggunaannya dalam manajemen kepegawaian di

Indonesia. Berhubung dengan itu, maka dalam ulasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kata-kata “kemampuan” disini adalah identik dengan “skill”.

Di bidang manajemen menurut Robert Katz, ada 3 jenis kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap manajer agar dapat melaksanakan tugasnya memimpin secara berdaya guna dan berhasil, yaitu :

- ❖ Kemampuan teknik (technical skill) *is the ability to use the tolls, prosedures or techniques of a specialized tools. A surgeon, an engineer, a musician or an accountant all have technical skill in their respective area. The manager need enough technical skill “to accomplish the mechanics of the particular job “he or she is responsible for.*
- ❖ Kemampuan bersifat manusiawi (human skill) *is the ability to work with, understand and motivate other people, either as individual or as groups. Manager need enough of this human relations skill to be able to participate effectivety in and lead groups.*
- ❖ Kemampuan kemampuan konsepsi (conceptual skill) *is the mental ability to coordinate and integrate all the organization’s interests and activities. It involve the manager’s ability to understand how a change in any given part can effect the whole organization. A manager need enough conceptual skill to recognize how the various factors in a given situation are interrellated, so that the actions he or she takes will be in the best interests of the total organization.*

Dikatakan oleh David C.Korten, bahwa suatu program dapat berhasil dilaksanakan dengan baik jika ada kesesuaian antara tiga unsur yang ada. Kesesuaian *pertama*, antara program dengan *beneficiaries*, yaitu antara apa yang ditawarkan (*output*) oleh program, dengan apa yang dibutuhkan (*needs*) oleh kelompok sasarannya (*beneficiaries*). Kesesuaian *kedua*, antara program dan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas-tugas yang dituntut oleh program dengan kemampuan pelaksanaannya. Kesesuaian *ketiga*, yaitu kesesuaian antara kelompok sasaran (*beneficiaries*) dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat-syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Menurut Korten, jika pelaksana program tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dituntut oleh program, maka tentu saja organisasi tersebut tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasarannya, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur tersebut mutlak ada agar program dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga efektifitas program tergantung dari adanya kesesuaian tiga unsur tersebut.

Menurut Goggin (1980), bahwa proses implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mentransfer informasi/message dari institusi yang tinggi ke institusi yang lebih rendah, maka untuk mengukur keberhasilan/kinerja kebijakan publik sangat tergantung pada variabel : (1) *inducement and constraints at*

the federal level, (2) state capacity, (3) state and local level inducement and constraints.

Variabel *inducement and constraints* pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin legitimasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah, maka semakin besar kredibilitasnya. Asumsi yang digunakan adalah semakin legitimasi, maka akan semakin tinggi kredibilitasnya atau sebaliknya.

Sedangkan untuk mengetahui variabel *state capacity* atau *organization capacity*, yaitu sejauh mana kemampuan pelaksana kebijakan tersebut mampu menggunakan wewenang yang ada, bagaimana hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang ada dalam organisasi dan masyarakat.

D. Lingkungan.

Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang penting dalam suksesnya implementasi. Jika kondisi lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan yang positif pula, sehingga mereka akan berpartisipasi dalam suksesnya implementasi kebijakan, tetapi jika lingkungan berpandangan negatif, maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi akan terancam keberhasilannya.

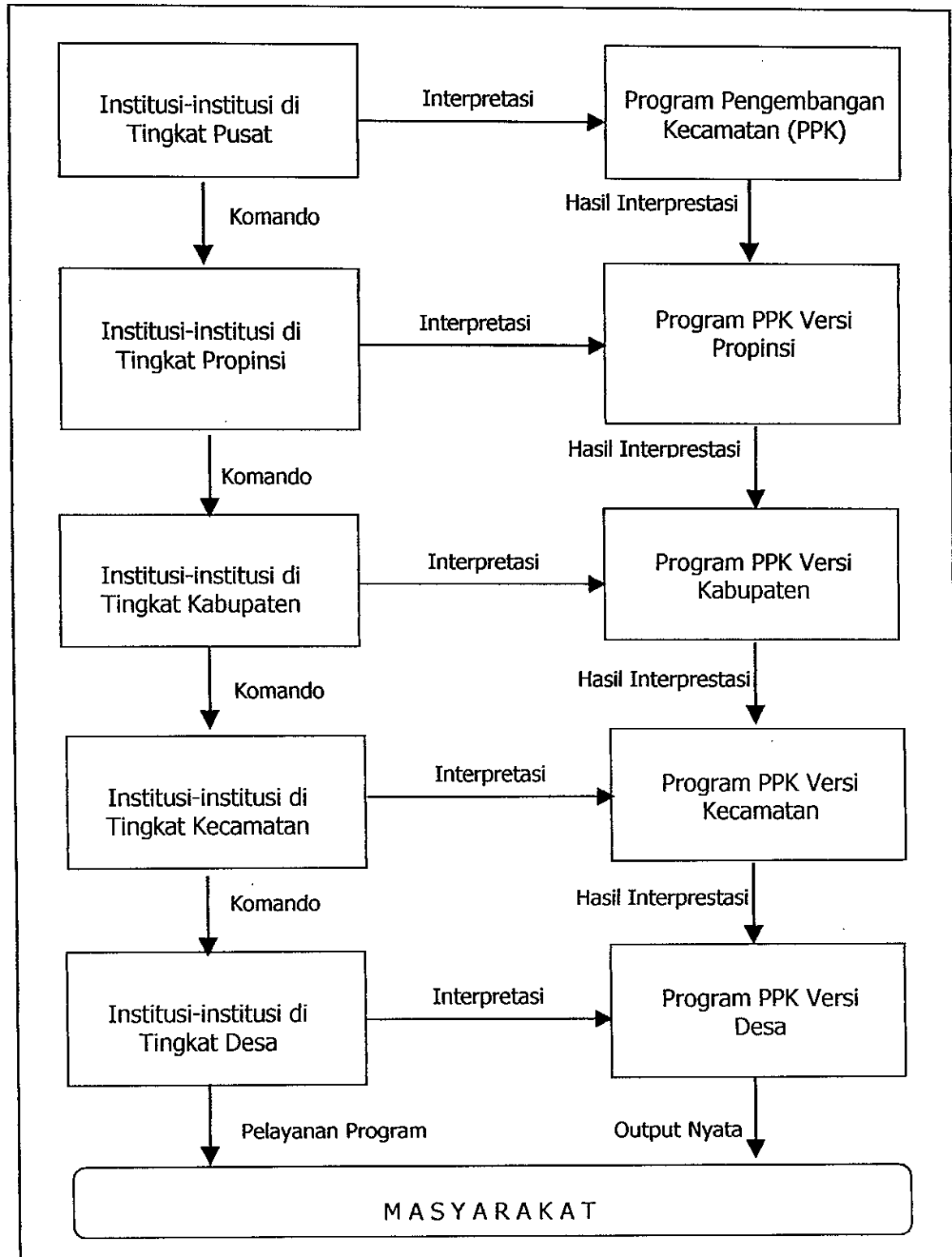
Lebih lanjut dikatakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 1977), yang mengembangkan model “Kerangka Kerja Bagi Analisis Implementasi”. Kedua ahli ini berpendapat bahwa pengaruh lingkungan pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan, merupakan peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada proses implementasi.

Keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (2000), menyebutkan data tiga komponen untuk mengukur keberhasilan implementasi, yaitu (1) tingkat kepatuhan pada bagian birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkat birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas dan tidak ada masalah, (3) keberhasilan implementasi mengacu dan mengarahkan pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki dari semua program yang ada.

Dikatakan pula oleh Van Meter dan Van Horn bahwa, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, sebagai variabel bebas (*independent variabel*) merupakan jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja.

Berdasarkan kajian teoritis tersebut maka, penulis membuat skema sebagai kerangka pemikiran mengenai Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai berikut :

Gambar 4

Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Institusi-institusi di tingkat pusat pada tahap awal akan menginterpretasikan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ke tingkat propinsi dan hasil interpretasi tersebut adalah Program PPK versi propinsi. Proses interpretasi ini akan terus berlanjut sampai ke desa dan masyarakat. Interpretasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi baik di tingkat nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Pada dasarnya sosialisasi ini secara normatif bertujuan untuk menyamakan persepsi, konsep dan filosofi dasar Program PPK.

Kerangka pemikiran tersebut nampaknya sederhana dan jelas, namun pada empiriknya akan jauh lebih rumit dan kurang transparan. Proses interpretasi birokrasi berkali-kali, menyebabkan suatu kebijakan publik dapat saja pada kelompok sasaran (output nyata dan pelayanan program) sudah berbeda atau menyimpang dari tujuan awal kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji secara kasuistis masing-masing pelaksanaan program, terutama mengenai bagaimana proses interpretasi tersebut sehingga dapat diketahui dengan jelas deviasi yang muncul sebagai akibat dari implementasi yang seharusnya dengan realita yang terjadi di lapang.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa asumsi yang mendasari kerangka pemikiran tersebut adalah bahwa kebijakan publik tersebut menggunakan pendekatan *top-down*, sehingga Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bukan suatu program yang berangkat dari keinginan dan kebutuhan murni masyarakat, namun lebih merupakan interpretasi pemerintah terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat terjadi ada sejumlah ketidak sesuaian diantaranya, termasuk dalam proses penyampaiannya atau pelaksanaan program tersebut.

E. Hubungan Antar Variabel.

1. Isi Kebijakan dengan Implementasi Program PPK.

Berkaitan dengan isi kebijakan, lebih lanjut dikatakan bahwa sebuah kebijakan akan sulit diimplementasikan apabila isi kebijakan menyangkut banyak kepentingan didalamnya. Begitu pula sebuah kebijakan atau program yang jelas memberi manfaat, akan lebih mudah dilaksanakannya.

Dikatakan oleh Grindle (dalam Wibawa, 1992) bahwa, implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang menyangkut tentang kepentingan yang dipengaruhi, type manfaat, dan derajat perubahan yang diharapkan. Sedangkan Van Mater dan Van Horn, berpendapat bahwa implementasi kebijakan akan dipengaruhi pula oleh ukuran dan tujuan kebijakan, selain beberapa sejumlah variabel bebas seperti, (1) sumber-sumber kebijakan, (2) sifat badan/instansi pelaksana, (3) komunikasi antar organisasi, (4) sikap para pelaksana, dan (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2. Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi Program PPK.

Menurut Korten, jika pelaksana program tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dituntut oleh program, maka tentu saja implementasi program tidak dapat berjalan sebagaimana output yang diharapkan dengan tepat. Atau jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sarannya, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program.

Sedangkan oleh Quade dikatakan bahwa, implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi enteraksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, sehingga kemampuan pelaksana sangat diperlukan untuk berhasilnya sebuah implementasi kebijakan.

Dikatakan pula oleh Grindle, bahwa aktifitas-aktifitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh *contents* dan *context* kebijakan yang bersangkutan. Dalam kelompok variabel contents, antara lain Grindle mengidentifikasi tentang sumberdaya yang dimiliki oleh pelaksana program, sehingga secara jelas bahwa implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana program. Apabila sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana program rendah, maka implementasi kebijakan akan mengalami hambatan dan kesulitan karena tidak dapat mencapai out program dengan hasil yang baik.

3. Lingkungan dengan Implementasi Kebijakan.

Lingkungan merupakan faktor yang penting dalam mencapai suksesnya implementasi. Jika kondisi lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan yang positif pula, sehingga mereka akan berpartisipasi dalam suksesnya implementasi kebijakan, tetapi jika lingkungan berpandangan negatif, maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi akan terancam keberhasilannya.

Demikian halnya dikatakan pula oleh Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (dalam Wahab, 1997), bahwa pengaruh lingkungan pelbagai variabel

politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan, akan mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn, dikatakan bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik, sebagai jalan untuk menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja, sehingga lingkungan berpengaruh terhadap keseluruhan proses implementasi kebijakan.

4. Isi Kebijakan, kemampuan pelaksana dan lingkungan dengan Implementasi Kebijakan.

Ditegaskan oleh Jones (1984) tentang implementasi kebijakan, bahwa :
“ Implementation is easy to understand in the abstract. Getting the job done and doing it common shorthand definitions of the term. But doing it is not always so simple. It may not be a well defined object; doing may require more people. Under these circumstances, implementation is process of getting additional resources so as to figure out what is to be done “.

Pernyataan Jones diatas menyimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan tidaklah sesederhana sebagaimana yang dirumuskan. Kebijakan yang didefinisikan diatas lebih merupakan tindakan yang mengarah pada suatu tujuan, baik menyangkut apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh *policy makers* dan atau pelaksana kebijakan.

Sebagaimana dikatakan oleh Grindle, bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang menyangkut tentang kepentingan yang dipengaruhi, type manfaat dan derajat perubahan yang diharapkan, sedangkan oleh Quade dikatakan bahwa, implementasi kebijakan akan dapat mencapai sasaran yang diharapkan apabila kemampuan pelaksana dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Hal yang sama untuk mendukung suksesnya implementasi kebijakan, dikatakan pula oleh Van Meter dan Horn bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik, sangat berpengaruh tercapainya implementasi kebijakan, karena faktor ini adalah menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja.

Dari serangkaian pendapat beberapa ahli tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa isi kebijakan, kemampuan pelaksana, dan lingkungan mempunyai hubungan dengan implementasi kebijakan, karena faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap tercapainya implementasi kebijakan sesuai dengan output yang diharapkan.

Jika dilihat secara terpisah variabel isi kebijakan mempunyai hubungan dengan implementasi kebijakan, demikian pula halnya dengan variabel kemampuan pelaksana dan variabel lingkungan, mempunyai hubungan dengan implementasi kebijakan, namun jika dilihat secara bersama-sama, sangat jelas bahwa variabel isi kebijakan, kemampuan pelaksana, lingkungan, dan implementasi kebijakan saling berhubungan

dan tidak dapat dipisahkan sehingga output program PPK di Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, dan dan proses pelestarian kegiatan dapat segera dilakukan untuk pembangunan yang berkelanjutan

F. Hipotesis.

1. Hipotesa Verbal :

a). Hipotesis Minor :

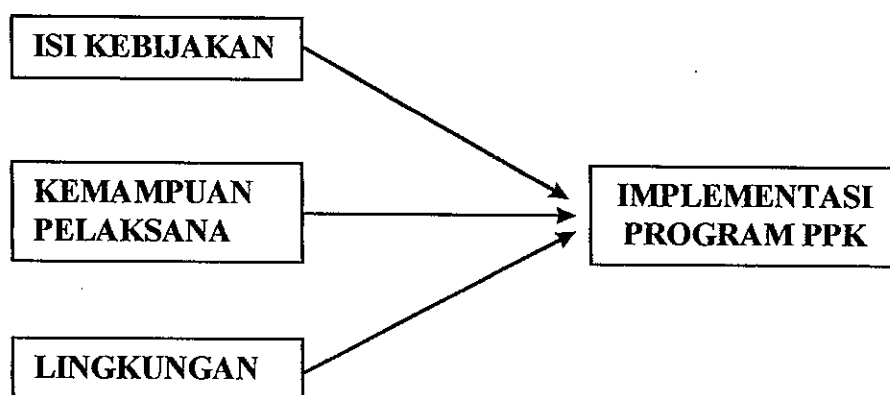
- Ada hubungan positif antara isi kebijakan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan.
- Ada hubungan positif antara kemampuan pelaksana dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan.
- Ada hubungan positif antara lingkungan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan.

b). Hipotesis Mayor :

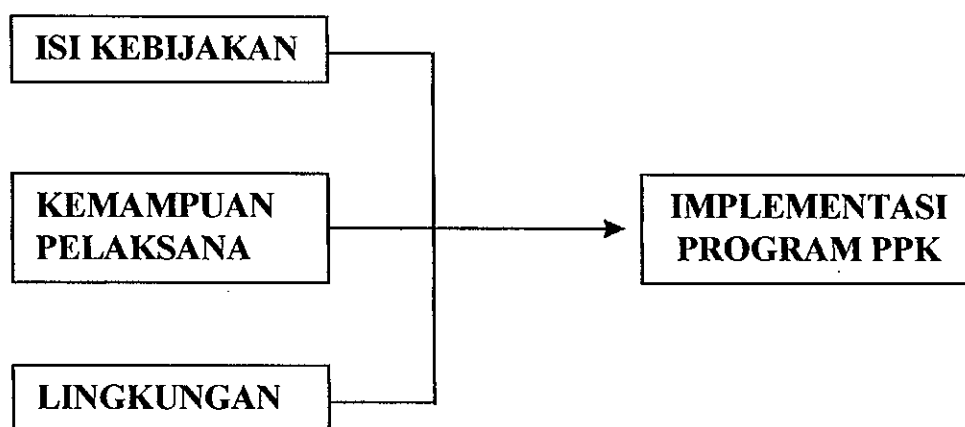
Ada hubungan positif antara isi kebijakan, kemampuan pelaksana, lingkungan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan.

2. Geometrical Model :

a) Hipotesis Minor :



b). Hipotesis Mayor :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian.

Rancangan penelitian atau desain riset pada dasarnya merupakan gambaran atau cara-cara seseorang dalam melakukan penulisan. Desain riset merupakan suatu rencana secara logis untuk menguji hipotesis, sehingga dengan gambaran dan desain riset dapat diketahui arah, jenis, type dan tujuannya.

Mardalis (2002 : 25) menyatakan pada umumnya penelitian dapat digolongkan menjadi 4 (empat) type yaitu : (1) penelitian historis, (2) penelitian penjajakan (*explorative*), (3) penelitian *deskriptif* dan (4) penelitian penjelasan (*explanatory* atau *confirmatory research*). Penelitian *explanatory* bertujuan untuk menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian pengujian hipotesa yang menguji hubungan sebab akibat diantara variabel yang diteliti.

Dalam penyusunan penulisan penelitian ini, peneliti akan menggunakan type penelitian *explanatory*, yaitu yang menjelaskan hubungan antara satu atau beberapa variabel pengaruh (*independent Variabel*). Dalam hal ini yang dimaksud adalah untuk mengetahui pengaruh variabel *independen* (variabel pengaruh) : Isi

kebijakan, kemampuan pelaksana, lingkungan terhadap variabel *dependen* (terpengaruh) implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Metode yang digunakan kuantitatif dengan didukung analisis deskriptif kualitatif, mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki yaitu untuk mengetahui hubungan antara isi kebijakan, kemampuan pelaksana, lingkungan dengan implementasi kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Cirebon, berdasarkan variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

B. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian.

Penelitian ini mengambil fokus pada isi kebijakan, kemampuan pelaksana, lingkungan dan implementasi Program Pengembangan Kecamatan/PPK Perdesaan, di Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat.

C. Lokasi Penelitian.

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup pembahasan dan sekaligus mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi dari kebijakan yang akan diamati. Di samping itu, penentuan lokasi penelitian akan memperhatikan beberapa aspek seperti : daya

jangkau lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti, waktu yang tersedia, dukungan data (kemudahan untuk memperoleh data) di lokasi tersebut.

Studi tentang implementasi kebijakan jaring pengaman sosial Program PPK ini akan mengambil lokasi di Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten yang mempunyai beragam jenis usaha untuk penggunaan dana PPK dibandingkan kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Barat.
2. Untuk melihat out put yang dihasilkan dari banyaknya alokasi dana yang diterima oleh Kabupaten Cirebon.
3. Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang mempunyai keragaman sektor dalam berusaha dan merupakan daerah perbatasan antara Propinsi Jawa Barat dengan Propinsi Jawa Tengah. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, keragaman sektor usaha akan makin memperkaya khasanah penelitian yang dilakukan disamping juga dapat dilihat aspek keterkaitan (*linkages*), jaringan (*network*) dan pasar (*market*).
4. Kabupaten Cirebon merupakan daerah perbatasan antara propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah serta dekat dengan DI. Yogyakarta, serta jarak tempuh yang relatif dekat dengan Ibukota DKI Jakarta. Hal ini relatif akan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data secara komprehensif khususnya yang terkait dengan implementasi Program PPK.

D. Variabel Penelitian.

1. *Dependent Variabel* atau variabel terpengaruh, dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Pengembangan Kecamatan.
2. *Independent Variabel* atau variabel pengaruh dalam penelitian ini adalah, isi kebijakan, kemampuan pelaksana dan lingkungan :

2.1. Variabel Isi kebijakan.

Variabel ini menyangkut bentuk kebijakan yang ditetapkan dan kejelasan isinya. Artinya apabila Program PPK tersebut mempunyai konteks yang jelas dan konsisten terhadap tujuannya serta ditambah dengan semakin seringnya kebijakan tersebut dikomunikasikan dengan masyarakat, maka masyarakat dan institusi-institusi yang ada dalam masyarakat termasuk organisasi Pemda Kabupaten Cirebon dapat berpartisipasi dan memanfaatkan kebijakan tersebut secara profesional guna kepentingan institusinya maupun kepentingan publik, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap laju pembangunan daerah.

2.2. Variabel Kemampuan Pelaksana.

Variabel kemampuan pelaksana merupakan salah satu variabel yang menentukan implementasi kebijakan, karena implementasi akan menjadi efektif jika pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan (baik secara individu maupun organisasi) mempunyai pengetahuan, kecakapan/ketrampilan yang memadai, berwawasan luas dan berdisiplin tinggi atau konsisten terhadap misi kebijakan, struktur organisasi, sistem

yang berlaku. Oleh karena itu kemampuan dari organisasi implementator kebijakan harus berkualitas, karena nantinya akan menjabarkan pilihan kebijakan yang telah ditetapkan dengan berbagai sumber-sumber daya yang ada, sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik. Sebab kemampuan pelaksana yang kurang baik akan menimbulkan penghamburan dana atau kemungkinan terjadi distorsi informasi sehingga dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan.

2.3. Variabel Lingkungan.

Lingkungan merupakan kondisi psikologis yang dapat bersifat mendukung ataupun menghambat implementasi kebijakan, sebab dalam lingkungan tersebut terdapat beberapa karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang menyatu dengan berbagai individu dan institusi-institusi yang ada. Sehingga bisa jadi kebijakan kurang adaptif terhadap lingkungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Agar kebijakan dapat terimplementasi dengan baik, harus benar-benar mengetahui kondisi psikologis lingkungan, sehingga dalam kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan pendorong tercapainya kinerja yang diinginkan.

3. Definisi Konseptual.

- 3.1. **Implementasi kebijakan**, adalah serangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah program/kebijakan ditetapkan, yang meliputi aktivitas pengambilan keputusan, langkah-langkah operasional yang strategis untuk

mewujudkan tujuan program dan mencapai sasaran program yang telah ditetapkan. Menurut Ripley dan Franklin (1982), proses kebijakan terdiri dari beberapa tahap penting, yaitu : tahap formulasi, tahap implementasi, dan tahap penilaian terhadap performance. Sejalan dengan pendapat Muhadjir Darwin (1993), bahwa proses implementasi bukanlah proses mekanis dimana setiap sektor akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai dengan scenario pembuat kebijakan, tetapi merupakan proses kegiatan yang acapkali rumit, diwarnai perbenturan kepentingan antar aktor yang terlibat, baik sebagai administrator, petugas lapangan atau kelompok sasaran. Selama proses implementasi beragam interpretasi atas tujuan, target dan strategi implementasi dapat berkembang. Selain itu berbagai faktor dapat menimbulkan penundaan, penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan arah kebijakan. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa gagalnya suatu kebijakan bukan karena salahnya tujuan atau target yang dirumuskan tetapi karena lemahnya proses implementasi.

3.2. Isi Kebijakan, adalah kegiatan-kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran program yang mempunyai tujuan, sebagai berikut :

- Tujuan umum : yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif

dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung ekonomi perdesaan.

- Tujuan khusus, yaitu : (a) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan, (b) meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat perdesaan, (c) menyediakan prasarana dan sarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan, (d) meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dan aparat di desa dan kecamatan untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Apabila program PPK tersebut mempunyai konteks yang jelas dan konsisten terhadap tujuannya serta ditambah dengan semakin seringnya kebijakan tersebut dikomunikasikan dengan masyarakat, maka masyarakat dan institusi-institusi yang ada dalam masyarakat termasuk organisasi Pemda Kabupaten Cirebon dapat berpartisipasi dan memanfaatkan kebijakan tersebut secara profesional guna kepentingan institusinya maupun kepentingana publik, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap laju pembangunan daerah.

- 3.3. **Kemampuan Pelaksana**, adalah kecakapan/ketrampilan yang memadai, tingkat pengetahuan yang dimiliki, kedisiplinan yang tinggi terhadap misi kebijakan, berwawasan luas, serta struktur organisasi implementator kebijakan. Oleh karena itu, kemampuan dari organisasi implementator

kebijakan harus berkualitas, karena nantinya akan menjabarkan pilihan kebijakan yang telah ditetapkan dengan berbagai sumber-sumber daya yang ada, sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik. Sebab kemampuan pelaksana yang kurang baik akan menimbulkan penghamburan dana atau kemungkinan terjadi distorsi informasi sehingga dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan.

3.4. **Lingkungan**, adalah merupakan kondisi psikologis yang dapat bersifat mendukung ataupun menghambat implementasi kebijakan, sebab dalam lingkungan tersebut terdapat beberapa karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang menyatu dengan berbagai individu dan institusi-institusi yang ada, sehingga bisa jadi kebijakan kurang adaptif terhadap lingkungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Agar kebijakan dapat terimplementasi dengan baik, harus benar-benar mengetahui kondisi psikologis lingkungan, sehingga dalam kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan pendorong tercapainya kinerja yang diinginkan.

4. Definisi Operasional.

4.1. Implementasi Program PPK (Y), dengan indikator :

- 1). Tingkat sosialisasi program .
- 2). Tingkat perencanaan kegiatan.
- 3). Tingkat pengorganisasian program.
- 4). Tingkat pendanaan program.

- 5). Tingkat pelaksanaan program.
- 6). Tingkat monitoring dan evaluasi program.

4.2. Isi Kebijakan (X1), dengan indikator :

1). Bentuk Kebijakan :

- Dalam bentuk bantuan dana.
- Dalam bentuk peraturan-peraturan.
- Dalam bentuk petunjuk-petunjuk.

2). Kejelasan kebijakan:

- Kejelasan maksud serta tujuan kebijakan oleh kelompok sasaran.
- Kejelasan maksud serta tujuan kebijakan oleh pelaksana program.
- Kejelasan tata cara penerimaan bantuan dana oleh kelompok sasaran.
- Kejelasan peraturan penggunaan bantuan dana oleh kelompok sasaran.
- Kejelasan output yang diharapkan dari pembuat kebijakan oleh pelaksana program.

4.3. Kemampuan pelaksana (X2), dengan indikator :

1). Pengetahuan pelaksana.

- Pendidikan formal yang dimiliki.
- Pendidikan non-formal yang pernah diikuti.
- Pemahaman akan isi kebijakan.
- Pemahaman dari sosialisasi program.

2). Kecakapan/ketrampilan pelaksana.

- Ketrampilan yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan.
- Kecakapan dalam menjalankan tugas
- Ketelitian dan keseriusan dalam melaksanakan kegiatan.

3). Wawasan yang dimiliki.

- Wawasan yang dimiliki tentang seleksi penerima bantuan dana oleh kelompok sasaran.
- Wawasan yang dimiliki tentang ketepatan penerima bantuan dana oleh kelompok sasaran.
- Wawasan yang dimiliki tentang deviasi penggunaan bantuan dana oleh kelompok sasaran.
- Wawasan yang dimiliki tentang pemecahan masalah dalam pelaksanaan program.

4). Kedisiplinan pelaksana.

- Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas.
- Kedisiplinan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
- Kedisiplinan dalam pembuatan laporan pelaksanaan program.

4.4. Lingkungan (X3), dengan indikator :

1). Karakteristik sosial masyarakat.

- Sifat-sifat yang dimiliki masyarakat.
- Perilaku masyarakat terhadap program.
- Tanggapan masyarakat terhadap isi kebijakan.

2). Karakteristik ekonomi masyarakat.

- Kondisi ekonomi masyarakat.
- Keadaan masyarakat sesuai kondisi yang ada.
- Kondisi alam dalam mendukung ekonomi masyarakat.

3). Individu masyarakat.

- Tanggapan dari masing-masing individu terhadap program.
- Dukungan secara individu terhadap program.
- Harapan dari pelaksanaan program.

4). Institusi-institusi yang ada.

- Kepedulian terhadap program.
- Dukungan yang diberikan guna keberhasilan program.
- Kerjasama dalam pelaksanaan program.

E. Jenis dan Sumber Data.

1. Jenis data.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua jenis data, yaitu :

1). Data Kuantitatif.

Yaitu data yang berupa angka-angka, tabel-tabel, skala, formula dan sebagian yang sedikit banyak menggunakan perhitungan angka.

2). Data Kualitatif.

Yaitu data-data yang sukar diukur dengan angka atau ukuran-ukuran perhitungan matematika.

2. Sumber data.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data yang meliputi :

- 1). **Data primer**, yaitu data-data yang berasal dari instansi terkait, dalam hal ini adalah Bappenas, Sekretariat Tim Koordinasi PPK Pusat, Bapeda Jawa Barat, Pemda Kabupaten Cirebon, dan beberapa sumber lain dilingkungan Pemda Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat.
- 2). **Data sekunder**, yaitu sumber data yang tidak langsung, yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan, laporan-laporan serta laporan riset yang sudah ada, termasuk data yang bersumber dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

F. Instrumen Penelitian.

Dalam pengumpulan data, alat yang digunakan adalah :

- 1). **Observasi**, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap implementasi kebijakan jaring pengaman sosial khususnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

- 2). **Interview**, pengumpulan data dengan menggunakan atau menyiapkan daftar pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu untuk dijawab oleh responden.
- 3). **Kuesioner**, daftar pertanyaan yang tertulis untuk dijawab responden, yang kemudian menjadi langkah selanjutnya untuk pembuktian hipotesa.

G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.

Populasi adalah merupakan keseluruhan unsur-unsur yang memiliki satu atau beberapa ciri atau karakteristik yang sama (Anto Dayan, 1996:110), sehingga dalam penelitian ini adalah semua unsur pemerintahan yang berkompeten dengan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon, terdiri dari unsur pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten. Disamping itu, sasaran studi juga mencakup pihak konsultan pendamping, fasilitator, dan masyarakat yang jumlahnya 548 orang.

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian (Anton Dayan, 1996:65). Sedangkan macam-macam sampling atau sampel menurut Mardalis (2002:56) adalah : (1) sampel acak, atau sampel random, (2) sampel berstrata, (3) cluster sampel, (4) purposive sampel, (5) quota sampel, dan (6) insidental sampel. Sedangkan tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *proporsional random sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai proporsional dari populasi yang menjadi subyek penelitian. Anton Dayan dan Sukardin Arikunto menyatakan bahwa populasi yang jumlahnya

kurang dari 100 sampel, maka pengambilan sampel minimum 30 %, sedangkan populasi yang jumlahnya lebih dari 100 sampel, dapat diambil max 20 %. Dari ketentuan tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini akan diambil sebanyak 107orang.

Secara rinci jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4

**Jumlah Sampel Penelitian
Implementasi Program Pengembangan Kecamatan
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.**

No.	Lokasi	Responden	Populasi (Satuan)	Sampel (19,5%)
1	Kabupaten	1. Bappeda bidang ekonomi. 2. Fasilitator.	21 orang 1 orang	4 orang 1 orang
2	Kecamatan	1. Camat 2. Fasilitator.	8 orang 8 orang	2 orang 2 orang
3	Desa	1. Kepala Desa. 2. LKMD. 3. Fasilitator.	50 orang 50 orang 50 orang	10 orang 10 orang 10 orang
4	Masyarakat	1. Prasarana. 2. Ekonomi.	182 orang 178 orang	34 orang 34 orang
	Jumlah		548 orang	107orang

H. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan.

Tahap ini merupakan bagian yang terpenting dari keseluruhan penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini dilakukan dalam rangka memperoleh data secara langsung dari obyek penelitian (sasaran). Adapun teknik-teknik yang dipergunakan dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut :

- a. *Observasi*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pengamatan langsung terhadap obyek yang sedang diteliti. Penulis mengunjungi setiap bagian untuk mencatat segala kegiatan dan laporan hasil evaluasi yang berhubungan dengan program PPK.
- b. *Interview*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Pemimpin Proyek, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program PPK.
- c. *Questionnaire*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) yang harus diisi oleh responden sebanyak 107 orang sebagai sampel.

Beberapa alasan yang mendasari penggunaan angket (kuesioner) pada penelitian ini adalah :

- 1). Subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2). Hemat dalam segi waktu dan biaya.

- 3). Interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti (Sutrisno Hadi, 1990).

2. Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah teori dan informasi yang erat hubungannya dengan materi penelitian. Hal ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, majalah, surat kabar dan sumber-sumber lainnya.

3. Rencana Analisis Data.

Apabila data yang diperlukan telah terkumpul seluruhnya, maka tahap selanjutnya adalah analisis terhadap data tersebut, yaitu dengan skala pengukuran yang sering digunakan dalam penelitian sosial, yang meliputi : skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang dipergunakan adalah skala ordinal. Penetapan skor atas jawaban responden yang menggunakan skala ordinal ini diklasifikasikan ke dalam empat kategori jawaban, yaitu :

- a. Jawaban sangat mendukung/selalu/sangat, diberikan skor 4.
- b. Jawaban mendukung/kadang-kadang, diberikan skor 3
- c. Jawaban kurang mendukung/kadang-kadang, diberikan skor 2
- d. Jawaban tidak mendukung/tidak pernah, diberikan skor 1

Selain model tersebut, untuk pertanyaan atau pernyataan yang hanya menyediakan jawaban “Ya” atau “Tidak” dan sifatnya sebagai filter saja, maka tidak dilakukan skoring terhadapnya, namun bila sifatnya bukan sebagai filter, maka jawaban “Ya” diberikan skor 4 dan untuk jawaban “Tidak” diberikan skor 1.

I. Teknik Analisis Data.

Dalam teknik analisis data, penulis lebih banyak mempergunakan data yang bersifat kuantitatif. Hal ini berarti setiap data yang diperoleh dari jawaban responden akan diberi nilai dengan skala yang telah ditentukan. Sebelum pada tahap analisis yang sebenarnya dilakukan, terlebih dahulu data diperlakukan melalui proses-proses sebagai berikut :

- 1). **Editing**, yaitu melakukan penelitian kembali terhadap kebenaran data yang diperoleh dari isian kuesioner dan wawancara.
- 2). **Coding**, yaitu mengklasifikasikan jawaban responden menurut jenisnya dengan cara memberi kode pada tiap jawaban sesuai dengan kriteria yang dipakai.
- 3). **Tabulasi**, yaitu melakukan proses penyesuaian ke dalam bentuk tabel tertentu dengan jalan mengelompokkan jawaban yang diperoleh menurut jawaban yang sama secara teliti dan teratur, selanjutnya dihitung dan dijumlahkan gejala yang termasuk dalam kategori.

Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa data dengan cara sebagai berikut :

- 1). **Analisis Kualitatif**, yaitu analisa yang dilakukan apabila data yang diperoleh tidak dapat diterjemahkan dengan angka, atau dengan kata lain analisa data yang bersifat memografis atau berujud kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi. Analisa ini dikerjakan dengan jalan menguraikan informasi-informasi tersebut secara logis.
- 2). **Analisis Kuantitatif**, yaitu analisa data yang diperuntukkan bagi data yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori dan berujud angka.

J. Teknik Pengujian Hipotesis.

Dalam pengujian hipotesis pada dasarnya dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis sebelumnya. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah disusun, oleh karena penelitian ini mempunyai hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan adalah pengujian hipotesis dari Konkordansi Kendall untuk korelasi berganda (secara bersama-sama/keseluruhan). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan data penelitian merupakan data ordinal (jenjang), maupun data rasio yang diordinalkan. Alat analisa yang dipakai adalah sebagai berikut :

1). Korelasi Rank Tau Kendall.

Korelasi ini digunakan untuk menunjukkan atau mengetahui apakah cukup kuat atau beralasan bagi kita dalam menyatakan ada atau tidaknya hubungan antar dua variable. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\sum S}{\frac{1}{2} n (n - 1)}$$

Apabila terdapat nilai pengamatan yang sama, maka memakai rumus :

$$= \frac{\sum S}{\sqrt{\frac{1}{2} n (n - 1) - T_x} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} n (n - 1) - T_y}}$$

$$T_x = \frac{1}{2} V t (t-1)$$

$$T_y = \frac{1}{2} V t (t-1)$$

Keterangan :

S = Jumlah banyaknya Rank yang lebih besar.

n = Banyaknya pasangan data.

= Korelasi Tau kendal.

R_{xi} = Ranking dari variabel X

R_{yi} = Ranking dari variabel Y

t = Jumlah macam ranking yang berada dalam nilai pengamatan yang sama

Menurut Sutrisno Hadi (1990:275), interpretasi koefisien korelasi untuk mengetahui nilai "r" tinggi atau rendah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

* 0,00 – 0,19 = sangat rendah.

* 0,20 – 0,39 = rendah

* 0,40 – 0,59 = sedang

* 0,60 – 0,79 = kuat

* 0,80 – 0,100 = sangat kuat

Pengujian Hipotesis.

Menentukan formulasi Ho dan Ha.

Ho : $r = 0$: tidak ada hubungan antara variabel bebas Xi dengan variabel terikat Y.

Ha : $r \neq 0$: ada hubungan antara variabel bebas Xi dengan variabel terikat Y.

Keterangan :

X1 = Isi kebijakan.

X2 = Kemampuan pelaksana.

X3 = Lingkungan.

Y = Implementasi Program PPK.

Memilih taraf nyata dan menentukan derajat kebebasan, dengan taraf nyata 0,05 atau tingkat kepercayaan 95 % dan derajat kebebasan (dk) : n-2

Uji Signifikasi.

$$Z = \frac{r}{\sqrt{(4n+10)/(9n^2-9n)}}$$

Keterangan :

r = koefisien korelasi Tau Kendal.

N = banyaknya responden

Kesimpulan :

Jika $Z > Z_{0,025}$, maka H_0 ditolak.

2). Korelasi Berganda.

Perhitungan korelasi berganda menggunakan koefisien konkordansi Kendall

(W) dengan rumus sebagai berikut :

$$W = \frac{S}{\{1/12 k^2 (n^3 - n)\} - k \sum T}$$

Apabila terdapat nilai pengamatan yang sama maka r_s memakai rumus :

$$W = \frac{S}{\{1/12 k^2 (n^3 - n)\} - k \sum T}$$

Keterangan :

$$\begin{aligned} S &= \sum Ri^2 - (Ri)^2 / n \\ R &= \text{Jumlah ranking} \\ k &= \text{Banyaknya variabel yang dikorelasikan.} \\ n &= \text{Banyaknya kolom (ulangan)} \\ T &= (\sum t^2 - t) / 12 \end{aligned}$$

Uji Signifikasi W, yaitu :

$$X^2 = k(n-1) W$$

Keterangan :

$$\begin{aligned} X^2 &= \text{Chi Square} \\ K &= \text{Variabel} \\ n &= \text{Jumlah responden} \end{aligned}$$

Kaidah : tolak H_0 jika $X^2 > X^2 \alpha (n-1)$.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis.

Letak Geografis Kabupaten Cirebon terletak diantara 108,20' – 108,50' Bujur Timur (BT) dan 6,30' – 7,00' Lintang Selatan (LS) dan berada di ketinggian 0 – 300 meter DPL (diatas permukaan laut), merupakan wilayah dataran rendah yang terletak di pantai utara Jawa Barat paling timur dan memiliki posisi geografis sangat strategis, ibukotanya terletak di kota Sumber sekitar 12 km disebelah barat kota Cirebon dengan luas 989,70 km (2,15 % dari wilayah Jawa Barat). Secara administratif Kabupaten Cirebon terbagi dalam 8 wilayah Pembantu Bupati, 29 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 424 Desa. Batas wilayah administratif meliputi : (1). Sebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Indramayu dan Kotamadya Cirebon; (2) Sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Kuningan; (3) Sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah; (4) Sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Majalengka.

Sungai-sungai utama yang mengalir di wilayah Kabupaten Cirebon antara lain : Cisanggarung, Kumpulkwista, Winong, Ciwaringin, dan Jamblang, sungai-sungai tersebut bermuara ke laut jawa. Jenis tanah di Kabupaten Cirebon yang paling dominan dan luas adalah jenis tanah aluvial, baik aluvial kelabu,

aluvial kelabu tua maupun asosiasi aluvial kelabu tua dan gley hotmus rendah. Jenis-jenis tanah tersebut umumnya sesuai untuk pertanian semusim khususnya sawah, palawija dan perikanan. Jenis tanah litosol coklat kemerahan mendominasi wilayah Kecamatan Cirebon Selatan dan Beber dengan solum yang tebal, tanah ini cocok untuk jenis-jenis tanaman keras dan buah-buahan karena sesuai pula ketinggiannya yang rata-rata 100 meter diatas permukaan air laut. Jenis tanah padsolik merah, asosiasi padsolik merah kekuningan, titosol merah kekuningan dan litosol serta asosiasi padsolik kuning dan hidromorf kelabu sesuai untuk usaha non pertanian, misalnya industri terdapat di Kecamatan Palimanan dan Ciwaringin.

B. Kondisi Prasarana dan Sarana.

1. Prasarana Perhubungan.

Wilayah Kabupaten Cirebon memiliki tingkat aksesibilitas yang relatif tinggi karena didukung keragaman serta kelengkapan prasarana perhubungan (darat, laut dan udara), sehingga sangat menunjang pengembangan investasi maupun bisnis.

1). Prasarana Perhubungan Darat.

Sistem transportasi yang ada di Kabupaten Cirebon meliputi angkutan jalan raya, kereta api, angkutan udara dan angkutan perairan. Angkutan jalan raya mendominasi sistem transportasi di wilayah ini. Secara kuantitatif panjang jalan raya sepanjang 731,28 km yang terdiri dari

panjang jalan negara 71,97 km, panjang jalan propinsi 65,11 km, dan panjang jalan kabupaten 594,20 km. Jalan alternatif (jalan tol) untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di Kabupaten Cirebon sepanjang 28,50 km yang menghubungkan antara Palimanan dan Kanci. Selain itu hampir seluruh wilayah telah terjangkau jaringan jalan yang dapat dicapai dengan kendaraan roda empat. Angkutan kereta api umumnya hanya melintas, ditandai keberadaan sejumlah stasiun kecil, yang menghubungkan Jakarta-Cirebon-Surabaya lewat Semarang-Yogyakarta sepanjang 38,75 km. Stasiun kereta api potensial dikembangkan sebagai stasiun peti kemas untuk pengangkutan barang terutama ke Jakarta yaitu stasiun Cangkring dan Kanci yang keduanya berada di sentra pengembangan industri.

2). Prasarana Perhubungan Laut.

Kabupaten Cirebon memiliki pantai sepanjang 54 km yang dimanfaatkan sebagai prasarana pengangkutan perairan (sungai dan laut), dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan. Pantai utara Cirebon yang strategis dan potensial belum dimanfaatkan secara optimal terutama untuk transportasi barang dari dan ke Jakarta.

3). Prasarana Perhubungan Udara.

Angkutan udara berada di perbatasan Cirebon (Penggung), belum efektif dimanfaatkan, namun demikian keberadaan bandara ini merupakan aset potensial untuk kepentingan masa mendatang seiring dengan perkembangan ekonomi.

2. Prasarana Dasar.

Prasarana dasar yang tersedia dan memadai yang perlu ditingkatkan guna mendukung pengembangan investasi meliputi :

1). Telekomunikasi.

Jaringan telepon sudah dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Kapasitas yang telah terbangun siap memenuhi permintaan penduduk maupun dunia usaha. Dengan sistem sentral otomatis yang berlokasi di Arjawinangun, Pabuaran, Losari, Plered, Kanci, Jamblang dan Sindang Laut.

2). Listrik dan Gas Alam.

Jaringan listrik sudah dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Daya yang terpasang masih melebihi kebutuhan penduduk maupun dunia usaha. Jaringan gas alam di wilayah ini masih terbatas jumlah pelanggan dan relatif kecil namun pasokan gas alam yang tersedia relatif besar dan dapat mendukung perkembangan dunia usaha maupun rumah tangga. Pemakaian gas alam dipasok dari Pertamina UEP III Cirebon yang dikelola oleh Perum Gas Cirebon.

3). Air Bersih.

Kebutuhan air bersih dilayani PDAM Kabupaten Cirebon dengan memanfaatkan air dari bendungan Karet di sungai Kumpulkwista di wilayah Kapetakan dan Cirebon Utara, sedangkan untuk memenuhi air di Kecamatan Weru, Sumber, Plumbon, Cirebon Selatan, Cirebon Barat dari

mata air Cigusti Kabupaten Kuningan dan mata air Cibodas di Kuningan yang dimanfaatkan untuk kepentingan melayani wilayah Klungenan, Palimanan dan Plumbon, sedangkan jaringan irigasi yang meliputi saluran primer, saluran sekunder dan tersier telah dapat menjangkau sebagian besar areal persawahan.

C. **Kondisi Perekonomian.**

1. Sektor Pertanian dan Kehutanan.

Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian integral pembangunan nasional dengan tujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkesinambungan. Kontribusi peranannya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, peningkatan peranserta dan produktivitas masyarakat, pemantapan swasembada pangan, menumbuh kembangkan kelembagaan petani dan ekonomi, serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Pertanian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang masih dominan di wilayah Kabupaten Cirebon, meski dari nilai produksi mulai tergeser oleh sektor lainnya seperti perdagangan dan industri. Dominasi kegiatan pertanian ditandai oleh ketersediaan lahan yang relatif luas, penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta sumbangannya terhadap PDRB. Dalam pembangunan jangka panjang pengembangan sektor pertanian lebih diarahkan kepada

pendekatan intensifikasi dan diversifikasi. Pengembangan sektor pertanian semakin ditekankan pada keterkaitan antar sektor terutama industri. Dengan demikian investasi di sektor pertanian masih luas. Sektor pertanian dalam kontribusi PDRB menduduki peranan prosentase cukup besar. Semakin besar prosentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan potensi wilayah di Kabupaten Cirebon dengan daya dukung luas lahan pertanian dan limbah perikanan laut yang cukup memadai, maka dapat dikembangkan sentra-sentra produk peternakan yang dapat diunggulkan yaitu domba dan ternak itik. Untuk pengembangan dimasa yang akan datang yaitu ternak sapi potong, mengingat kebutuhan permintaan produksi peternakan (daging dan telur) terus meningkat dan untuk daerah pengembangan yang potensi untuk ternak sapi potong dan domba yaitu Gegesik, Arjawinangun, Susukan, Beber dan Waled, sedangkan untuk ternak itik yaitu Kapetakan, Losari dan Babakan.

Kabupaten Cirebon mempunyai potensi perikanan dengan meliputi penangkapan ikan laut, budidaya ikan di tambak/payau, usaha budidaya ikan air tawar dan usaha ikan di perairan umum. Pengembangan tambak bandeng sekitar 7,500 Ha yang tersebar di Kecamatan Kapetakan, Cirebon Utara, Mundu, Astanajapura, Babakan dan Losari, membuka peluang investasi bagi industri pengolahan ikan dan untuk pengembangannya tersedia lahan 1.535,15 Ha di Kecamatan Losari.

Kebijaksanaan pembangunan perkebunan diarahkan untuk mengembangkan sektor produksi yang mengarah kepada agroindustri dan agrobisnis. Pengelolaan komoditas perkebunan saat ini dilaksanakan oleh rakyat berupa penanaman pada lahan pekarangan untuk komoditi melinjo dan kelapa, sedangkan tebu ditanam pada lahan sawah dan tegalan.

Kabupaten Cirebon memiliki sumber daya alam yang berlimpah yang perlu dimanfaatkan dan diberdayakan untuk kepentingan perekonomian khususnya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber alam yang cukup potensial adalah tanaman bambu dimana tanaman ini termasuk hasil hutan non kayu yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam berbagai rumah tangga dan industri.

2. Sektor Industri.

Keadaan industri di Kabupaten Cirebon selama ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi maupun nilai produksi. Dari potensi yang ada terdapat 80 jenis komoditi industri yang terbagi dalam industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sebanyak 6.109 unit usaha, industri logam mesim (ILM) sebanyak 942 unit usaha, industri kimia (IK) sebanyak 3.558 unit usaha dan Industri Aneka (IA) sebanyak 1.384 unit usaha. Industri di Kabupaten Cirebon sebagian besar tergolong industri kecil (99 %) yang dewasa ini penyebarannya untuk industri formal disekitar pinggiran kota kabupaten dan Kota Kecamatan, sedangkan industri non formal (rumah tangga) terbentuk

dalam sentra dan non sentra industri yang keberadaannya tersebar di pelosok pedesaan. Produk meubel rotan masih tetap mendominasi pasar ekspor dan komoditi ekspor lainnya berupa benang tenun, udang beku, sumpit, rajungan, ikan teri, minyak kenanga, bawang goreng, emping melinjo, manisan kolang kaling, batu alam, arak, batik, sandal karet, minyak jahe, meja keramik, kerajinan kulit kerang dan kerajinan dari besi. Negara tujuan ekspor adalah : Eropa, Jepang, Taiwan, Australia, USA, Belanda, Singapore, Afrika dan Malaysia.

D. Kondisi Sosial Budaya.

Kondisi Sosial Budaya di Kabupaten Cirebon terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Kependudukan.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Barat yang mempunyai penduduk cukup besar. Jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon saat ini sebanyak 481.002 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 1.930.210 orang yang tersebar di 29 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 424 desa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon mencapai 1,41 % per tahun. Pada tahun 2001 Penduduk usia produktif atau usia angkatan kerja (10 tahun keatas) berjumlah 939.536 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 624.535 jiwa dan perempuan 315.001 jiwa. Dari jumlah tersebut tercatat 858.103 jiwa telah bekerja yang terdiri atas laki-laki 570.547

jiwa dan perempuan 287.556 jiwa. Sedangkan dalam taraf mencari pekerjaan berjumlah 81.433 jiwa yang terdiri atas laki-laki 53.988 jiwa dan perempuan 27.445 jiwa. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 990.674 jiwa yang terdiri atas, sekolah berjumlah 496.406, mengurus Rumag Tangga 388.805, lainnya 105.463 jiwa. Lapangan usaha utama adalah sektor pertanian menyerap tenaga kerja 38 %, perdagangan 21 %, industri 14 % dan sisanya 27 % pada sektor lainnya. (Badan Pusat Statistik Kab.Cirebon, 2002).

- Komposisi penduduk menurut jenis kelamin selama 5 tahun terakhir hampir seimbang, jumlah penduduk perempuan tiap tahunnya selalu lebih besar dari jumlah penduduk laki-lakinya (sex rasio per 100), sedangkan sex rasio pada tahun 2001 sebesar 101,61 yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuannya.

Kepadatan penduduk dimasing-masing Kecamatan menunjukkan ketidakmerataan. Hal ini disebabkan oleh kondisi dan potensi masing-masing wilayah kecamatan yang tidak sama. Makin padatnya penduduk cenderung dipusat kota kecamatan dan daerah perkotaan, dimana banyak terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai bidang usaha yang dapat memberikan lapangan pekerjaan seperti perdagangan, industri, pengangkutan, pertanian, pertambangan, pemerintahan, jasa-jasa, dan lain-lain. Di Kabupaten Cirebon untuk tahun 2001 mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1948,96 jiwa per Km², Kecamatan Plumbon merupakan Kecamatan yang memiliki

angka kepadatan tertinggi yaitu sebesar 3.626,69 jiwa per Km², sedangkan yang terendah adalah kecamatan Kapetakan dengan 1.104,69 jiwa per Km².

Jumlah penduduk yang tersebar di 424 desa, jumlah penduduk miskin, jumlah desa miskin yang ada di 29 Kecamatan, Kabupaten Cirebon serta peringkat Kecamatan miskin, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel IV.1

**Jumlah Desa dan Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon.
Keadaan sampai dengan Desember 2001.**

No.	Kecamatan	Jml Desa	Jml Desa Miskin	Jumlah Penduduk		Jml Pdd Miskin		Prkt. Kec. Miskin
				KK	Jiwa	KK	Jiwa	
1.	Waled	19	11	19.732	76.352	6.645	26.189	16
2.	Ciledug	22	12	23.890	91.071	713	29.242	18
3.	Losari	10	10	13.227	53.675	5.180	19.684	1
4.	Pabedilan	8	5	9.438	33.876	3.387	13.524	15
5.	Babakan	27	18	30.567	120.444	9.764	39.086	12
6.	Karang Sembung	22	16	18.526	72.207	8.392	39.117	8
7.	Lemah Abang	9	3	9.503	38.054	2.214	8.944	26
8.	Susukan Lebak	10	3	6.237	25.723	1.142	4.554	28
9.	Sedong	12	10	11.796	44.717	4.287	16.859	5
10.	Astanajapura	15	11	21.198	92.414	8.924	39.292	9
11.	Pangenan	8	4	8.881	36.069	2.273	9.319	22
12.	Mundu	11	6	13.611	55.127	1.839	8.991	17
13.	Beber	18	8	15.231	63.939	3.663	19.799	20
14.	Cirebon Selatan	73	11	12.531	55.706	4.264	18.588	3
15.	Sumber	8	3	7.658	32.260	1.892	8.765	24
16.	Dukupuntang	8	2	9.231	37.401	2.262	7.077	29
17.	Palimanan	18	13	20.585	85.203	7.569	32.541	10
18.	Plumbon	29	15	32.654	131.105	7.144	29.904	21
19.	Weru	23	7	30.263	126.646	6.664	28.880	27
20.	Cirebon Barat	16	6	21.035	86.899	4.628	20.049	25
21.	Cirebon Utara	15	10	17.910	74.130	5.152	23.776	13
22.	Kapetakan	21	17	24.329	101.174	10.701	43.591	6
23.	Klangenan	18	16	21.281	84.919	9.225	42.568	2
24.	Arjawinangun	8	6	12.605	51.629	3.413	13.285	7
25.	Pangurangan	7	3	9.280	36.658	3.653	5.343	23
26.	Ciwaringin	15	10	16.080	62.682	3.797	15.954	14
27.	Susukan	12	10	16.578	60.963	6.903	27.576	4
28.	Gegesik	13	7	17.831	61.746	6.519	26.728	19
29.	Kaliwedi.	9	6	10.302	38.421	4.121	16.072	11
	Jumlah	424	259	481.002	1.930.210	146.330	635.297	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2001.

Dari tabel 1 diatas, terlihat bahwa kecamatan Losari merupakan kecamatan peringkat pertama dari 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, sebagai kecamatan termiskin dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 5.180 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 19.684 orang, sedangkan peringkat terakhir diduduki oleh kecamatan Dukupuntang dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.262 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 7.077 orang.

Kecamatan penerima dana bantuan dalam rangka Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di kabupaten Cirebon untuk tahun 2001, ditinjau dari urutan peringkat kecamatan miskin sebagaimana yang telah disampaikan diatas, secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel 2 berikut ini.

Tabel IV.2

**Urutan peringkat kecamatan miskin
Penerima dana Program PPK Kabupaten Cirebon Tahun 2001**

No.	Kecamatan	Peringkat Kecamatan Miskin *)	Jml Penduduk Miskin		Jumlah Dana Bantuan (Rp)
			KK	Jiwa	
1.	Ciwaringin	14	3.797	15.954	1.000.000.000
2.	Plumbon	21	7.144	29.904	1.000.000.000
3.	Astanajapura	9	8.924	39.292	1.000.000.000
4.	Mundu	17	1.839	8.991	1.000.000.000
5.	Waled	16	6.645	26.189	1.000.000.000
6.	Palimanan	10	7.569	32.541	1.000.000.000
7.	Klangenan	2	9.225	42.568	1.000.000.000
8.	Kapetakan	6	10.701	43.591	1.000.000.000
	Jumlah		55.844	239.030	8.000.000.000

Sumber :
Sekretariat Tim Koordinasi PPK Kab.Cirebon, 2002.

*) Kantor BKKBN Kabupaten Cirebon, 2001

Dari tabel 2 diatas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak adalah sebanyak 43.591 jiwa berada di kecamatan Kapetakan sebagai peringkat 6 kecamatan miskin dari 29 kecamatan yang ada di kabupaten Cirebon, dengan jumlah dana bantuan sebesar Rp. 1.000.000.000,- merupakan jumlah yang sama dengan kecamatan lainnya penerima dana bantuan Program Pengembangan Kecamatan untuk tahun 2001 di Kabupaten Cirebon. Sedangkan jumlah penduduk miskin terkecil adalah sebanyak 8.991 jiwa yang berada di kecamatan Mundu sebagai peringkat 17 kecamatan miskin dari jumlah kecamatan yang ada di kabupaten Cirebon.

Jika dilihat dari peringkat kecamatan miskin, maka kecamatan penerima bantuan dana Program Pengembangan Kecamatan tahun 2001 di Kabupaten Cirebon tidak berdasarkan urutan peringkat kecamatan miskin, dengan demikian maka ada beberapa pertimbangan pemikiran sebagai dasar untuk menentukan daerah sasaran , adalah sebagai berikut :

1) Kecamatan Ciwaringin.

- Jumlah penduduk yang ada besar, yaitu sebanyak 3.797 KK, dengan jumlah jiwa sebanyak 15.954 jiwa.
- Jumlah desa yang ada besar, yaitu sebanyak 15 desa.
- Jumlah penduduk miskin banyak, yaitu sebanyak 16.080 KK, dengan jumlah jiwa sebanyak 62.682 jiwa.
- Letak geografis berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.
- Infrastruktur masih terbatas jika dibandingkan dengan kecamatan lain.

2) Kecamatan Plumbon.

- Jumlah penduduk yang ada besar, yaitu sebanyak 32.654 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 131.105 jiwa.
- Jumlah desa yang ada besar, yaitu sebanyak 29 desa.
- Jumlah penduduk miskin banyak, yaitu sebanyak 7.144 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 29.904 jiwa.
- Kesenjangan antara miskin dan kaya cukup besar, hal ini terlihat adanya usaha ekonomi produktif yang besar.

3) Kecamatan Astanajapura.

- Jumlah penduduk yang ada besar, yaitu sebanyak 21.198 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 92.414 jiwa.
- Jumlah desa yang ada besar, yaitu sebanyak 15 desa.
- Jumlah penduduk miskin banyak, yaitu sebanyak 8.924 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 39.292 jiwa.
- Prioritas kepada masyarakat pantai yang miskin.
- Wilayah luas sehingga dipecah menjadi dua kecamatan, yaitu kecamatan Pangenan dan kecamatan Astanajapura.
- Karakteristik masyarakat keras, banyak preman, dan tindak kejahatan.

4) Kecamatan Mundu.

- Jumlah penduduk yang ada besar, yaitu sebanyak 13.611 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 55.127 jiwa.
- Jumlah desa yang ada cukup besar, yaitu sebanyak 11 desa.

- Prosentase penduduk miskin besar , yaitu sebanyak 1.839 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 8.991 jiwa.
- Infrastruktur masih kurang jika dibandingkan dengan kecamatan lain.
- Kondisi prasarana yang ada masih kurang.
- Pemberdayaan masyarakat nelayan cukup berhasil.
- Karakteristik masyarakat yang ada cukup keras.

5) Kecamatan Waled.

- Jumlah penduduk yang ada besar, yaitu sebanyak 19.732 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 76.352 jiwa.
- Jumlah desa yang ada besar, yaitu sebanyak 19 desa.
- Jumlah penduduk miskin banyak, yaitu sebanyak 6.645 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 26.189 jiwa.
- Letak geografis jauh dengan kota.
- Pembangunan masih tertinggal, dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di kabupaten Cirebon.
- Prasarana yang ada masih sangat kurang.
- Kegiatan ekonomi produktif masih kurang.

6) Kecamatan Palimanan.

- Jumlah penduduk yang ada besar, yaitu sebanyak 20.585 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 85.203 jiwa.
- Jumlah desa yang ada besar, yaitu sebanyak 18 desa.
- Jumlah penduduk miskin banyak, yaitu sebanyak 7.569 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 32.541 jiwa.

- Kesenjangan antara miskin dan kaya sangat kelihatan, hal ini dapat dilihat dari kegiatan ekonomi produktif yang ada.
- Jenis usaha yang ada dapat dikembangkan sesuai dengan potensi daerah, yaitu batu alam dan kamper.

7) Kecamatan Klungenan.

- Jumlah penduduk yang ada besar, yaitu sebanyak 21.281 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 84.919 jiwa.
- Jumlah desa yang ada besar, yaitu sebanyak 18 desa.
- Jumlah penduduk miskin banyak, yaitu sebanyak 9.225 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 42.568 jiwa.
- Karakteristik masyarakat yang ada agak keras karena berdekatan dengan kecamatan Kapetakan.
- Mempunyai usaha ekonomi produktif yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi daerah, yaitu sandal karet, vulkaniser ban, mainan anak-anak.

8) Kecamatan Kapetakan.

- Jumlah penduduk yang ada besar, yaitu sebanyak 24.329 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 101.174 jiwa.
- Jumlah desa yang ada besar, yaitu sebanyak 21 desa.
- Jumlah penduduk miskin banyak, yaitu sebanyak 10.701 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 43.591 jiwa.
- Pemberdayaan masyarakat pantai.
- Karakteristik masyarakat yang ada sangat keras.

- Kegiatan ekonomi produktif masih kurang.
- Mempunyai wilayah yang luas.

2. Pendidikan.

Martabat manusia dapat dipandang sebagai manusia yang bebas dan mempunyai serangkaian pilihan, sedangkan peningkatan kualitas manusia merupakan peningkatan atas serangkaian pilihannya seperti memperoleh pendidikan, kesehatan atau pendapatan. Dengan demikian, pengembangan SDM dapat dipandang ke dalam dua aspek, yaitu : *Pertama*, mengembangkan SDM agar lebih produktif dengan meningkatkan pendapatan dan *Kedua*, lebih bersifat konsumtif dengan meningkatkan kesejahteraan manusia seperti : pendidikan, kesehatan, gizi dan perumahan. Sarana pendidikan yang ada di kabupaten Cirebon pada saat ini meliputi pendidikan : Sekolah dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Perguruan Tinggi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Sarana pendidikan yang sudah memadai dalam menampung anak usia sekolah adalah pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dengan jumlah sekolah 108 buah, SD dengan jumlah sekolah 942 buah, SLTP dengan jumlah 69 buah, SMU dengan jumlah 15 buah, dan perguruan tinggi dengan jumlah 20 buah. (Badan Pusat Statistik Kab.Cirebon, 2002).

3. Kesehatan.

Sarana kesehatan merupakan sarana sosial yang sangat penting dalam membentuk sumberdaya manusia yang sehat. Banyaknya sarana kesehatan di kabupaten Cirebon sebanyak 5 buah Rumah Sakit Umum dan 41 buah

Puskesmas umum, sedangkan untuk tenaga medisnya sejumlah 57 orang dokter umum. (Badan Pusat Statistik Kab.Cirebon, 2002)

4. Peribadatan.

Sarana peribadatan di Kabupaten Cirebon untuk agama Islam sebanyak 5.691 buah, agama Protestan sebanyak 15 buah, agama Katolik sebanyak 7 buah, agama Hindu sebanyak 4 buah, dan agama Budha sebanyak 2 buah. (Badan Pusat Statistik Kab.Cirebon, 2002).

E. Kebijakan Pembangunan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon dititik beratkan pada bidang ekonomi, seiring dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara pengembangan industri dan intensifikasi pertanian.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan kebijakan strategis pembangunan sebagai berikut :

- ♣ Peningkatan mutu dan daya guna sumber daya manusia.
- ♣ Peningkatan, perluasan dan pengembangan kegiatan ekonomi serta kesempatan kerja baik antar sektor, antar wilayah, maupun antar daerah.
- ♣ Aktifitas pembangunan yang lebih seimbang antar wilayah dan daerah serta antar kelompok masyarakat.
- ♣ Penataan dan pendayagunaan kelembagaan serta aparatur pemerintah daerah.
- ♣ Pemanfaatan, pelestarian dan penyeimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dari lima kebijaksanaan strategis tersebut, maka dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan program-program pembangunan setiap tahunnya, kebijaksanaan strategis dijabarkan melalui Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) Kabupaten Cirebon dan secara operasional dituangkan dalam APBD II.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan, maka disusunlah program sektor sebagai berikut :

1. Industri.

- 1). Meningkatkan dan mengembangkan industri yang diarahkan pada pengisian / pemanfaatan kawasan industri, zona industri dan sentra industri.
- 2). Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang yang dikaitkan dengan prospek pertumbuhan industri menurut kawasan industri, zona industri dan sentra industri, meliputi air, listrik, telekomunikasi, serta peningkatan dan pengembangan jaringan jalan.
- 3). Menciptakan iklim usaha atau investasi industri yang kondusif, berlanjut dan konsisten untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
- 4). Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi industri dan merangsang karya rancang bangun dan perekayasaan industri penunjang permesinan atau barang modal dan pabrikasi.
- 5). Memperluas pemerataan kesempatan berusaha serta perluasan lapangan kerja baik industri menengah, kecil maupun industri rumah tangga.

- 6). Membina dan mengembangkan industri kecil dan kerajinan serta industri rumah tangga di wilayah pengembangan dan di desa-desa tertinggal dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan potensi yang ada.
- 7). Mengembangkan industri yang mengolah produk-produk pertanian (agroindustri) yang dapat menghasilkan nilai tambah dan perluasan lapangan kerja.
- 8). Meningkatkan daya saing industri baik dipasaran dalam negeri maupun dipasaran internasional.
- 9). Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran limbah industri dalam rangka pengembangan industri berwawasan lingkungan.
- 10). Meningkatkan hubungan kerjasama keterkaitan antara industri besar, menengah dan kecil secara efisien dan saling menguntungkan serta memantapkan keterkaitan antara sektor industri dan sektor ekonomi lainnya.
- 11). Mengembangkan sumber daya manusia industri yang diarahkan kepada peningkatan kemampuan profesionalisme dalam berwiraswasta melalui pendidikan dan pelatihan serta optimalisasi peranan lembaga pendidikan dan ketrampilan.

2. Pertanian.

- 1). Meningkatkan kemampuan para petani, peternak dan nelayan dalam penerapan dan penguasaan teknologi melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.
- 2). Mengembangkan teknologi tepat guna yang efisien dan tangguh sehingga mampu memanfaatkan dan mengkombinasikan hasil, meningkatkan mutu

dan pengolahan produksi pertanian dalam rangka menunjang pembangunan wilayah.

- 3). Meningkatkan usaha diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang makin terpadu dengan memperhatikan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- 4). Memantapkan swasembada pangan dan memperbaiki gizi keluarga melalui penganeka ragam tanaman dan bahan pangan.
- 5). Mengembangkan agroindustri dan agrobisnis untuk meningkatkan nilai tambah pertanian.
- 6). Mengembangkan pemanfaatan lahan kering dengan pengolahan yang lebih intensif.
- 7). Mengembangkan pemanfaatan produksi perkebunan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi perbaikan mutu tanaman dan pemanfaatan lahan kering yang terlantar dalam sistem pengolahan agrobisnis dan agroindustri perkebunan dengan penerapan pola perkebunan inti rakyat, pola swadaya dan pola unit pelayanan dan pengembangan.
- 8). Mengembangkan peternakan melalui peningkatan iklim usaha yang diarahkan pada peningkatan peternakan rakyat dengan memanfaatkan peranan koperasi dan melibatkan usaha swasta.
- 9). Meningkatkan upaya diversifikasi produksi perikanan dalam rangka memajukan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat desa pantai.

- 10). Mengembangkan dan memanfaatkan daerah pantai dan zona ekonomi eksklusif untuk peningkatan perikanan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 11). Memajukan usaha pertanian berskala besar yang menghasilkan komoditas pertanian unggulan sehingga mampu bersaing dipasaran melalui hubungan kerjasama usaha pertanian rakyat dan koperasi yang saling menunjang dan menguntungkan.
- 12). Meningkatkan perluasan pemanfaatan jaringan sumber daya air baik untuk kebutuhan pertanian maupun non pertanian maupun pengendalian banjir.
- 13). Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jaringan sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup.
- 14). Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan.

3. Kehutanan.

- 1). Penataan dan pemeliharaan fungsi hutan, sumber daya alam dan fungsi kelestarian lingkungan hidup serta sumber daya air.
- 2). Meningkatkan usaha kerjasama pengelolaan hutan produksi, hutan rakyat dan hutan alam yang disesuaikan dengan daya dukung sumber daya alam.
- 3). Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, konservasi tanah, rehabilitasi sungai, situ, rawa, flora dan fauna serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai.
- 4). Meningkatkan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan peraturan perundang-undangan, penyediaan informasi serta penelitian dan pengembangan pada sektor kehutanan.

- 5). Meningkatkan peran serta masyarakat disekitar hutan sehingga mampu membentuk perhutanan sosial.

Sedangkan perumusan kebijaksanaan reformasi pembangunan kabupaten Cirebon bertolak dari kondisi aktual daerah, sejalan dengan krisis di berbagai bidang pembangunan. Orientasinya adalah mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai potensi dan aspirasi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Disamping itu, perumusan kebijaksanaan reformasi pembangunan Kabupaten Cirebon juga mengacu pada kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang tertuang dalam rumusan *DAKABALAREA*, secara terperinci kebijaksanaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *DA* : *Dahareun Loba*, artinya makanan banyak, sebagai akibat dari upaya peningkatan produksi.
2. *KA* : *Kabeuli ku ra'yat*, artinya terbeli oleh rakyat, dalam hal ini rakyat harus mempunyai penghasilan melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. *BA* : *Barudak tetep bisa sakola kalayan ra'yat jagjag waringkas*, artinya anak-anak masih bisa sekolah tidak drop out dan masyarakat secara fisik hidup sehat.
4. *LA* : *Layanan umum ningkat, hade tur rancage*, artinya pelayanan umum mudah, tidak berjenjang dan membebani masyarakat, bahkan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

5. **RE** : *Reformasi lancar*, artinya tegaknya keadilan, dihormatinya hak-hak azasi manusia, terwujudnya demokrasi dalam pengambilan keputusan dan hapusnya nepotisme, kolusi serta korupsi.
6. **A** : *Anu miskin ngurangan, sarta nu iman jeung nu jeung nu taqwa nambahan*, artinya keluarga miskin berkurang dan yang beriman serta bertaqwa bertambah untuk meletakkan dasar dan sumber moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran Pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan pola dasar pembangunan di daerah, ditetapkan antara lain :

1. Terwujudnya kawasan industri di Kecamatan Kapetakan, Zona Industri di Kecamatan Astanajapura, Babakan dan Losari, serta industri di Kecamatan Weru, Plumbon, Klanganen, Palimanan, Ciwaringin, Arjawinangun dan Karangsembung.
2. Peningkatan perluasan dan penyebaran industri kecil maupun menengah, untuk mendukung perluasan kesempatan kerja dan lapangan kerja.
3. Peningkatan keterkaitan antara sektor industri dengan sektor pertanian untuk mengembangkan agroindustri dan agribisnis.
4. Pemantapan pola produksi, perdagangan dan distribusi dengan meningkatkan peran pasar dalam negeri dan pengembangan pasar luar negeri.
5. Pemantapan peran koperasi dan pengusaha kecil.
6. Terwujudnya sistem pengelolaan potensi wisata secara profesional dengan melibatkan akses masyarakat dan swasta.

7. Peningkatan sistem jaringan transportasi antar daerah dan daerah perbatasan yang memadai dan terkendali.

Sasaran Kebijakan Pembangunan tersebut senantiasa mengacu kepada rencana tata ruang yang telah ditetapkan berupa kebijakan strategis pengembangani wilayah yang telah ditetapkan.

Pusat-pusat pertumbuhan utama yang diarahkan pada pengembangan perwilayahan adalah sebagai berikut :

1. Pusat Pertumbuhan Arjawinangun.

- ◆ Wilayah Pengaruh Arjawinangun sebagai fungsi utama sentra koleksi dan distribusi hasil pertanian dan barang konsumsi, pemukiman/perkotaan dan pertanian tanaman pangan.
- ◆ Wilayah Pengaruh Susukan, Gegesik dan Kapetakan sebagai fungsi utama tanaman pangan dan perikanan darat, perikanan laut, tambak, peternakan dan kawasan industri.
- ◆ Wilayah Pengaruh Cirebon Utara sebagai fungsi utama pertanian tanaman pangan, perikanan laut dan pariwisata.

2. Pusat Pertumbuhan Sumber.

- ◆ Wilayah Pengaruh Weru sebagai fungsi utama industri kecil dan pemukiman/perkotaan.
- ◆ Wilayah Pengaruh Plumbon sebagai fungsi utama industri kerajinan, pemukiman/perkotaan terbatas dan pertanian tanaman pangan.
- ◆ Wilayah Pengaruh Klangeran, Palimanan dan Ciwaringin sebagai fungsi utama pertanian tanaman pangan.

3. Pusat Pertumbuhan Astanajapura.

- ◆ Wilayah Pengaruh Astanajapura sebagai fungsi utama permukiman/perkotaan terbatas, pertanian tanaman pangan, perikanan laut, tambak, perkebunan tebu dan industri terbatas.
- ◆ Wilayah Pengaruh Lemahabang dan Karangsembung sebagai fungsi untuk pertanian tanaman pangan, industri gula, perkebunan tebu dan perikanan darat.

4. Pusat Pertumbuhan Ciledug.

- ◆ Wilayah Pengaruh Ciledug sebagai fungsi utama koleksi distribusi hasil pertanian, barang konsumsi, permukiman/perkotaan dan pertanian tanaman pangan.
- ◆ Wilayah Pengaruh Babakan sebagai fungsi pertanian tanaman pangan, perikanan laut, tambak, peternakan dan perkebunan tebu.
- ◆ Wilayah Pengaruh Losari sebagai fungsi utama pertanian tanaman pangan, tambak, perikanan laut, peternakan dan permukiman/perkotaan terbatas.
- ◆ Wilayah Pengaruh Waled sebagai fungsi utama pertanian tanaman pangan dan tebu.

BAB V
DESKRIPSI PROGRAM
PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)

A. Latar Belakang.

Pemerintah telah berupaya secara terus menerus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui berbagai macam program. Dari program-program yang ada, yang pendekatannya relatif berbeda adalah dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan kebutuhan nyata mereka dan memutuskan sendiri pilihan kegiatan secara demokrasi.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dirancang untuk mengembangkan lebih lanjut Inpres 5/1993 tentang program IDT. Pengembangan yang dimaksud selain untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan melalui bantuan modal usaha dan penyediaan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi, juga merupakan media pembelajaran bagi masyarakat dan aparat melalui kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan.

Dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan yang mendorong efektifitas fungsi kelembagaan di daerah serta menciptakan adanya *good governance*. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat sejahtera mandiri dalam kebersamaan.

Ada tiga alasan perlunya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilaksanakan :

1. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong.
2. Masyarakat bukan obyek, tetapi sebagai subyek pembangunan.
3. Aparat di kecamatan belum terlibat secara optimal dalam pembangunan.

Jumlah desa yang ditangani pada tahun anggaran 1998/1999 sebanyak 3.818 desa, yang terdapat di 501 Kecamatan, 105 Kabupaten dan 20 Propinsi. Alokasi dana sebesar Rp. 500 juta – 750 juta (kecuali Propinsi Timor Timur ada yang mendapat Rp. 250 juta jumlah penduduknya kurang dari 5.000 jiwa). Dana tersebut dialokasikan langsung ke masyarakat dan dikelola sendiri oleh mereka dalam wadah Unit Pengelola Keuangan (UPK). Sedangkang untuk tahun anggaran 1999/2000, Pemerintah meningkatkan jangkauan sasaran menjadi 8.716 desa, yang terdapat di 727 Kecamatan, 127 Kabupaten yang terdiri dari Kecamatan lama dan tambahan, yang tersebar di 19 Propinsi. Untuk tahun terakhir pada tahap I (TA 2001), kembali Pemerintah meningkatkan jangkauan sasaran menjadi 20.046 desa, yang terdapat di 970 Kecamatan, 126 Kabupaten yang tersebar di 20 Propinsi .Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel V.1
Jumlah Kecamatan Penerima Bantuan Dana
Program PPK Tahap I (tahun 1998/1999 s/d 2001)

No.	Tahun	Jumlah				
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi	Dana (dalam Milyard)
1.	1998/1999	3.818	501	105	20	3.818
2.	1999/2000	8.716	727	127	19	8.716
3.	2001	20.046	970	126	20	20.046
	Jumlah	32.580	2.198	358	59	32.580

Keterangan :

Pada tahun 1998/1999 termasuk Timor-timur

Pada tahun 2001, minus Propinsi Maluku dan ditambah dua Propinsi baru, yaitu Propinsi Banten dan Gorontalo.

Sumber :

Sekretariat Tim Koordinasi PPK Pusat, 2002.

B. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Program Pengembangan Kecamatan ini antara lain :

1. Penguatan kemampuan aparat birokrasi pembangunan di tingkat kecamatan ke bawah :
 - a. Proses perencanaan mulai dari tingkat dusun sampai dengan di tingkat kecamatan.

- b. Keterbukaan untuk tumbuh dan berkembangnya demokrasi yang sehat.
 - c. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, berjenjang dan menyangkut aspek-aspek : perkembangan fisik, realistik keuangan, peran serta masyarakat, kendala yang bersangkutan dan tindak lanjutnya.
 - d. Pengelolaan keuangan oleh masyarakat.
 - e. Evaluasi program untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembangunan.
2. Penguatan kelembagaan manajemen pembangunan :
 - a. Kegiatan usaha ekonomi produktif.
 - b. Pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
 3. Pemilihan jenis kegiatan dilakukan oleh masyarakat melalui musyawarah.
 4. Pelaksanaan di desa adalah Tim Pengelolaan (TP) yang dibentuk oleh masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes).
 5. Pelaksanaan pengelolaan dana PPK di kecamatan adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah pada forum UDKP.
 6. Masyarakat harus dapat mengetahui dengan mudah segala informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPK.
 7. Masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan PPK dengan memperhatikan kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki, serta tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

8. Semua kelompok masyarakat mempunyai posisi dan kesempatan yang sama dalam pengajuan usulan kegiatan. Usulan yang akan didanai oleh PPK ditetapkan dalam musyawarah atas dasar prioritas dan kualitas usulan.
9. Masyarakat berkesempatan memberikan kontribusi berupa tenaga, materi, dan pemikiran untuk setiap kegiatan yang diusulkan, baik dalam pelaksanaan maupun pelestarian.

C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

Tujuan umum adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi perdesaan.

Tujuan khususnya adalah : (1) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan, (2) meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat perdesaan, (3) menyediakan prasarana dan sarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan, (4) meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dan aparat di desa dan di kecamatan untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

D. Sasaran Kelompok dan Lokasi.

Sasaran utama penerima bantuan PPK adalah masyarakat perdesaan di lokasi PPK terutama kelompok penduduk miskin berdasarkan ketentuan masyarakat setempat melalui forum musyawarah desa dan/atau antar desa. Sedangkan sasaran lokasi penerima dana bantuan PPK adalah kecamatan miskin dengan prioritas yang dipilih berdasarkan criteria : (1) kecamatan yang mempunyai jumlah desa tertinggal relatif banyak, (2) kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk miskin relatif lebih banyak.

E. Prinsip Pengelolaan.

Dalam pengelolaan PPK digunakan prinsip-prinsip anatar lain : (1) semua kegiatan harus mudah diterima dan didayagunakan serta menggunakan sumber daya local, tata cara dan teknologi yang tepat guna, (2) semua kegiatan harus dikelola secara terbuka oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis maupun administrative, (3) semua kegiatan harus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih mampu mengelola kegiatan secara ekonomis, (4) semua kegiatan harus dilaksanakan, dimanfaatkan, dipelihara, dan dikembangkan oleh masyarakat sehingga berkelanjutan, dan (5) semua dana yang didapat dari pengembalian dan pemupukan modal, digulirkan secara mudah kepada kelompok masyarakat yang lebih luas melalui musyawarah.

F. Pendekatan.

Pendekatan yang dilakukan dengan cara yaitu : (1) pemihakan kepada penduduk miskin, (2) pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan yang dibutuhkan, (3) pemberian akses informasi kepada setiap penduduk desa tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan mengenai peluang, kebebasan memilih dan memutuskan hingga pelaksanaan kegiatan termasuk keuangannya, (4) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian pembangunan, (5) kompetisi yang sehat dalam pengajuan usulan kegiatan, dan (6) swadaya masyarakat dalam pelaksanaan PPK dan pelestariannya.

G. Pengorganisasian.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan PPK dibentuk tim koordinasi sebagai tim pembina di berbagai tingkatan yaitu :

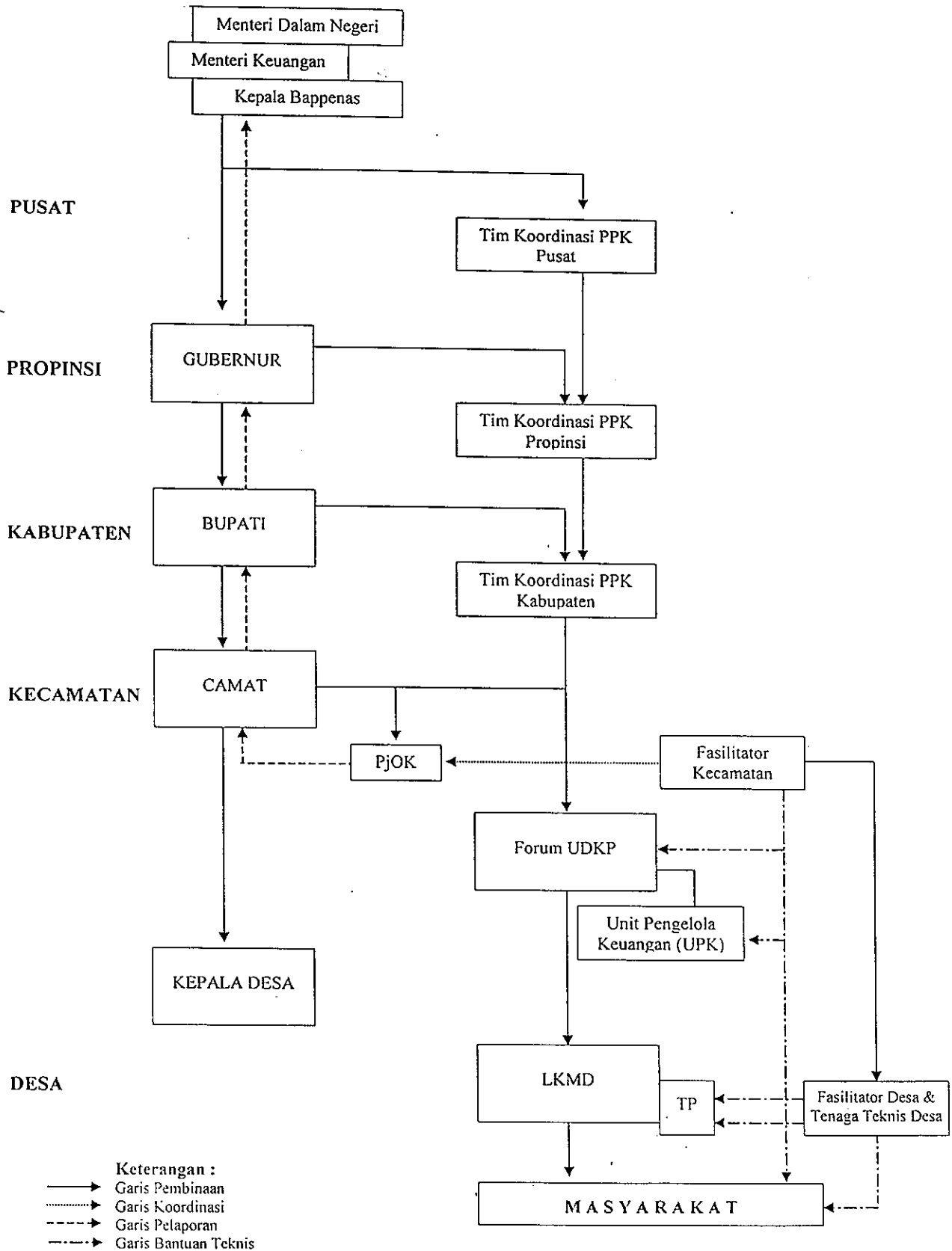
1. Di Pusat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsure-unsur Bappenas selaku Ketua Tim Koordinasi, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen/Lembaga lain yang terkait.
2. Di Propinsi dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Gubernur dan terdiri dari unsure : Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi, Kantor PMD, Biro Penyusunan Program dan Biro Keuangan Sekretariat Wilayah, dan Dinas/Instansi lain yang terkait.

3. Di Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Bupati dan terdiri dari unsur : Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi, Kantor PMD, Bagian Penyusunan Program dan Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah, KPKN dan Dinas/Instansi lain yang terkait.

Dalam rangka pelaksanaan PPK di Kecamatan dan Desa, dibentuk tim pelaksana :

1. Di Kecamatan ditunjuk Kepala Seksi PMD sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) dan staf Kecamatan lainnya sebagai Bendaharawan/penanggung jawab Administrasi Keuangan (PjAK) yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Camat.
2. Di Kecamatan dibentuk Unit Pengelola Keuangan (UPK) dengan struktur yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih dari usulan masing-masing desa melalui forum UDKP dan ditetapkan oleh Camat.
3. Di desa dibentuk Tim Pelaksanaan dengan struktur yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih dari unsur masyarakat melalui forum Musbangdes dan ditetapkan oleh Kepala Desa. Jika di desa telah ada organisasi masyarakat yang dapat melaksanakan pengelolaan kegiatan, maka perlu dibentuk baru.

Gambar 5
Bagan Struktur Organisasi



H. Pendanaan.

Sumber pendanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah :

1. Sumber dana PPK berasal dari Pemerintah (Rupiah Murni APBN, Pinjaman Luar Negeri, APBN) dan masyarakat (swasta dan swadaya masyarakat).
2. Bappenas dan Departemen Keuangan menerbitkan Daftar Alokasi Dana Pembangunan Daerah (DADPD) yang berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
3. Dalam rangka pembinaan PPK, dialokasikan dana Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP).
4. Alokasi dana Program PPK yang bersumber dari Pemerintah ditetapkan antara Rp. 250 juta sampai dengan Rp. 750 juta per Kecamatan berdasarkan jumlah penduduk.

Alokasi dana didasarkan jumlah penduduk per Kecamatan, serta lokasi Kecamatan, dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel V.2
Alokasi Dana Program PPK
Berdasarkan Jumlah Penduduk per Kecamatan

Lokasi Kecamatan	Jml Penduduk per Kec.	Alokasi Dana (Rp)
Jawa	> 50.000 jiwa	1 Milyar
	25.000 – 50.000 jiwa	750 juta
	< 25.000 jiwa	500 juta
Luar Jawa	> 25.000 jiwa	1 Milyar
	15.000 – 25.000 jiwa	750 juta
	< 15.000 jiwa	500 juta

Sumber :

Sekretariat Tim Koordinasi PPK Pusat, 2002.

I. Tenaga Bantuan Teknis.

Untuk membantu kegiatan pengelolaan pelaksanaan PPK, maka ditempatkan tenaga bantuan teknis diberbagai tingkatan yaitu :

1. Konsultan Manajemen Pusat (KM-Pusat) dengan tugas mendampingi Tim Koordinasi PPK Pusat.
2. Konsultas Manajemen Propinsi (KM-Prop) dengan tugas mendampingi Tim Koordinasi PPK Propinsi.

3. Konsultasi Manajemen Kabupaten (KM-Kab) dengan tugas mendampingi Tim Koordinasi PPK Kabupaten.
4. Fasilitator Kecamatan (FK) dengan tugas mendampingi Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) dan masyarakat.
5. Fasilitator Desa (FD) dengan tugas mendampingi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan masyarakat selama periode perencanaan.
6. Tenaga Teknis Desa (TTD) dengan tugas membantu kelompok masyarakat (Pokmas) dalam penulisan usulan kegiatan.

Pada periode pelaksanaan, TPK dapat mempekerjakan tenaga bantuan teknis, yaitu :

1. Fasilitator Desa (FD) dengan tugas membantu TP dalam mendampingi Pokmas Khususnya dalam hal pembinaan kelembagaan.
2. Tenaga Teknis Desa (TTD) dengan tugas membantu Pokmas dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Jumlah Konsultan dari sejak tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2001, sebagaimana pada tabel 3 berikut ini :

Tabel V.3
Jumlah Konsultan
Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
Dari Tahun 1998/1999 s/d 2001

Posisi	Tahun 1998/1999	Tahun 1999/2000	Tahun 2001
Fasilitator Desa (FD)	10.040	21.810	29.100
Fasilitator Kecamatan (FK)	470	959	1.353
Asisten FK	0	0	1.940
KM-Kabupaten	96	163	214
KM-Propinsi	19	21	21

Keterangan :

KM : Konsultan Manajemen.

Sumber :

Sekretariat Tim Koordinasi PPK Pusat, 2002.

J. Pelaporan.

Tujuan dari pelaporan adalah pengendalian dari tingkat masyarakat sampai dengan tingkat pusat. Laporan pelaksanaan bantuan PPK dilaksanakan secara berkala melalui jalur Struktural dan Fungsional. Cakupan laporan terdiri dari 3 tahapan yaitu :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan, yaitu :
 - a. Proses perencanaan dan hasil;

- b. Perencanaan kegiatan;
 - c. Proses perencanaan teknis dan hasilnya.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan, yaitu :
- a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya;
 - c. Hasil akhir pelaksanaan.
3. Tahap Pelestarian Bantuan, yaitu :
- a. Pemeliharaan dan pengembangan prasarana dan sarana;
 - b. Pelestarian modal usaha.

K. Pengawasan.

Pengawasan melekat dilakukan secara periodik terhadap tugas aparat kecamatan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, serta administrasi penyaluran dana kepada masyarakat desa. Pelaksana kegiatan pengawasan khususnya ditingkat kecamatan adalah Itwilkab sedangkan pelaksanaan di tingkat desa dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Tata cara pengawasan :

1. Semua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari instansi fungsional ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengawasan oleh masyarakat dimungkinkan karena sifat keterbukaan yang menjadi bagian integral dalam Program Pengembangan Kecamatan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh aparat melalui jalur structural secara berjenjang. Konsultan melalui jalur fungsional dan oleh masyarakat sendiri. Sanksi dapat dikenakan pada aparat dan konsultan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan LKMD/TP adalah penundaan hingga pemberhentian bantuan.

L. Evaluasi.

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi PPK Tingkat Pusat bersama Daerah, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Pemantauan dan Pengendalian tahapan pelaksanaan kegiatan.
2. Pemantauan dan Pengendalian mutu hasil kegiatan.
3. Pemantauan dan Pengendalian peran serta masyarakat.
4. Perumusan masalah dan rekomendasi pemecahan dari pelaksanaan kegiatan.

M. Studi Dampak.

Studi dampak dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pusat bersama daerah. Tujuan studi dampak adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang diharapkan dari kegiatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan data tentang keadaan pra dan pasca kegiatan.

BAB VI
ANALISIS IMPLEMENTASI
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)

A. ANALISIS TABEL TUNGGAL

1. Variabel Isi Kebijakan.

Tabel VI.1

Pendapat tentang kebijakan program PPK dalam bentuk modal produksi

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang memadai	32	29.9
2	Cukup memadai	43	40.2
3	Memadai	17	15.9
4	Sangat memadai	15	14.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 1

Tabel diatas menunjukkan bahwa kebijakan program PPK dalam bentuk modal produksi dapat dikatakan cukup memadai karena 43(40,2%) responden menjawabnya. Sedangkan responden lain ada yang mengatakan memadai yaitu sebesar 17 (15,9%), sangat memadai sebesar 15 (14,0%) dan bahkan ada pula yang mengatakan kurang memadai yang sebesar 32(29,9%).

Tabel VI.2

Pendapat tentang kebijakan program PPK dalam bentuk peralatan produksi

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang memadai	53	49.5
2	Cukup memadai	29	27.1
3	Memadai	14	13.1
4	Sangat memadai	11	10.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 2

Kebijakan program PKK dalam bentuk peralatan produksi dari hasil penelitian dapat dikatakan kurang memadai yaitu sebesar 53 (49,5%) responden menjawabnya. Meskipun demikian ada juga yang mengatakan 29 (27,1%) cukup memadai, 14(13,1%) memadai dan sebesar 11(10,3%) sangat memadai.

Tabel VI.3

Pendapat tentang kebijakan PPK dalam bentuk uang

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang memadai	22	20.6
2	Cukup memadai	40	37.4
3	Memadai	20	18.7
4	Sangat memadai	25	23.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 3

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapat kebijakan PPK dalam bentuk uang dapat dikatakan memadai yaitu 40 (37,4%) responden menjawabnya. Sedangkan 22 (20,6 %) responden mengatakan kurang memadai, sebesar 20(18,7%) responden mengatakan memadai, dan sebesar 25 (23,4%) responden mengatakan sangat memadai.

Tabel VI.4

Pendapat tentang kebijakan program PPK dalam bentuk peraturan-peraturan khususnya tentang kejelasan petunjuk pelaksanaan

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang jelas	0	0.0
2	Cukup jelas	54	50.5
3	Jelas	33	30.8
4	Sangat jelas	20	18.7
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 4

Kebijakan program PPK dalam bentuk peraturan-peraturan khususnya tentang kejelasan petunjuk pelaksanaan ternyata hasil penelitian di Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat dapat dikatakan cukup jelas yaitu sebesar 54(50,5%) responden menjawabnya. Dan yang mengatakan jelas hanya 33(30,8%), sedang yang mengatakan sangat jelas hanya sebesar 18,7%.

Tabel VI.5
Pendapat tentang kebijakan program PPK dalam bentuk peraturan-peraturan khususnya tentang kejelasan petunjuk teknis

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang jelas	4	3.7
2	Cukup jelas	56	52.3
3	Jelas	33	30.8
4	Sangat jelas	14	13.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 5

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Cirebon ternyata kebijakan program PPK dalam bentuk peraturan-peraturan khususnya tentang kejelasan petunjuk teknis dapat dikatakan cukup jelas karena prosentase terbesar jawaban responden yaitu sebesar 56(52,3%) responden mengatakannya, sedangkan yang mengatakan jelas hanya 33 (30,8%) serta yang mengatakan sangat jelas ada 14 (13,1%), dan ada juga yang mengatakan kurang jelas yaitu sebesar 4(3,7%).

Tabel VI. 6
Pendapat tentang kebijakan program PPK dalam bentuk peraturan-peraturan
khususnya tentang proses penyampaian bantuan dana

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang baik	0	0.0
2	Cukup baik	53	49.5
3	Baik	31	29.0
4	Sangat baik	23	21.5
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 6

Hasil penelitian tentang kebijakan program PPK dalam bentuk peraturan-peraturan khususnya tentang proses penyampaian bantuan dana prosentase terbesar yaitu 53(49,5%) responden mengatakan cukup baik, dan ada 31(29,0%) baik, sebesar 23 (21,5%) sangat baik, dan tidak ada yang mengatakan kurang baik.

Tabel VI.7
Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan
tentang kriteria penerima bantuan dana

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang baik	3	2.8
2	Cukup baik	49	45.8
3	Baik	41	38.3
4	Sangat baik	14	13.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 7

Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan tentang kriteria penerima bantuan dana dari hasil penelitian dikatakan responden cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 49(45,8%) mengatakan cukup baik, sedangkan sebesar 41(38,3%) mengatakan baik, sebesar 14(13,1%) mengatakan sangat baik dan ada sebesar 3(2,8%) mengatakan kurang baik.

Tabel VI.8
Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan
tentang sanksi bagi penerima bantuan dana

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang berat	58	54.2
2	Cukup berat	31	29.0
3	Berat	13	12.1
4	Sangat berat	5	4.7
	Total		

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 8

Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan tentang sanksi bagi penerima bantuan dana berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan masih kurang berat hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban responden yang terbesar yaitu sebesar 58(54,2%) responden mengatakan bahwa sanksi yang dikenakan pada penerima bantuan dana yang berbuat kesalahan atau melanggar peraturan-peraturan yang berlaku masih dirasa kurang berat. Meskipun demikian ada juga sebagian atau 31(29,0%) responden yang mengatakan bahwa sanksi yang dikenakan bagi penerima bantuan cukup berat, ada sebesar 13 (12,1%) mengatakan berat dan ada sebesar 5 (4,7%) responden yang mengatakan sanksi tersebut sangat berat.

Tabel VI.9
Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan
tentang petunjuk terhadap pendampingan bagi fasilitator

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang jelas	3	2.8
2	Cukup jelas	55	51.4
3	Jelas	36	33.6
4	Sangat jelas	13	12.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 9

Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan tentang petunjuk terhadap pendampingan bagi fasilitator menurut responden dapat dikatakan cukup jelas hal ini dibuktikan dengan jawaban responden terbesar yaitu 55(51,4%) responden mengatakan cukup jelas, sebesar 36 (33,6%) responden mengatakan jelas, sebesar 13 (12,1%) responden mengatakan sangat jelas, dan ada 3(2,8%) responden mengatakan kurang jelas.

Tabel VI. 10

Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan tentang petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan bagi pelaksana program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang jelas	3	2.8
2	Cukup jelas	52	48.6
3	Jelas	29	27.1
4	Sangat jelas	23	21.5
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 10

Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan tentang petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan bagi pelaksana program berdasarkan hasil penelitian dikatakan cukup jelas. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas bahwa prosentase terbesar yaitu 52(48,8%) responden mengatakan bahwa petunjuk tersebut cukup jelas, ada sebesar 29(27,1%) yang mengatakan jelas, ada sebesar 23(21,5%) yang mengatakan sangat jelas dan ada juga sebesar 3 (2,8%) yang mengatakan kurang jelas.

Tabel VI.11
Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan
tentang petunjuk terhadap pengembangan usaha

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang jelas	13	12.1
2	Cukup jelas	45	42.1
3	Jelas	38	35.5
4	Sangat jelas	11	10.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 11

Kebijakan PPK dalam bentuk peraturan-peraturan tentang petunjuk terhadap pengembangan usaha menurut responden berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Cirebon adalah dapat dikatakan cukup jelas. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel diatas dimana prosentase terbesar yaitu sebesar 45(42,1%) responden mengatakan cukup jelas, sebesar 38(35,5%) responden mengatakan jelas, sebesar 11(10,3%) responden mengatakan sangat jelas dan ada sebesar 13(12,1%) responden yang mengatakan kurang jelas.

Tabel VI.12
Kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh kelompok sasaran,
khususnya mengenai kesesuaian pemahaman kelompok sasaran dengan isi kebijakan

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang jelas	14	13.1
2	Cukup jelas	53	49.5
3	Jelas	29	27.1
4	Sangat jelas	11	10.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 12

Kejelasan maksud kebijakan tentang kesesuaian pemahaman kelompok sasaran tentang isi kebijakan berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan cukup jelas. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan

ternyata prosentase terbesar yaitu 53(49,5%) responden mengatakan cukup jelas, sebesar 29(27,1%) mengatakan baik, sebesar 11(10,3%) responden mengatakan sangat jelas, dan ada sebagian kecil responden yang mengatakan kurang jelas yaitu sebesar 14(13,1%).

Tabel VI.13
Kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh kelompok sasaran,
khususnya mengenai tingkat pemahaman kelompok sasaran dengan isi kebijakan

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	25	23.4
2	Cukup tinggi	60	56.1
3	Tinggi	15	14.0
4	Sangat tinggi	7	6.5
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 13

Kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh kelompok sasaran, khususnya mengenai tingkat pemahaman kelompok sasaran dengan isi kebijakan berdasarkan hasil penelitian pada Kecamatan Cirebon diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden yaitu 60(56,1%) responden mengatakan pemahamannya tersebut cukup tinggi, dan ada sebesar 15 (14,0%) responden mengatakan pemahamannya tersebut tinggi , dan ada sebesar 7(6,5%) responden bahwa pemahamannya adalah sangat tinggi, tetapi ada sebagian lagi yaitu sebesar 25(23,4%) responden yang mengatakan bahwa pemahaman tentang isi kebijakan kurang tinggi. Hal ini mungkin disebabkan kurang sosialisasi tentang kebijakan tersebut, sehingga setiap anggota akan menafsirkan isi kebijakan tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota.

Tabel VI.14
Kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh pelaksana program,
khususnya mengenai kesesuaian pemahaman pelaksana dengan isi kebijakan

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang jelas	7	6.5
2	Cukup jelas	52	48.6
3	Jelas	35	32.7
4	Sangat jelas	13	12.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 14

Kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh kelompok sasaran, khususnya mengena kesesuaian pemahaman pelaksana dengan isi kebijakan dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa prosentase terbesar yaitu sebesar 52(48,6%) responden mengatakan cukup jelas. Tetapi selain hal tersebut ada sebagian responden atau sebesar 35(32,7%) responden mengatakan jelas, dan ada sebesar 13(12,1%) responden mengatakan sangat jelas, dan ada sebagian kecil responden yaitu 7(6,5%) responden mengatakan kurang jelas.

Tabel VI.15

Kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh pelaksana program, khususnya mengenai tingkat pemahaman pelaksana dengan isi kebijakan

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	7	6.5
2	Cukup tinggi	57	53.3
3	Tinggi	31	29.0
4	Sangat tinggi	12	11.2
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 15

Apabila dilihat pada tabel diatas maka tingkat pemahaman pelaksana terhadap isi kebijakan hanya dapat dikatakan cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah responden yang menjawab cukup tinggi sebesar 57(53,5%), tetapi selain itu ada juga

yang mengatakan tinggi yaitu sebesar 31(29%), ada juga yang mengatakan sangat tinggi yaitu sebesar 12(11,2% dan ada juga yang mengatakan kurang tinggi yaitu sebesar 7(6,5%).

Tabel VI.16

Penilaian terhadap kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh pelaksana program , khususnya mengenai penguasaan materi program fasilitator

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang jelas	10	9.3
2	Cukup jelas	38	35.5
3	Jelas	46	43.0
4	Sangat jelas	13	12.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 16

Penilaian terhadap kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh pelaksana program , khususnya mengenai penguasaan materi program fasilitator berdasarkan hasil penelitian pada Kabupaten Cirebon tentang PPK dapat dikatakan baik karena prosentase terbesar responden mengatakan jelas atau 46(43%), tetapi ada juga sebesar 38(35.5%) responden mengatakan cukup jelas, ada sebesar 13 (12,1%) yang mengatakan sangat jelas, tetapi ada sebagian kecil yaitu sebesar 10(8,3%) yang mengatakan kurang jelas.

Tabel VI.17

Penilaian terhadap kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh pelaksana program , khususnya tentang pemahaman sasaran akhir dari fasilitator

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang jelas	12	11.2
2	Cukup jelas	41	38.3
3	Jelas	39	36.4
4	Sangat jelas	15	14.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 17

Penilaian terhadap kejelasan maksud dan tujuan kebijakan oleh pelaksana program , khususnya tentang pemahaman sasaran akhir dari fasilitator berdasarkan hasil lapangan dapat dikatakan cukup jelas hal ini dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 41(38,3%) responden mengatakan cukup jelas. Selain itu ada sebesar 39(36,4%) responden mengatakan jelas dan ada sebesar 15(14,0%) responden mengatakan sangat jelas, dan ada juga yang mengatakan kurang jelas yang merupakan prosentase terendah yaitu sebesar 12(11,2%).

Tabel VI.18
Kejelasan tata cara penerimaan bantuan dana oleh kelompok sasaran, khususnya mengenai syarat penerimaan bantuan dana

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang jelas	5	4.7
2	Cukup jelas	35	32.7
3	Jelas	37	34.6
4	Sangat jelas	30	28.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 18

Kejelasan tata cara penerimaan bantuan dana oleh kelompok sasaran, khususnya mengenai syarat penerimaan bantuan dana dapat dikatakan jelas. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas bahwa sebesar 37(28%) , selain itu ada juga responden yang mengatakan cukup jelas yaitu sebesar 35(32,7%) , dan yang mengatakan sangat jelas yaitu sebesar 30(28,0%) dan yang mengatakan tidak jelas hanya 5(4,7%).

Tabel VI.19
Kejelasan tata cara penerimaan bantuan dana oleh kelompok sasaran, khususnya mengenai prosedur pengajuan bantuan dana

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang jelas	5	4.7
2	Cukup jelas	32	29.9
3	Jelas	31	29.0
4	Sangat jelas	39	36.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 19

Kejelasan tata cara penerimaan bantuan dana oleh kelompok sasaran, khususnya mengenai prosedur pengajuan bantuan dana berdasarkan hasil lapangan dapat dikatakan sangat jelas hal ini dibuktikan dengan jawaban responden paling besar adalah sebesar 39(36,4%) mengatakan prosedur pengajuan bantuan dana sangat jelas. Sebesar 31(29%) responden mengatakan jelas, sebesar 32(29,9%) responden mengatakan cukup jelas dan sebesar 5(4,7%) responden mengatakan kurang jelas.

Tabel VI.20
Kejelasan tata cara penerimaan bantuan dana oleh kelompok sasaran, khususnya mengenai jangka waktu penyampaian bantuan sejak pengajuan dana

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang jelas	6	5.6
2	Cukup jelas	37	34.6
3	Jelas	36	33.6
4	Sangat jelas	28	26.2
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 20

Kejelasan tata cara penerimaan bantuan dana oleh kelompok sasaran, khususnya mengenai jangka waktu penyampaian bantuan sejak pengajuan dana berdasarkan hasil dilapangan yang diteliti pada kabupaten Cirebon diperoleh hasil cukup jelas. Hal ini dapat dilihat bahwa sebesar 37(34,6%) responden mengatakan cukup jelas, sebesar

36(33,6%) responden mengatakan jelas, sebesar 28(26,2%) responden mengatakan sangat jelas dan sebesar 6(5,6%) mengatakan kurang jelas.

Tabel VI.21
Kejelasan peraturan penggunaan bantuan dana oleh kelompok sasaran ,
khususnya mengenai kesesuaian pemahaman kelompok sasaran
dengan peraturan penggunaan bantuan dana

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang jelas	7	6.5
2	Cukup jelas	45	42.1
3	Jelas	31	29.0
4	Sangat jelas	24	22.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 21

Kejelasan peraturan penggunaan bantuan dana oleh kelompok sasaran , khususnya mengenai kesesuaian pemahaman kelompok sasaran dengan peraturan penggunaan bantuan dana yang ada pada kabupaten Cirebon dapat dikatakan cukup jelas. Bukti cukup jelas tersebut dapat dilihat pada tabel diatas yang mengatakan kesesuaian pemahaman kelompok sasaran dengan peraturan penggunaan bantuan dana sebesar 45(42,1%) responden mengatakan cukup jelas, sebesar 31(29%) responden mengatakan jelas, sebesar 24(22,4%) responden mengatakan sangat jelas dan sebesar 7(6,5%) responden mengatakan kurang jelas.

Tabel VI.22

Kejelasan peraturan penggunaan bantuan dana oleh kelompok sasaran , khususnya tingkat pemahaman kelompok sasaran dengan peraturan penggunaan bantuan dana

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	17	15.9
2	Cukup tinggi	49	45.8
3	Tinggi	32	29.9
4	Sangat tinggi	9	8.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 22

Tingkat pemahaman kelompok sasaran dengan peraturan penggunaan bantuan dana dapat dikatakan cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden terbesar yaitu 49(45,8%) responden mengatakan cukup tinggi, dan ada sebesar 32 (29,9%) responden mengatakan tinggi, serta ada sebesar 9(8,4%) yang mengatakan tingkat pemahaman mereka sangat tinggi, tetapi ada 17(15,9%) responden yang mengatakan tingkat pemahaman kelompok sasaran terhadap peraturan penggunaan dana kurang tinggi yaitu sebesar 14(15,9%).

Tabel VI.23

Pendapat terhadap output yang diharapkan dari pembuat kebijakan oleh pelaksana program, khususnya tentang pemahaman output program dari fasilitator.

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang paham	10	9.3
2	Cukup paham	42	39.3
3	Paham	47	43.9
4	Sangat paham	8	7.5
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 23

Pendapat terhadap output yang diharapkan dari pembuat kebijakan oleh pelaksana program, khususnya tentang pemahaman output program dari fasilitator berdasarkan

hasil dilapangan adalah dapat dikatakan paham. Pelaksana program sebagian besar paham tentang output program yang dihasilkan fasilitator. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas yaitu sebesar 47(43,9%) responden mengatakan paham, dan sebesar 42(39,3%) responden mengatakan cukup paham, sebesar 8(7,5%) mengatakan sangat paham dan ada sebesar 10(9,3%) pelaksana yang kurang paham. Hal ini mungkin disebabkan karena tingkat pendidikan mereka yang masih rendah .

Tabel VI.24

Pendapat terhadap output yang diharapkan dari pembuat kebijakan oleh pelaksana program, khususnya tentang pemahaman output program dari Camat.

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang paham	13	12.1
2	Cukup paham	42	39.3
3	Paham	39	36.4
4	Sangat paham	13	12.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 24

Pendapat terhadap output yang diharapkan dari pembuat kebijakan oleh pelaksana program, khususnya tentang pemahaman output program dari Camat dapat dikatakan cukup paham hal ini terbukti hasil lapangan mengatakan bahwa 42(39,3%) responden mengatakan cukup paham, sebesar 39(36,4%) responden mengatakan paham, sebesar 13(12,1%) responden mengatakan sangat paham dan ada sebesar 13 (12,1%) responden mengatakan kurang paham.

Tabel VI.25

Pendapat terhadap output yang diharapkan dari pembuat kebijakan oleh pelaksana program, khususnya tentang pemahaman output program dari Kelurahan /LKMD

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang paham	9	8.4
2	Cukup paham	48	44.9
3	Paham	33	30.8
4	Sangat paham	17	15.9
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 25

Pendapat terhadap output yang diharapkan dari pembuat kebijakan oleh pelaksana program, khususnya tentang pemahaman output program dari Kelurahan /LKMD berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan cukup paham , hal ini terbukti 48(44,9%) responden mengatakan cukup paham dengan output program dari kelurahan atau LKMD. Meskipun demikian ada juga responden yang masih kurang paham yaitu sebesar 9(8,4%), sedang yang lain telah paham sebesar 33(30,8%) serta ada yang sangat paham yaitu sebesar 17(15,9%).

2. Variabel Kemampuan Pelaksana

Tabel VI.26

Syarat minimal pendidikan formal yang harus dimiliki oleh pelaksana program PPK

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	SD	1	.9
2	SLTP	21	19.6
3	SLTA	66	61.7
4	Perguruan Tinggi	19	17.8
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 26

Sebagai pelaksana program PPK seharusnya memiliki pendidikan yang cukup untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut pendapat responden supaya tugas dapat terlaksana dengan baik maka syarat minimal pendidikan yang harus dimiliki pelaksana tersebut adalah SLTA yaitu sebesar 66(61,2%) responden menjawabnya. Ada juga yang berpendapat bahwa pendidikan minimal yang harus dimiliki pelaksana program PPK adalah Perguruan tinggi yaitu sebesar 19(17,8%) responden menjawabnya, dan ada juga yang mengatakan SLTP yaitu sebesar 21(19,6%) responden mengatakan, dan ada 1 (0,9%) responden yang mengatakan boleh hanya SD saja.

Tabel VI.27
Pendapat mengenai standart minimal pendidikan non formal yang dimiliki oleh pelaksana program PPK, khususnya tentang pelatihan umum

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang penting	2	1.9
2	Cukup penting	13	12.1
3	Penting	22	20.6
4	Sangat penting	70	65.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 27

Standart minimal pendidikan non formal yang dimiliki oleh pelaksana program PPK, khususnya tentang pelatihan umum menurut pendapat responden adalah sangat penting, hal ini terbukti 70(65,4%) responden mengatakan demikian, ada sebesar 22(20,6 %) responden mengatakan penting, sebesar 13(12,1%) responden mengatakan cukup penting dan ada sebesar 2 (1,9%) mengatakan kurang penting.

Tabel VI.28
Pendapat mengenai standart minimal pendidikan non formal yang dimiliki oleh pelaksana program PPK, khususnya tentang pelatihan tentang program PPK

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang penting	16	15.0
2	Cukup penting	28	26.2
3	Penting	63	58.9
4	Sangat penting	0	0.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 28

Pendidikan non formal seperti pelatihan tentang program PPK dikatakan penting , hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 63(58,9%) responden mengatakannya, sebesar 28(26,2%) responden mengatakan cukup penting , dan ada sebesar 16 (15,0%) responden mengatakan kurang penting.

Tabel VI.29
Pendapat mengenai standart minimal pendidikan non formal yang dimiliki oleh pelaksana program PPK, khususnya mengenai pengalaman sebagai pelaksana

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang penting	4	3.7
2	Cukup penting	22	20.6
3	Penting	40	37.4
4	Sangat penting	41	38.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 29

Pendapat mengenai standart minimal pendidikan non formal yang dimiliki oleh pelaksana program PPK, khususnya mengenai pengalaman sebagai pelaksana berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan sangat penting hal ini terbukti sebesar 41(38,3%) responden menjawabnya, sebesar 40(37,4%) responden mengatakan pengalaman sebagai pelaksana adalah penting, ada sebesar 22(20,8%) responden

mengatakan pengalaman tersebut cukup penting dan sebesar 4(3,7%) mengatakan pengalaman tersebut kurang penting.

Tabel VI.30
Pemahaman yang dimiliki oleh pelaksana
berkaitan dengan isi kebijakan

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang paham	4	3.7
2	Cukup paham	43	40.2
3	Paham	41	38.3
4	Sangat paham	19	17.8
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 30

Pemahaman yang dimiliki oleh pelaksana berkaitan dengan isi kebijakan sangat penting untuk lancarnya pekerjaan yang dilakukan pelaksana, berdasarkan hasil penelitian ternyata pelaksana telah cukup paham dengan isi kebijakan yaitu sebesar 43(40,2%) responden menjawabnya, sebesar 41(38,3%) responden mengatakan pelaksana perlu telah paham dengan isi kebijakan, sebesar 19(17,8%) pelaksana sangat paham dengan isi kebijakan dan sebesar 4(3,7%) responden bahwa pelaksana kurang paham dengan isi kebijakan.

Tabel VI.31
Pemahaman yang dimiliki oleh pelaksana program
berkaitan dengan sosialisasi program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang paham	5	4.7
2	Cukup paham	45	42.1
3	Paham	37	34.6
4	Sangat paham	20	18.7
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 31

Pemahaman yang dimiliki oleh pelaksana program berkaitan dengan sosialisasi program sangat penting, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase terbesar responden mengatakan bahwa pelaksana program cukup paham tentang sosialisasi program, sedangkan sebesar 37(34,6%) responden mengatakan paham, sebesar 20(18,7%) responden mengatakan sangat paham dan sebesar 5(4,7%) mengatakan kurang paham.

Tabel VI.32
Ketrampilan yang dimiliki pelaksana dalam pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang terampil	7	6.5
2	Cukup terampil	46	43.0
3	Terampil	40	37.4
4	Sangat terampil	14	13.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 32

Ketrampilan yang dimiliki pelaksana dalam pelaksanaan program sangat penting, berdasarkan hasil penelitian ternyata di Kab. Cirebon pelaksana program PPK sudah dapat dikatakan baik, karena sebesar 46(43%) responden mengatakan cukup baik, sedangkan sebesar 40(37,4%) responden mengatakan ketrampilan pelaksana terampil, sebesar 14(13,1%) mengatakan sangat terampil, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pelaksana program kurang terampil yaitu sebesar 7(6,5%).

Tabel VI.33
Kecakapan yang dimiliki pelaksana dalam menjalankan tugas

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang cakap	4	3.7
2	Cukup cakap	52	48.6
3	Cakap	42	39.3
4	Sangat cakap	9	8.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 33

Kecakapan pelaksana Program dimaksudkan cakap dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Berdasarkan hasil lapangan kecakapan petugas sudah dapat dikatakan cukup cakap atau sebesar 52(48,6%) responden mengatakannya, sebesar 42 (39,3%) responden mengatakan pelaksana program telah cakap dalam menjalankan tugas, sebesar 9(8,4%) responden mengatakan sangat cakap dan ada juga yang mengatakan bahwa petugas pelaksana program kurang cakap atau sebesar 4(3,7%) responden mengatakannya.

Tabel VI.34
Ketelitian yang dimiliki pelaksana dalam menjalankan tugas

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang teliti	7	6.5
2	Cukup teliti	49	45.8
3	Teliti	36	33.6
4	Sangat teliti	15	14.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 34

Ketelitian akan menyebabkan tugas yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. Hasil penelitian tentang ketelitian pelaksana program dalam menjalankan tugasnya adalah sebesar 49(45,8%) responden mengatakan cukup teliti, sebesar 36(33,5%) responden mengatakan teliti, sebesar 15(14,0%) responden mengatakan sangat teliti, dan

ada sebesar 7(6,5%) responden yang mengatakan bahwa petugas pelaksana program masih kurang teliti, masih sering membuat kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

Tabel VI.35
Keseriusan yang dimiliki pelaksana dalam menjalankan tugas

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang serius	3	2.8
2	Cukup serius	39	36.4
3	Serius	40	37.4
4	Sangat serius	25	23.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 35

Keseriusan yang dimiliki pelaksana dalam menjalankan tugas sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian ternyata 40(37,4%) responden mengatakan petugas serius dalam menjalankan tugasnya, sebesar 39(36.4%) responden cukup serius dalam menjalankan tugasnya, sebesar 25(23,4%) responden mengatakan sangat serius dalam menjalankan tugasnya dan ada sebesar 3(2,8%) responden yang mengatakan petugas pelaksana program PPK kurang serius dalam menjalankan tugasnya.

Tabel VI.36
Wawasan pelaksana terhadap seleksi penerima bantuan dana untuk kelompok sasaran

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	6	5.6
2	Cukup tinggi	44	41.1
3	Tinggi	39	36.4
4	Sangat tinggi	18	16.8
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 36

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kabupaten Cirebon tentang PPK ternyata wawasan pelaksana terhadap seleksi penerima bantuan dana untuk kelompok

sasaran dapat dikatakan cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 44(41,1%) responden menjawabnya, dan ada sebesar 39(36,4%) responden mengatakan wawasannya tinggi; sebesar 18(16,8%) responden mengatakan wawasan pelaksana sangat tinggi dan sebesar 6(5,6%) responden mengatakan wawasan pelaksana terhadap seleksi penerima bantuan dana untuk kelompok sasaran kurang tinggi.

Tabel VI.37
Wawasan pelaksana terhadap ketepatan bantuan dana
untuk kelompok sasaran berkaitan dengan kriteria penerima

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	8	7.5
2	Cukup tinggi	55	51.4
3	Tinggi	31	29.0
4	Sangat tinggi	13	12.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 37

Wawasan pelaksana terhadap ketepatan bantuan dana untuk kelompok sasaran berkaitan dengan kriteria penerima adalah sangat penting, ternyata hasil dilapangan sebesar 55 (51,4%) responden mengatakan wawasan pelaksana terhadap ketepatan bantuan dana untuk kelompok sasaran berkaitan dengan kriteria penerima cukup tinggi, dan sebesar 31(29%) responden mengatakan tinggi, sebesar 13(12,1%) responden mengatakan sangat tinggi dan sebesar 8(7,5%) responden mengatakn wawasan tersebut kurang tinggi.

Tabel VI.38
Wawasan pelaksana terhadap ketepatan bantuan dana
untuk kelompok sasaran dengan skala prioritas penerima

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	9	8.4
2	Cukup tinggi	48	44.9
3	Tinggi	27	25.2
4	Sangat tinggi	23	21.5
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 38

Skala prioritas sangat penting untuk mengetahui mana yang sebaiknya terlebih dahulu berhak mendapatkan dana. Berdasarkan hasil penelitian wawasan pelaksana tentang prioritas penerima dana tersebut ternyata prosentase terbesar adalah sebesar 48(44,8%0 responden menjawab cukup tinggi, sebesar 27(25,2%) responden mengatakan tinggi, sebesar 23(21,5%) responden mengatakan tinggi dan sebesar 9(8,4%) responden mengatakan wawasan pelaksana tersebut tentang prioritas penerima dana kurang tinggi.

Tabel VI.39
Wawasan pelaksana terhadap penyimpangan penggunaan dana untuk kelompok sasaran

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	23	21.5
2	Cukup tinggi	51	47.7
3	Tinggi	20	18.7
4	Sangat tinggi	13	12.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 39

Penyimpangan penggunaan dana PPK yang dilakukan oleh kelompok sasaran harus diketahui secara baik oleh pelaksana, sampai seberapa jauh pelaksana dapat mengetahui penyimpangan tersebut penting untuk lancarnya program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ternyata sebesar 51(47,7%) responden mengatakan bahwa wawasan terhadap

penyimpangan tersebut cukup tinggi, ada sebesar 20(18,7%) responden mengatakan bahwa wawasan tersebut tinggi, dan ada sebesar 13(12,7%) mengatakan wawasan pelaksana terhadap penyimpangan tersebut sangat tinggi. Dilain pihak ada responden yang mengatakan bahwa wawasan pelaksana terhadap penyimpangan dana yang dilakukan oleh kelompok sasaran kurang tinggi atau sebesar 23(21,5%).

Tabel VI.40
Wawasan pelaksana tentang pemecahan masalah dalam pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	14	13.1
2	Cukup tinggi	47	43.9
3	Tinggi	33	30.8
4	Sangat tinggi	13	12.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 40

Wawasan pelaksana tentang pemecahan masalah dalam pelaksanaan program berdasarkan hasil penelitian dikatakan cukup tinggi atau sebesar 47(43,9%) responden mengatakannya, sebesar 33(30,8%) responden mengatakan tinggi, sebesar 13(12,1%) responden mengatakan sangat tinggi, dan ada sebesar 14(13,1%) responden yang mengtakan wawasan pelaksana tentang pemecahan masalah dalam pelaksanaan program kurang tinggi.

Tabel VI.41
Kedisiplinan pelaksana dalam menjalankan tugas

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang disiplin	10	9.3
2	Cukup disiplin	42	39.3
3	Disiplin	36	33.6
4	Sangat disiplin	19	17.8
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 41

Kedisiplinan pelaksana dalam menjalankan tugas sangat penting untuk kelancaran tugas. Berdasarkan hasil lapangan ternyata prosentase terbesar responden mengatakan bahwa pelaksana telah cukup disiplin dalam menjalankan tugasnya yaitu sebesar 42(39,3%) responden menjawabnya, sebesar 36(33,6) responden mengatakan disiplin, sebesar 19 (17,8%) responden mengatakan sangat disiplin, dan sebesar 10(9,3%) responden mengatakan kurang disiplin.

Tabel VI.42
Kedisiplinan pelaksana dalam memantau(monitoring) pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang disiplin	10	9.3
2	Cukup disiplin	43	40.2
3	Disiplin	43	40.2
4	Sangat disiplin	11	10.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 42

Kedisiplinan adalah merupakan salah satu unsur untuk menunjang keberhasilan Implementasi. Kedisiplinan dalam monitoring adalah sangat penting guna berhasilnya implementasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Program Pengembangan Kecamatan pada Kabupaten Cirebon diperoleh hasil bahwa pelaksana sudah dapat dikatakan disiplin dalam memonitoring pelaksanaan program yang ini ditunjukkan dengan angka 43 (40,2%) responden yang mengatakan disiplin dan dengan jumlah prosentase yang sama pula mengatakan cukup disiplin, selain itu ada sebesar 11(10,3%) responden mengatakan sangat disiplin dan ada 10 (9,3%) responden mengatakan kurang disiplin.

Tabel VI.43
Kedisiplinan pelaksana dalam mengevaluasi pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang disiplin	9	8.4
2	Cukup disiplin	43	40.2
3	Disiplin	40	37.4
4	Sangat disiplin	15	14.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 43

Evaluasi merupakan hal yang penting untuk mengetahui berhasilnya atau tidaknya suatu program. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan dalam mengevaluasi program sudah dapat dikatakan cukup berhasil yang ditunjukkan dengan angka 43(40,2%) responden menjawabnya, sebesar 40(37,4%) respon mengatakan disiplin dan sebesar 15(14,0%) responden mengatakan sangat disiplin, dan ada sebesar 9(8,4%) responden yang mengatakan pelaksana kurang disiplin dalam mengevaluasi pelaksanaan program.

Tabel VI. 44
Kedisiplinan pelaksana dalam membuat laporan penilaian program,
khususnya tentang akurasi laporan pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang disiplin	10	9.3
2	Cukup disiplin	54	50.5
3	Disiplin	28	26.2
4	Sangat disiplin	15	14.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 44

Kedisiplinan pelaksana program dalam membuat penilaian program terutama tentang laporan akurasi pelaksanaan program akan menentukan baik tidaknya implementasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diperoleh hasil bahwa pelaksana cukup disiplin dalam membuat laporan penilaian program ,khususnya penilaian akurasi

pelaksanaan program, hal ini ditunjukkan dengan hasil jawaban responden sebesar 54(50,5%) responden menjawab cukup disiplin. Meskipun ada juga yang menjawab disiplin jumlahnya adalah sebesar 28(26,2%) dan ada juga yang mengatakan sangat disiplin jumlahnya adalah 15(14%), dan ada juga yang mengatakan kurang disiplin, jumlahnya adalah 10(9,3%).

Tabel VI.45
Kedisiplinan pelaksana dalam pembuatan laporan penilaian program,
khususnya tentang intensitas laporan pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang disiplin	7	6.5
2	Cukup disiplin	54	50.5
3	Disiplin	30	28.0
4	Sangat disiplin	16	15.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 45

Kedisiplinan pelaksana dalam pembuatan laporan penilaian program, khususnya tentang intensitas laporan pelaksanaan program , berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Cirebon diperoleh hasil cukup disiplin , hal ini dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 54(50,5%) responden menjawabnya. Ada juga yang mengatakan disiplin atau 30(28%0 responden menjawabnya, selain itu ada juga yang mengatakan sangat disiplin yaitu sebesar 16(15%) dan ada juga yang mengatakan kurang disiplin sebesar 7(6,5%).

Tabel VI.46
Kedisiplinan pelaksana dalam pembuatan laporan penilaian program,
khususnya tentang faktualitas laporan pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang disiplin	6	5.6
2	Cukup disiplin	56	52.3
3	Disiplin	36	33.6
4	Sangat disiplin	9	8.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 46

Kedisiplinan pelaksana dalam pembuatan laporan penilaian program, khususnya tentang faktualitas laporan pelaksanaan program, berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan cukup disiplin hal ini ditunjukkan dengan angka 56(52,3%) responden menjawabnya. Sedangkan responden yang mengatakan disiplin adalah 36(33,6%) responden menjawabnya, ada juga yang mengatakan sangat disiplin yaitu sebesar 9(8,4%) responden menjawabnya, dan ada juga yang mengatakan kurang disiplin jumlahnya 6 (5,6%) responden.

3. Variabel Lingkungan.

Tabel VI.47
Perhatian masyarakat penerima program terhadap pendidikan

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang perhatian	17	15.9
2	Cukup perhatian	38	35.5
3	Perhatian	26	24.3
4	Sangat perhatian	26	24.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 47

Pendidikan adalah penting untuk berhasilnya Implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat penerima program cukup perhatian terhadap pendidikan

yaitu sebesar 38(35,5%) responden menjawabnya. Sebesar 26(24,3%) responden mengatakan bahwa masyarakat penerima program perhatian terhadap pendidikan, dengan jumlah yang sama yaitu 26(24,3%) responden menjawab sangat perhatian. Dan ada sebesar 17(15,9%) responden yang mengatakan masyarakat penerima program kurang perhatian terhadap pendidikan.

Tabel VI.48
Sifat-sifat yang dimiliki masyarakat penerima
Program Pengembangan Kecamatan dalam menerima saran dan kritik

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang menerima	10	9.3
2	Cukup menerima	26	24.3
3	Menerima	41	38.3
4	Sangat menerima	30	28.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 48

Sifat-sifat yang dimiliki masyarakat penerima Program Pengembangan Kecamatan dalam menerima saran dan kritik, berdasarkan hasil penelitian pada Kabupaten Cirebon ternyata dapat menerima kritik dan saran yaitu sebesar 41(38,3%) responden menjawabnya, ada sebesar 30(28%) responden yang mengatakan sangat menerima apabila ada kritik dan saran, sebesar 26(24,3%) responden mengatakan cukup menerima saran dan kritik, dan ada sebagian kecil yang kurang menerima saran dan kritik yaitu sebesar 10(9,3%).

Tabel VI. 49
Penerimaan masyarakat penerima program terhadap pembangunan

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang menerima	3	2.8
2	Cukup menerima	9	8.4
3	Menerima	45	42.1
4	Sangat menerima	50	46.7
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 49

Pembangunan adalah pembaharuan yang terencana. Berdasarkan hasil penelitian ternyata prosentase terbesar sangat menerima pembangunan yaitu sebesar 50(46,7%) responden menjawabnya, ada sebesar 45(42,1%) responden yang mengatakan bahwa masyarakat penerima program dapat menerima pembangunan , dan ada sebesar 9(8,4%) yang hanya cukup menerima pembangunan , serta ada sebagian kecil atau 3(2,8%) responden yang mengatakan bahwa masyarakat penerima Program Pengembangan Kecamatan kurang menerima pembangunan.

Tabel VI.50
Perhatian penerima program terhadap peningkatan ekonomi

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang perhatian	6	5.6
2	Cukup perhatian	22	20.6
3	Perhatian	23	21.5
4	Sangat perhatian	56	52.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 50

Berdasarkan hasil penelitian ternyata masyarakat penerima Program sangat perhatian terhadap peningkatan ekonomi, hal ini dibuktikan dengan angka 56(52,3%) responden menjawabnya, ada juga yang mengatakan Perhatian sebesar 23(21,5%) , ada

juga yang mengatakan cukup perhatian sebesar 22(20,8%), dan ada juga yang mengatakan kurang perhatian sebesar 6(5,6%0).

Tabel VI.51
Sifat penerima program terhadap gotong royong

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang suka	3	2.8
2	Cukup suka	25	23.4
3	Suka	39	36.4
4	Sangat suka	40	37.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 51

Berdasarkan hasil penelitian ternyata penerima program dapat dikatakan sangat suka adanya gotong royong yaitu sebesar 40(37,4%) responden menjawabnya. Sebesar 39(36,4%) responden mengatakan masyarakat penerima program suka adanya gotong royong, dan ada sebesar 25(23,4%) responden kurang suka terhadap gotong-royong dan ada sebagian kecil responden yang mengatakan kurang suka berjumlah 3(2,8%) responden menjawabnya.

Tabel IV.52
Perilaku masyarakat penerima program
terhadap keterlibatan dalam kegiatan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang mendukung	4	3.7
2	Cukup mendukung	20	18.7
3	Mendukung	43	40.2
4	Sangat mendukung	40	37.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 52

Perilaku masyarakat penerima program terhadap keterlibatan dalam kegiatan program , berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil 43(40,2%) responden mengatakan

mendukung, sebesar 40(37,4%) responden mengatakan sangat mendukung, sebesar 20(18,7%) responden mengatakan cukup mendukung, dan 4(3,7%) mengatakan kurang mendukung.

Tabel VI.53
Perilaku masyarakat penerima program tentang penerimaannya terhadap kegiatan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang menerima	1	.9
2	Cukup menerima	17	15.9
3	Menerima	39	36.4
4	Sangat menerima	50	46.7
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 53

Perilaku masyarakat penerima program tentang penerimannya terhadap kegiatan program, berdasarkan hasil penelitian ternyata prosentase terbesar yaitu 50(46,7%) responden mengatakan sangat menerima, sebesar 39(36,4%) responden menerima, sebesar 17(15,9%) responden cukup menerima dan sebagian kecil 1(0,9%) responden mengatakan kurang menerima.

Tabel VI.54
Senang tidaknya masyarakat penerima program berperan serta pada kegiatan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang senang	2	1.9
2	Cukup senang	37	34.6
3	Senang	23	21.5
4	Sangat senang	45	42
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 54

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata 45(42%) responden mengatakan penerima program sangat senang berperan serta dalam kegiatan program.

Sebesar 23(21,6) mengatakan senang, sebesar 37(34,6%) responden mengatakan cukup senang, dan sebesar 2(1,9%) responden mengatakan kurang senang.

Tabel VI.55
Sikap masyarakat terhadap isi kebijakan
Program Pengembangan Kecamatan

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang setuju	4	3.7
2	Cukup setuju	37	34.6
3	Setuju	37	34.6
4	Sangat setuju	29	27.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 55

Apabila dilihat dari tabel diatas maka sikap masyarakat terhadap isi kebijakan dapat dikatakan setuju atau 37(34,6%) responden mengatakannya, sebesar 37(34,6%) responden mengatakan cukup setuju terhadap isi kebijakan. Sedangkan sebesar 29(27,1%) sangat setuju terhadap isi kebijakan, dan sebesar 4(3,7%) responden kurang setuju terhadap isi kebijakan.

Tabel VI.56
Kepercayaan terhadap keberhasilan pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang percaya	6	5.6
2	Cukup percaya	46	43.0
3	Percaya	41	38.3
4	Sangat percaya	14	13.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no.56

Apabila kita lihat pada tabel diatas maka masyarakat penerima program cukup percaya bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan akan berhasil terbukti 46(43,0%) responden menjawabnya. Selain itu ada sebesar 41(38,3%) responden

mengatakan percaya , sebesar 14(13,1%) sangat percaya dan sebesar 6(5,6%) responden mengatakan kurang percaya.

Tabel VI.57
Penerimaan masyarakat penerima program terhadap
keseluruhan isi kebijakan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang menerima	8	7.5
2	Cukup menerima	40	37.4
3	Menerima	49	45.8
4	Sangat menerima	10	9.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 57

Penerimaan masyarakat penerima program terhadap keseluruhan isi kebijakan program, berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan dapat menerima hal ini dibuktikan dengan prosentase terbesar responden yaitu sebesar 49(45,8%) responden menjawabnya. Ada juga sebesar 40(37,4%) responden mengatakan cukup menerima, sebesar 10(9,3%) responden mengatakan sangat menerima, dan ada sebagian kecil yaitu 8(7,5%) responden mengatakan bahwa penerima program kurang menerima keseluruhan isi kebijakan.

Tabel VI.58
Ada tidaknya kegiatan transaksi ekonomi

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Tidak ada	14	13.1
2	Cukup banyak	45	42.1
3	Banyak	36	33.6
4	Sangat banyak	12	11.2
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 58

Apabila dilihat pada tabel diatas maka terdapat 45(42,1%) responden mengatakan di wilayahnya cukup banyak kegiatan transaksi ekonomi seperti misalnya pasar, wira

usaha dan lain sebagainya, sebanyak 36(33,6%) responden mengatakan banyak transaksi ekonomi, sebesar 12(11,2%) responden mengatakan sangat banyak transaksi ekonomi dan sebesar 14(13,1%) responden mengatakan tidak ada transaksi ekonomi di wilayahnya.

Tabel VI.59
Kondisi ekonomi yang ada di wilayahnya

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Tidak ada	12	11.2
2	Cukup banyak	50	46.7
3	Banyak	28	26.2
4	Sangat banyak	17	15.9
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 59

Berdasarkan hasil penelitian ternyata kondisi ekonomi yang ada cukup banyak misalnya dalam bentuk kerajinan tangan, home industri dan lain sebagainya dan angkanya adalah 50(46,7%) responden menjawabnya, ada sebesar 28(26,2%) responden menjawab banyak kondisi ekonomi, dan sebesar 17(15,9%) responden menjawab sangat banyak kondisi ekonomi serta 12(11,2%) responden mengatakan kurang banyak kondisi ekonomi yang ada di wilayahnya.

Tabel VI.60
Kondisi ekonomi hasil pertanian

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Tidak ada	11	10.3
2	Cukup banyak	53	49.5
3	Banyak	39	36.4
4	Sangat banyak	4	3.7
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 60

Kondisi ekonomi hasil pertanian seperti kopi, beras, buah-buahan dan lain sebagainya ternyata berdasarkan hasil penelitian cukup banyak ada diwilayahnya yaitu sebesar 53(49,5%) responden menjawabnya, sebesar 39(36,4%) responden menjawab banyak, sebesar 4(3,7%) menjawab sangat banyak, dan sebesar 11(10,3%) responden menjawab tidak ada kondisi ekonomi yang berbentuk pertanian.

Tabel VI.61
Dukungan masyarakat terhadap keberhasilan program PPK

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang mendukung	0	0.0
2	Cukup mendukung	37	34.6
3	Mendukung	29	27.1
4	Sangat mendukung	41	38.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 61

Apabila dilihat hasil penelitian pada Kabupaten Cirebon tentang Program PPK ternyata 41(38,3%) responden mengatakan menurut responden kondisi masyarakat saat ini sangat mendukung, sebesar 29(27,1%) responden mengatakan mendukung, sebesar , sebesar 37(34,6%) responden mengatakan cukup mendukung dan tidak ada yang mengatakan kurang mendukung.

Tabel VI.62
Dukungan Kondisi alam terhadap ekonomi masyarakat

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang mendukung	5	4.7
2	Cukup mendukung	46	43.0
3	Mendukung	38	35.5
4	Sangat mendukung	18	16.8
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 62

Berdasarkan hasil penelitian ternyata kondisi alam yang ada diwilayah responden cukup mendukung terhadap ekonomi rakyat hal ini terbukti sebesar 46(43%) responden menjawabnya, sebesar 38(35,5%) responden menjawab mendukung, sebesar 18 (16,8%) responden menjawab sangat mendukung, dan sebesar 5(4,7%) responden menjawab kurang mendukung.

Tabel VI.63
Dukungan kondisi alam untuk tempat pariwisata

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang mendukung	76	71.0
2	Cukup mendukung	19	17.8
3	Mendukung	10	9.3
4	Sangat mendukung	2	1.9
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 63

Berdasarkan hasil penelitian ternyata kondisi alam di tempat responden kurang mendukung untuk tempat pariwisata atau 76(71%) responden menjawabnya, sebesar 19(17,6%) responden mengatakan cukup mendukung, sebesar 10(9,3%) responden mengatakan mendukung dan 2(1,9%) responden mengatakan kondisi alam ditempatnya sangat mendukung untuk pariwisata.

Tabel VI.64
Dukungan kondisi alam untuk lahan perikanan yang produktif

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang mendukung	65	60.7
2	Cukup mendukung	32	29.9
3	Mendukung	8	7.5
4	Sangat mendukung	2	1.9
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 64

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ternyata kondisi alam yang ditempati responden sebagian besar kurang mendukung untuk lahan perikanan yang produktif , hal ini dibuktikan dengan angka sebesar 65(80,7%) responden mengatakan kurang mendukung, sebesar 32(29,9%) responden mengatakan cukup mendukung, dan 8 (7,5%) mengatakan mendukung , dan yang terakhir ada 2(1,9%) responden

Tabel VI.65
Tersedianya jalan yang memadai

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tersedia	9	8.4
2	Cukup tersedia	35	32.7
3	Tersedia	36	33.6
4	Sangat tersedia	27	25.2
	Total		

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 65

Berdasarkan tabel diatas maka terlihat bahwa pada wilayah responden tersedia jalan yang memadai sehingga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat , hal ini terbukti sebesar 36(33,6%) responden mengatakannya, sebesar 35 (32,7%) responden menjawab cukup tersedia jalan yang memadai untuk kegiatan ekonomi, sebesar 27(25,2%) responden mengatakan sangat tersedia jalan yang memadai untuk kegiatan ekonomi, dan sebesar 9(8,4%) responden mengatakan kurang memadai.

Tabel VI.66
Tersedianya transformasi yang memadai

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tersedia	10	9.3
2	Cukup tersedia	42	39.3
3	Tersedia	32	29.9
4	Sangat tersedia	23	21.5
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 66

Berdasarkan hasil penelitian maka ternyata prosentase terbesar responden yaitu sebesar 42(39,3%) responden mengatakan bahwa transformasi yang memadai cukup tersedia untuk mendukung kegiatan ekonomi, sebesar 32(29,9%) responden mengatakan tersedia transformasi yang memadai, sebesar 23(21,5%) responden mengatakan sangat tersedia transformasi untuk kegiatan perekonomian, dan sebesar 10(9,3%) responden mengatakan kurang tersedia.

Tabel VI.67
Ketersediaan tempat transaksi ekonomi yang memadai

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tersedia	16	15.0
2	Cukup tersedia	45	42.1
3	Tersedia	35	32.7
4	Sangat tersedia	11	10.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 67

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata terdapat 45(42,1%) responden yang mengatakan bahwa diwilayahnya cukup tersedia transaksi ekonomi yang dapat mendukung ekonomi rakyat, sebesar 35(32,7%) responden mengatakan tersedia transaksi ekonomi yang memadai, sebesar 11(10,3%) responden mengatakan sangat tersedia, dan sebesar 16(15%) responden mengatakan kurang tersedia transaksi ekonomi untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Tabel VI.68
Ketersediaan hotel atau penginapan yang memadai

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tersedia	95	88.8
2	Cukup tersedia	9	8.4
3	Tersedia	1	.9
4	Sangat tersedia	2	1.9
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 68

Apabila dilihat dari tabel diatas maka terlihat bahwa prosentase terbesar responden mengatakan bahwa kurang tersedia penginapan atau hotel untuk mendukung ekonomi rakyat, hal ini dibuktikan sebesar 95 (88,8%) responden menjawabnya, dan ada sebesar 9(8,4%) responden mengatakan cukup tersedia, ada sebesar 2(,9%) responden mengatakan sangat tersedia, sebesar 1(0,9%) responden mengatakan tersedia hotel atau penginapan untuk mendukung ekonomi masyarakat.

Tabel VI.69
Sikap terhadap isi kebijakan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang setuju	5	4.7
2	Cukup setuju	38	35.5
3	Setuju	38	35.5
4	Sangat setuju	26	24.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 69

Berdasarkan hasil penelitian ternyata prosentase terbesar adalah setuju dan cukup setuju yang masing-masing angka yang diperoleh dari jawaban responden adalah sebesar 38(35,5%) . Ada sebesar 26(24,3%) responden mengatakan sangat setuju dengan isi kebijakan dan ada sebesar 5(4,7%) responden yang mengatakan kurang setuju.

Tabel VI.70
Kepercayaan masing-masing individu terhadap keberhasilan pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang percaya	2	1.9
2	Cukup percaya	45	42
3	Percaya	40	37.4
4	Sangat percaya	20	18.7
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 70

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ternyata responden cukup percaya terhadap keberhasilan pelaksanaan program , hal ini dibuktikan dengan angka sebesar 45(42%) responden mengatakannya, sebesar 40(37,4%) responden menjawab percaya, sebesar 20(18,7%) responden mengatakan sangat percaya dan sebesar 2(1,9%) responden mengatakan kurang percaya terhadap keberhasilan pelaksanaan program.

Tabel VI.71
Penerimaan masing-masing individu terhadap keseluruhan isi program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang menerima	11	10.3
2	Cukup menerima	40	37.4
3	Menerima	44	41.1
4	Sangat menerima	12	11.2
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 71

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa individu-individu dapat menerima keseluruhan isi program yaitu sebesar 44(41,1%) responden mengatakannya, sebesar 40(37,4%) responden menjawab cukup menerima, sebesar 12(11,2%) responden mengatakan sangat menerima, dan sebesar 11(10,3% responden mengatakan kurang menerima keseluruhan isi program.

Tabel VI.72
Dukungan secara individu terhadap program diwilayahnya

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang mendukung	3	2.8
2	Cukup mendukung	29	27.1
3	Mendukung	48	44.9
4	Sangat mendukung	27	25.2
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 72

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat dikatakan bahwa sebesar 48(44,9%) responden mengatakan bahwa individu-individu mendukung terhadap program diwilayahnya, sebesar 29(27,1%) responden mengatakan cukup mendukung, sebesar 27(25,3%) responden mengatakan sangat mendukung, dan sebesar 3(2,8%) responden mengatakan kurang mendukung.

Tabel VI.73
Harapan individu terhadap hasil dari pelaksanaan program
dapat meningkatkan ekonomi

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang mengharapkan	2	1.9
2	Cukup mengharapkan	18	16.8
3	Mengharapkan	28	26.2
4	Sangat mengharapkan	59	55.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 73

Berdasarkan tabel diatas ternyata prosentase terbesar responden mengatakan bahwa individu sangat mengharapkan hasil dari pelaksanaan program dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, hal ini buktikan dengan angka sebesar 59(55,1%) responden mengatakannya. Sebesar 28 (26,2%) responden menjawab mengharapkan, sebesar 18(16,8%) responden mengatakan cukup mengharapkan dan sebesar 2(1,9%) mengatakan kurang mengharapkan.

Tabel VI.74
Harapan individu tentang hasil pelaksanaan program
dapat membantu kebutuhan keluarga

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang mengharapkan	9	8.4
2	Cukup mengharapkan	33	30.8
3	Mengharapkan	65	60.7
4	Sangat mengharapkan	0	0.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 74

Hasil pelaksanaan program diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian ternyata individu mengharapkan bahwa hasil pelaksanaan program tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau angka sebesar 65(60,7%) yang dikatakan responden. Sedang sebesar 33(30,8%) responden mengatakan cukup mengharapkan, dan sebesar 9(8,4%) responden mengatakan kurang mengharapkan.

Tabel VI.75
Harapan individu dari hasil pelaksanaan program
untuk membantu meningkatkan kelompok/ masyarakat

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang mengharapkan	2	1.9
2	Cukup mengharapkan	11	10.3
3	Mengharapkan	35	32.7
4	Sangat mengharapkan	59	55.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 75

Individu sangat mengharapkan bahwa hasil pelaksanaan program dapat meningkatkan kebutuhan kelompok. Berdasarkan hasil lapangan ditunjukkan dengan angka sebesar 59(55,1%) responden mengatakan bahwa individu sangat mengharapkan hasil program dapat membantu kebutuhan kelompok/ masyarakat. Sedangkan sebesar 35(32,7%) responden mengatakan mengharapkan, sebesar 11(10,8%) responden mengatakan cukup mengharapkan dan prosentase terkecil yaitu 2(1,9%) responden mengatakan kurang mengharapkan.

Tabel VI.76
Penerimaan program dari institusi-institusi terkait

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang menerima	8	7.5
2	Cukup menerima	31	29.0
3	Menerima	43	40.2
4	Sangat menerima	25	23.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 76

Institusi terkait adalah sangat dibutuhkan untuk membantu tercapainya tujuan program. Berdasarkan hasil penelitian Instansi terkait dapat menerima pelaksanaan program, hal ini dibuktikan dengan angka 43(40,2%) responden mengatakan menerima, sebesar 31(29%) responden mengatakan cukup menerima, sebesar 25(23,4%) responden mengatakan sangat menerima dan sebesar 8(7,5%) responden mengatakan kurang menerima.

Tabel VI.77
Partisipasi institusi terkait terhadap kegiatan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang berpartisipasi	13	12.1
2	Cukup berpartisipasi	34	31.8
3	Berpartisipasi	44	41.1
4	Sangat berpartisipasi	16	15.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 77

Berdasarkan hasil penelitian ternyata institusi terkait berpartisipasi dalam kegiatan program, hal ini dibuktikan dengan angka sebesar 44(41,1%) responden mengatakannya, sebesar 34(31,8%) responden menjawab cukup berpartisipasi, sebesar 16(15%) responden sangat berpartisipasi dan sebesar 13(12,1%) responden mengatakan kurang berpartisipasi.

Tabel VI.78
Partisipasi institusi terkait dalam memfasilitasi kegiatan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang berpartisipasi	12	11.2
2	Cukup berpartisipasi	30	28.0
3	Berpartisipasi	48	44.9
4	Sangat berpartisipasi	17	15.9
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 78

Fasilitas kegiatan program adalah sangat penting, semakin lengkap fasilitas yang ada untuk pelaksanaan kegiatan program maka semakin tercapai tujuan program dan akhirnya semakin baik implementasi programnya. Berdasarkan hasil penelitian ternyata institusi terkait berpartisipasi dalam memfasilitasi kegiatan program, yaitu ditunjukkan dengan angka sebesar 48(44,9%) responden menjawabnya, sebesar 17(15,9%) responden mengatakan sangat berpartisipasi, sebesar 30(28,1%) responden mengatakan cukup berpartisipasi, dan sebesar 12(11,2%) responden mengatakan kurang berpartisipasi.

Tabel VI.79
Kepedulian institusi terkait dalam mengawasi dan membantu menyelesaikan masalah pada pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang peduli	18	16.8
2	Cukup peduli	27	25.2
3	Peduli	38	35.5
4	Sangat peduli	24	22.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 79

Kepedulian institusi terkait dalam mengawasi dan membantu menyelesaikan masalah pada pelaksanaan program adalah sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk pencapaian tujuan program sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil penelitian ternyata prosentase

terbesar responden yaitu 38(35.5%) mengatakan peduli, sedangkan sebesar 24(22,4%) responden mengatakan sangat peduli, sebesar 27(25,2%) responden mengatakan cukup peduli dan sebesar 18(16,8%) responden mengatakan kurang peduli.

Tabel VI.80
Dukungan institusi terkait untuk keberhasilan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	16	15.0
2	Cukup tinggi	39	36.4
3	Tinggi	33	30.8
4	Sangat tinggi	19	17.8
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 80

Berdasarkan hasil dilapangan ternyata 39(36,4%) responden mengatakan bahwa institusi terkait cukup tinggi memberikan dukungan untuk keberhasilan program, sebesar 33(30,8%) responden mengatakan dukungannya tinggi, sebesar 19(17,9%) dukungannya sangat tinggi, dan sebesar 16(15%) kurang memberi dukungan.

Tabel VI. 81
Hubungan kerjasama Bappeda bidang ekonomi dengan fasilitator

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	15	14.0
2	Cukup tinggi	36	33.6
3	Tinggi	25	23.4
4	Sangat tinggi	31	29.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 81

Kerjasama yang baik antara Bappeda bidang ekonomi dengan fasilitator akan memperlancar pencapaian program. Ternyata berdasarkan hasil penelitian dilapangan prosentase terbesar yaitu 36(33,6%) responden mengatakan hubungan kerjasama cukup tinggi , sedangkan sebesar 25(23,4%) responden mengatakan hubungan kerjasamanya tinggi, sebesar 31(29,0%) responden mengatakan hubungan kerjasamanya sangat tinggi

dan sebesar 15(14%) responden mengatakan hubungan kerjasama antara Bappeda bidang ekonomi dengan fasilitator kurang tinggi.

Tabel VI. 82
Hubungan kerjasama antara Camat dengan fasilitator

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	8	7.5
2	Cukup tinggi	30	28.0
3	Tinggi	19	17.8
4	Sangat tinggi	50	46.7
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 82

Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara Camat dengan fasilitator ternyata sangat tinggi hal ini dapat dilihat pada tabel diatas yaitu sebesar 50(46,7%) responden mengatakan sangat tinggi, sebesar 30(28%) responden mengatakan cukup tinggi, sebesar 19(17,8%) responden mengatakan hubungan tinggi dan hanya sebesar 8(7,5%) responden mengatakan hubungan antara Camat dengan fasilitator kurang tinggi.

Tabel VI.83
Kerjasama antara antara Kepala Desa, LKMD dengan fasilitator

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	11	10.3
2	Cukup tinggi	44	41.1
3	Tinggi	21	19.6
4	Sangat tinggi	31	29.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 83

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ternyata Kepala Desa dan LKMD kerjasamanya cukup tinggi , hal ini ditunjukkan dengan angka 44(41,1%) responden mengatakan cukup tinggi, Sedangkan sebesar 21(19,65) responden mengatakan kerjasamanya tinggi, sebesar 31(29%) responden mengatakan kerjasamanya sangat

tinggi dan hanya sebesar 11(10,3%) responden yang mengatakan kerjasamanya kurang tinggi.

4. Variabel Implementasi Program PPK.

Tabel VI.84
Sosialisasi program yang dilakukan Bappeda bidang ekonomi

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	22	20.6
2	Cukup tinggi	55	51.4
3	Tinggi	26	24.3
4	Sangat tinggi	4	3.7
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 84

Dengan adanya sosialisasi maka program PPK dapat dikenali tujuannya dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian maka 55(51,4%) responden ternyata sosialisasi program PPK yang dilakukan Bappeda bidang ekonomi cukup tinggi, sedangkan ada 26(24,3%) responden yang mengatakan tinggi, sebesar 4(3,7%) responden mengatakan sangat tinggi, dan sebesar 22(20,6%) responden mengatakan kurang tinggi.

Tabel VI.85
Sosialisasi program yang dilakukan oleh Camat

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	15	14.0
2	Cukup tinggi	32	29.9
3	Tinggi	25	23.4
4	Sangat tinggi	35	32.7
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 85

Berdasarkan hasil penelitian ternyata sosialisasi Program PPK yang dilakukan oleh Camat dapat dikatakan sangat tinggi, hal ini terbukti dari hasil jawaban responden terbesar yaitu 35(32,7%) mengatakan sangat tinggi. Sedangkan sebesar 32(29,9%) responden menjawab cukup tinggi, sebesar 25(23,4%) responden mengatakan tinggi, dan sebesar 15 (14%) responden mengatakan sosialisasi program yang dilakukan Camat diwilayahnya kurang tinggi.

Tabel VI. 86
Sosialisasi Program PPK yang dilakukan oleh Kepala Desa dan LKMD

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	11	10.3
2	Cukup tinggi	36	33.6
3	Tinggi	28	26.2
4	Sangat tinggi	32	29.9
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 86

Berdasarkan hasil penelitian ternyata prosentase terbesar responden mengatakan bahwa sosialisasi program PPK yang dilakukan oleh Kepala Desa dan LKMD diwilayahnya adalah cukup tinggi atau 36 (33,6%) responden menjawabnya. Sedangkan responden yang mengatakan sosialisasi tersebut tinggi sebanyak 28(26,2%), dan yang menyatakan sosialisasi tersebut sangat tinggi sebanyak 32 (29,9%) responden, dan mengatakan bahwa sosialisasi tersebut kurang tinggi berjumlah 11 (10,3%).

Tabel VI.87
Pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi program PPK yang diberikan

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	15	14.0
2	Cukup tinggi	47	43.9
3	Tinggi	34	31.8
4	Sangat tinggi	11	10.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 87

Berdasarkan hasil lapangan ternyata sosialisasi yang diberikan baik oleh Bappeda, Camat, atau oleh Kepala Desa dan LKMD ternyata responden prosentase terbesar menjawab cukup tinggi yaitu sebesar 47(43,9%). Sedangkan responden yang mengatakan pemahamannya terhadap sosialisasi tinggi adalah sebesar 34 (31,8%), dan responden yang mengatakan pemahaman terhadap sosialisasi sangat tinggi berjumlah 11(10,3%) responden, dan ada sebesar 15(14%) responden yang mengatakan pemahaman tentang sosialisasi kurang tinggi.

Tabel VI.88
Ketepatan alokasi waktu yang direncanakan

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tepat	22	20.6
2	Cukup tepat	42	39.3
3	Tepat	37	34.6
4	Sangat tepat	6	5.6
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 88

Alokasi waktu yang direncanakan untuk penyelesaian program ternyata prosentase tertinggi adalah 42(39,3%) mengatakan cukup tepat, sedangkan sebesar 37(34,6%) responden mengatakan alokasi waktu tepat sesuai dengan rencana, sebesar 6(5,6%) responden mengatakan sangat tepat dan sebesar 22(20,6%) responden mengatakan kurang tepat.

Tabel VI.89
Ketepatan rangkaian / urutan kegiatan dengan perencanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tepat	13	12.1
2	Cukup tepat	44	41.1
3	Tepat	39	36.4
4	Sangat tepat	11	10.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 89

Urutan kegiatan yang dilakukan dalam penyelesaian program PPK ternyata berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan cukup tepat atau 44(41,1%) responden menjawabnya. Sebesar 39(36,4%) responden mengatakan tepat, sebesar 11(10,3) responden mengatakan sangat tepat, dan sebesar 13(12,1 %) responden mengatakan kurang tepat.

Tabel VI.90
Kesesuaian kegiatan dengan daerah program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang sesuai	12	11.2
2	Cukup sesuai	41	38.3
3	Sesuai	37	34.6
4	Sangat sesuai	17	15.9
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 90

Kesesuaian kegiatan dengan daerah program ternyata prosentase terbesar responden mengatakan cukup sesuai yaitu 41 (38,3%) responden menjawabnya, sebesar 37(34,6%) responden sesuai, sebesar 17 (15,5%) responden megatakan sangat sesuai dan sebesar 12(11,2%) responden mengatakan kurang sesuai.

Tabel VI.91
Kesesuaian dana dengan kegiatan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang sesuai	26	24.3
2	Cukup sesuai	29	27.1
3	Sesuai	39	36.4
4	Sangat sesuai	13	12.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 91

Masalah dana pun merupakan hal yang sangat penting demi terselesaikannya program PPK. Berdasarkan hasil penelitian maka sebesar 39 (36,4%) responden

mengatakan sesuai antara dana dan kegiatan. Sebesar 29 (27,1%) responden mengatakan cukup sesuai antara dana dengan kegiatan program, sebesar 13 (12,1%) responden mengatakan sangat sesuai antara dana dengan kegiatan program, dan sebesar 26 (24,3%) responden mengatakan kurang sesuai.

Tabel VI.92
Keberhasilan komunikasi yang diterima masyarakat

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang berhasil	8	7.5
2	Cukup berhasil	49	45.8
3	Berhasil	37	34.6
4	Sangat berhasil	13	12.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 92

Keberhasilan komunikasi yang diterima masyarakat ternyata dapat dikatakan cukup berhasil sebab prosentase terbesar responden yang 49(45,8%) mengatakan cukup berhasil, sedangkan sebesar 37(34,8%) responden mengatakan berhasil, dan sebesar 13(12,1%) responden mengatakan sangat berhasil. Dan yang paling kecil prosentasenya adalah 8(7,5%) responden mengatakan komunikasi yang diterima masyarakat kurang berhasil.

Tabel VI.93
Tingkat keberhasilan perencanaan program yang dirasakan masyarakat

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang berhasil	4	3.7
2	Cukup berhasil	58	54.2
3	Berhasil	28	26.2
4	Sangat berhasil	17	15.9
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 93

Tingkat keberhasilan program ternyata berdasarkan hasil penelitian telah cukup berhasil dirasakan masyarakat yaitu sebesar 58(54,2%) responden menjawabnya.

Sedangkan sebesar 28(26,2%) responden mengatakan berhasil, dan sebesar 17 (15,9%) responden mengatakan sangat berhasil, dan yang paling kecil prosentasenya adalah pendapat responden yang mengatakan bahwa keberhasilan perencanaan program kurang berhasil dirasakan masyarakat yaitu sebesar 4(3,7%).

Tabel VI.94
Tingkat keberhasilan pelaksanaan program yang dirasakan masyarakat

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang berhasil	6	5.6
2	Cukup berhasil	59	55.1
3	Berhasil	32	29.9
4	Sangat berhasil	10	9.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 94

Tingkat pelaksanaan program ternyata berdasarkan hasil penelitian telah cukup berhasil dirasakan masyarakat yaitu sebesar 59 (55,1%) responden menjawabnya. Sedangkan sebesar 32 (29,9%) responden mengatakan berhasil, dan sebesar 10 (9,3%) responden mengatakan sangat berhasil, dan yang paling kecil prosentasenya adalah pendapat responden yang mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan program kurang berhasil dirasakan masyarakat yaitu sebesar 6 (5,6%)

Tabel VI.95
Tingkat kecukupan dana dengan pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	36	33.6
2	Cukup tinggi	37	34.6
3	Tinggi	25	23.4
4	Sangat tinggi	9	8.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 95

Tingkat kecukupan dana akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program , semakin dana tercukupi semakin program cepat tercapai. Apabila dilihat dari hasil lapangan tentang kecukupan dana ini ternyata prosentase terbesar adalah cukup tinggi atau 37 (34,6%) responden menjawabnya, sebesar 36 (33,6%) kurang tinggi, sebesar 25 (23,4%) responden mengatakan tinggi, sebesar 9 (8,4%) responden mengatakan sangat tinggi.

Tabel VI.96
Keberhasilan penyaluran dana pada pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang berhasil	7	6.5
2	Cukup berhasil	52	48.6
3	Berhasil	37	34.6
4	Sangat berhasil	11	10.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 96

Berdasarkan hasil lapangan ternyata penyaluran dana untuk pelaksdanaan program dapat dikatakan cukup berhasil , hal ini dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 52(48,6%) responden menjawabnya, sebesar 37 (34,6%) responden menjawab berhasil, sebesar 11(10,3%) responden menjawab sangat berhasil dan sebesar 7(6,5%) responden mengatakan kurang berhasil.

Tabel VI.97
Pemerataan penyaluran dana pada pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang merata	15	14.0
2	Cukup merata	42	39.3
3	Merata	43	40.2
4	Sangat merata	7	6.5
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 97

Apabila dilihat penyaluran dana yang digunakan untuk pelaksanaan program ternyata dapat dikatakan merata karena prosentase jawaban responden yaitu 43(40,2%) responden menjawabnya. Sebesar 42 (39,3%) responden mengatakan cukup merata, sebesar 7 (6.5%) responden mengatakan sangat merata, dan sebesar 15 (14%) responden mengatakan kurang merata.

Tabel VI.98
Kelancaran penyaluran dana bantuan kepada kegiatan ekonomi masyarakat

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang lancar	11	10.3
2	Cukup lancar	38	35.5
3	Lancar	50	46.7
4	Sangat lancar	8	7.5
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 98

Penyaluran dana bantuan kepada kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan lancar hal ini terbukti 50(46,7%) responden mengatakan lancar, sebesar 38(35,5%) responden mengatakan cukup lancar, sebesar 8(7,5%) responden mengatakan sangat lancar dan sebesar 11(10,3%) mengatakan kurang lancar.

Tabel VI. 99
Kelancaran penyaluran dana bantuan untuk kegiatan prasarana

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang lancar	3	2.8
2	Cukup lancar	38	35.5
3	Lancar	51	47.7
4	Sangat lancar	15	14.0
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 99

Penyaluran dana untuk kegiatan prasarana ternyata hasil penelitian mengatakan lancar , terbukti 51(47,7%) responden mengatakannya, sebesar 38(35,5%) responden

mengatakan cukup lancar , sebesar 15(14%) responden mengatakannya sangat lancar, dan sebesar 3(2,6%) responden mengatakan kurang lancar.

Tabel VI.100
Tingkat manfaat program terhadap masyarakat

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang bermanfaat	0	0.0
2	Cukup bermanfaat	40	37.4
3	Bermanfaat	30	28.0
4	Sangat bermanfaat	37	34.6
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 100

Apabila dilihat dari manfaat program bagi masyarakat ternyata hasil penelitian menunjukkan angka sebesar 40(37,4%) responden mengatakan cukup bermanfaat. Sebesar 30(28%) responden mengatakan bermanfaat, sebesar 37 (34,6%) responden mengatakan sangat bermanfaat, dan tidak ada yang mengatakan kurang bermanfaat.

Tabel VI.101
Tingkat keberhasilan pelaksanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang berhasil	7	6.5
2	Cukup berhasil	53	49.5
3	Berhasil	34	31.8
4	Sangat berhasil	13	12.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 101

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa progra PPK cukup berhasil yaitu sebesar 53(49,5%) responden menjawabnya. Sebesar 34(31,8%) responden menjawab berhasil, sebesar 13(12,1%) responden menjawab sangat berhasil, dan sebesar 7(6,5%) responden mengatakan kurang berhasil

Tabel VI.102
Kesesuaian hasil pelaksanaan program dengan time schedule

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang sesuai	8	7.5
2	Cukup sesuai	53	49.5
3	Sesuai	37	34.6
4	Sangat sesuai	9	8.4
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 102

Berdasarkan hasil penelitian ternyata hasil pelaksanaan program cukup sesuai dengan time schedule , hal ini dibuktikan jawaban responden terbesar yaitu 53(49,5%) mengatakan cukup sesuai. Sebesar 37(34,6%) responden mengatakan sesuai, sebesar 9(8,4%) responden mengatakan sangat sesuai, dan sebesar 8(7,5%) responden mengatakan kurang sesuai.

Tabel VI.103
Kesesuaian manfaat program dengan perencanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang sesuai	5	4.7
2	Cukup sesuai	43	40.2
3	Sesuai	46	43.0
4	Sangat sesuai	13	12.1
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 103

Berdasarkan tabel diatas ternyata manfaat program sesuai dengan perencanaan program yaitu 46 (43%) responden menjawabnya, sebesar 43(40,2%) responden mengatakan bahwa manfaat program telah cukup sesuai dengan perencanaan program, sedangkan ada sebesar 13(12,1%) responden mengatakan sangat sesuai, dan ada sebesar 5(4,7%) responden menjawab kurang sesuai.

Tabel VI.104
Kesesuaian tujuan program dengan perencanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang sesuai	5	4.7
2	Cukup sesuai	48	44.9
3	Sesuai	43	40.2
4	Sangat sesuai	11	10.3
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 104

Berdasarkan hasil penelitian ternyata tujuan program telah cukup sesuai dengan perencanaan program, hal ini dapat dilihat dari 48(44,9%) responden menjawabnya, sedangkan sebesar 43(40,2%) responden mengatakan sesuai, sebesar 11(10,3%) responden mengatakan sangat sesuai, dan sebesar 5(4,7%) responden mengatakan kurang sesuai.

Tabel VI.105
Kesesuaian sasaran program dengan perencanaan program

NO	ALTERNATIVE JAWABAN	FREK	%
1	Kurang sesuai	6	5.6
2	Cukup sesuai	45	42.1
3	Sesuai	36	33.6
4	Sangat sesuai	20	18.7
	Total	107	100.0

Sumber : Jawaban responden dari kuest no. 105

Berdasarkan hasil penelitian ternyata sasaran program telah cukup sesuai dengan perencanaan program. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel bahwa sebesar 45(42,1%) responden mengatakan cukup sesuai, sedangkan sebesar 36(33,6%) responden mengatakan sesuai, sebesar 20(18,7%) responden mengatakan sangat sesuai, dan sebesar 6 (5,6%) responden mengatakan kurang sesuai.

B. KESIMPULAN MASING-MASING VARIABEL

Dalam bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dari variabel-variabel yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya yang telah dianalisis setiap kuestnya.

1. Kesimpulan Variabel Isi Kebijakan.

Tabel VI. 106

Isi Kebikajan

NO	KATEGORI JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	23	21.5
2	Cukup tinggi	30	28.0
3	Tinggi	41	38.3
4	Sangat tinggi	13	12.1
	Total	107	100.0

Sumber : jawaban responden dari Variabel Isi Kebijakan (X1)

Apabila dilihat pada tabel diatas ternyata isi kebijakan berdasarkan hasil penelitian diperoleh angka tertinggi adalah sebesar 41(38,3%0 tinggi. Artinya pendapat kebijakan baik tentang modal produksi, peralatan produksi, tentang uang sudapa dapat dianggap memadai. Kemudian tentang kejelasan petunjuk pelaksanaan peraturan-peraturan sudah dianggap jelas, petunjuk teknisnya juga jelas, peraturan tentang kriteria penerima bantuan dana juga jelas, petunjuk pendampingan juga dianggap jelas petunjuk pendampingan bagi fasilitator juga dianggap jelas, petunjuk terhadap pelaksana kegiatan bag pelaksana program juga jelas, petunjuk tentang pengembangan usaha juga jelas, ada kesesuaian antara pemahaman kelompok sasaran dengan isi kebijakan, juga ada kejelasan antara pemahaman pelaksana dengan isi kebijakan, ada kejelasan tentang syarat penerimaan bantuan dana, ada kejelasan tentang prosedur pengajuan dana dan

pemahaman yang baik dari kelompok sasaran terhadap peraturan penggunaan dana, output program dari fasilitator, Camat maupun dari Kepala Desa atau LKMD.

2. Kesimpulan Variabel Kemampuan Pelaksana.

Tabel VI.107
Kemampuan pelaksana

NO	KATEGORI JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	17	15.9
2	Cukup tinggi	38	35.5
3	Tinggi	38	35.5
4	Sangat tinggi	14	13.1
	Total	107	100.0

Sumber : jawaban responden dari Variabel Kemampuan pelaksana (X2)

Berdasarkan hasil penelitian ternyata apabila kita simpulkan dari beberapa jawaban responden yang telah diuraikan pada bab sebelumnya ternyata mengenai kemampuan pelaksana ini setelah disimpulkan memperoleh hasil cukup tinggi dan tinggi yang masing-masing diperoleh hasil 38(35,5%) responden menjawabnya. Hal ini dapat dibuktikan seperti pendidikan minimal yang dimiliki pelaksana sudah cukup memadai, adanya pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya, menganggap pengalaman adalah sesuatu hal yang penting, pemahaman pelaksana tentang isi kebijakan yang cukup baik, pemahaman pelaksana tentang sosialisasi yang cukup baik, pemahaman pelaksana tentang pelaksanaan program yang cukup baik, ketrampilan pelaksana tentang tugasnya yang cukup baik, kecakapan pelaksana dalam menjalankan tugas yang cukup baik, ketelitian pelaksana dalam menjalankan tugas yang cukup baik, keseriusan dalam menjalankan tugas yang cukup baik, wawasan pelaksana yang cukup

baik tentang kriteria penerima, prioritas penerima, penyimpangan penggunaan dana, pemecahan masalah dalam pelaksanaan program. Tingkat kedisiplinan pelaksanaan yang cukup baik misalnya tentang pelaksanaan tugas, evaluasi pelaksanaan tugas, akurasi laporan, intensitas laporan, dan faktualitas laporan.

3. Kesimpulan Variabel Lingkungan.

Tabel VI. 108
Lingkungan

NO	KATEGORI JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	11	10.3
2	Cukup tinggi	22	20.6
3	Tinggi	44	41.1
4	Sangat tinggi	30	28.0
	Total	107	100.0

Sumber : jawaban responden dari Variabel Lingkungan (X3)

Lingkungan yang baik akan mempengaruhi Implementasi. Berdasarkan hasil penelitian variabel lingkungan diperoleh angka yang tinggi atai 44(41,1%) responden menjawabnya. Tingginya variabel lingkungan ini misalnya adanya perhatian dari masyarakat penerima program terhadap pendidikan, penerimaan saran dan kritik dari masyarakat penerima program, penerima program mau menerima pembangunan, perhatian terhadap peningkatan ekonomi, adanya sifat gotong royong, mendukung kegiatan program, menerima kegiatan program, menerima kegiatan program, cukup senang berperan serta pada kegiatan program, cukup setuju terhadap isi kebijakan program, percaya terhadap keberhasilan pelaksanaan program, cukup menerima seluruh isi kebijakan program,. Sedangkan kondisi ekonomi dapat dilihat dari cukup banyaknya kegiatan transaksi ekonomi seperti pasar, adanya wirausaha, cukup banyaknya hasil

kerajinan tangan, home industri, cukup banyaknya beras, kopi, buah-buahan. Cukup dukungan masyarakat untuk mengetahui hasil program PPK, cukup adanya lahan pertanian yang subur, cukup tersedia jalan yang memadai, cukup tersedia transaksi ekonomi yang memadai. Adanya tanggapan masing-masing individu misalnya cukup setuju terhadap isi program, cukup percaya terhadap keberhasilan program, cukup menerima seluruh isi kebijakan, cukup mendukung program diwilayahnya, cukup mengharapkan hasil dari pelaksanaan program dapat membantu meningkatkan ekonomi, cukup mengharapkan keberhasilan program dapat membantu kebutuhan keluarga. Institusi terkait cukup berpartisipasi dalam kegiatan program, cukup membantu menyelesaikan masalah pada pelaksanaan program, cukup tinggi dukungannya terhadap pelaksanaan program. Institusi terkait yang cukup mendukung tinggi terhadap program misalnya Bappeda, Camat, Kelurahan Desa, LKMD.

4. Kesimpulan Variabel Implementasi Program Pengembangan Kecamatan.

Tabel VI. 109

Implementasi Program Pengembangan Kecamatan

NO	KATEGORI JAWABAN	FREK	%
1	Kurang tinggi	16	15.0
2	Cukup tinggi	44	41.1
3	Tinggi	38	35.5
4	Sangat tinggi	9	8.4
	Total	107	100.0

Sumber : jawaban responden dari Variabel Implementasi Program PPK (Y)

Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan hasil penelitian ternyata prosentase terbesar adalah cukup tinggi atau 44(41.1%) responden

menjaabnya. Hal ini misalnya Bappeda telah melakukan sosialisasi program dengan cukup baik, demikian juga yang dilakukan oleh Camat serta Kepala Desa dan LKMD. Pemahaman sosialisai juga cukup baik atau cukup banyak masyarakat yang paham tentang program PPK, Apabila dilihat dari ketepatan alokasinya dapat dikatakan cukup tepat, urutan kegiatannya cukup tepat, cukup sesuaiya kegiatan dengan program, cukup sesuaiya dana dengan kegiatan, cukup baiknya komunikasi yang diterima masyarakat, cukup berhasilnya penyaluran dana untuk pelaksanaan program, cukup merata penyaluran dananya untuk kegiatan ekonomi, untuk kegiatan prasarana. Cukup bermanfaatnya program dirasakan masyarakat, cukup berhasilnya programmenerurut pendapat masyarakat cukup baiknya monitoring dan evaluasi dilaksanakan serta kesesuaian dengan perencanaan, kesesuaian hasil program dengan *time shcedule*, cukup sesuaiya manfaat program dengan perencanaan program, cukup sesuaiya tujuan program dengan perencanaan program, cukup sesuaiya sasaran program dengan perencanaan program.

C. ANALISIS TABEL SILANG ANTAR VARIABEL

Didalam bab berikut ini akan diuraikan bagaimana korelai antara masing-masing variabel independent dengan variabel dependent. Uraian yang pertama adalah akan menganalisis korelasi antara Isi kebijakan dengan Implementasi kebijakan, kedua akan melihat bagaimana korelasi antara Kemampuan pelaksana dengan Implementasi Kebijakan dan yang ketiga akan melihat bagaimana korelasi antara faktor lingkungan dengan Implementasi kebijakan Program Pengembangan Kecamatan yang ada pada Kabupaten Cirebon.

1. Korelasi antara Isi Kebijakan dengan Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Tabel VI. 110
Hubungan antara Isi Kebijakan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan

Y	X	TOT_X1 Isi Kebijakan				Total
		1 Kurang tinggi	2 Cukup tinggi	3 Tinggi	4 Sangat tinggi	
TOT_Y Implementasi Program Pengembangan Kecamatan	1 Kurang tinggi	7 30.4%	7 23.3%	2 4.9%		16 15.0%
	2 Cukup Tinggi	14 60.9%	18 60.0%	11 26.8%	1 7.7%	44 41.1%
	3 Tinggi	1 4.3%	4 13.3%	25 61.0%	8 61.5%	38 35.5%
	4 Sangat tinggi	1 4.3%	1 3.3%	3 7.3%	4 30.8%	9 8.4%
	Total	23 100.0%	30 100.0%	41 100.0%	13 100.0%	107 100.0%

Sumber : variabel Isi Kebijakan dengan variabel Implementasi PPK

Hubungan antara isi kebijakan dengan implementasi ternyata berdasarkan hasil perhitungan kendall menunjukkan adanya hubungan yang positif antara isi kebijakan dengan implementasi kebijakan PPK. Artinya semakin orang memahami isi kebijakan semakin tercapai kebijakan PPK tersebut atau sebaliknya. Hal ini ditunjukkan dengan angka sebesar 0,529 yang artinya adanya hubungan positif yang cukup kuat. Apabila kita lihat dengan taraf kepercayaan 5% ternyata hasil kendall tersebut dapat dikatakan signifikan dimana $0,000 < 0,05$.

Tabel VI.111
Korelasi antara isi kebijakan
dengan Implementasi Kebijakan Program PPK

		Symmetric Measures			
		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.529	.062	8.298	.000

Sumber : variabel isi kebijakan dengan implementasi program PPK

2. Korelasi antara Kemampuan pelaksana dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan

Tabel VI. 112
Hubungan antara Kemampuan pelaksana dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon

Y	X	TOT_X2 Kemampuan pelaksana				Total
		1 Kurang tinggi	2 Cukup tinggi	3 Tinggi	4 Sangat tinggi	
TOT_Y Implementasi Program Pengembangan Kecamatan	1 Kurang tinggi	7 41.2%	7 18.4%	2 5.3%		16 15.0%
	2 Cukup Tinggi	10 58.8%	25 65.8%	9 23.7%		44 41.1%
	3 Tinggi		6 15.8%	25 65.8%	7 50.0%	38 35.5%
	4 Sangat tinggi			2 5.3%	7 50.0%	9 8.4%
Total		17 100.0%	38 100.0%	38 100.0%	14 100.0%	107 100.0%

Sumber : Variabel Kemampuan pelaksana dan Variabel Implementasi PPK

Kemampuan pelaksana sangat berpengaruh terhadap implementasi program. Berdasarkan hasil penelitian ternyata kemampuan program mempunyai hubungan yang positif dengan implementasi program. Hal ini ditunjukkan dari angka perhitungan Rank Kendall sebesar 0,652 yang artinya ada korelasi yang cukup kuat antara kemampuan pelaksana dengan implementasi program PPK. Semakin pelaksana mempunyai kemampuan yang tinggi baik di bidang pendidikan formal. Pengalaman, training maka akan meningkatkan implementasi program PPK. Apabila kita lihat dengan taraf signifikansi 5% ternyata hasil kendall tersebut dikatakan signifikan karena $0,000 < 0,05$.

Tabel VI. 113

Korelasi Rank Kendal antara variabel Kemampuan pelaksana dengan Implementasi Program PPK

		Symmetric Measures			
		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.652	.049	11.719	.000

Sumber : variabel kemampuan pelaksana dengan implementasi Program PPK

3. Korelasi antara lingkungan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan

Tabel VI. 114
Hubungan antara lingkungan dengan Implementasi PPK di Kabupaten Cirebon

Y	X	TOT_X3 Lingkungan				Total
		1 Kurang tinggi	2 Cukup tinggi	3 Tinggi	4 Sangat tinggi	
TOT_Y Implementasi Program Pengembangan Kecamatan	1 Kurang tinggi	7 63.6%	8 36.4%	1 2.3%		16 15.0%
	2 Cukup Tinggi	4 36.4%	10 45.5%	28 63.6%	2 6.7%	44 41.1%
	3 Tinggi		4 18.2%	12 27.3%	22 73.3%	38 35.5%
	4 Sangat tinggi			3 6.8%	6 20.0%	9 8.4%
	Total	11 100.0%	22 100.0%	44 100.0%	30 100.0%	107 100.0%

Sumber : variabel lingkungan dengan variabel Implementasi PPK

Lingkungan yang baik dan mendukung sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program atau implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian tentang lingkungan ini ternyata diperoleh hasil dari perhitungan Rank Kendall bahwa ada hubungan yang positif antara lingkungan dengan implementasi Kebijakan Program PPK, artinya semakin lingkungan mendukung program maka akan semakin tercapai implementasi program PPK. Hal ini juga dapat dikatakan dengan angka korelasi sebesar 0,627 (diatas 0,5) artinya ada korelasi yang kuat. Apabila dilihat dengan taraf signifikansi 5% maka hubungan yang positif tersebut dapat dikatakan signifikan karena $0,000 < 0.05$.

Tabel VI. 115

Hasil korelasi Rank Kendall
antara variabel lingkungan dengan variabel Implementasi PPK

		Symmetric Measures			
		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.627	.049	11.112	.000

Sumber : Variabel lingkungan dengan variabel Implementasi Program PPK

D. PENGUJIAN HIPOTESIS

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent dan dependent. Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel isi kebijakan dengan implementasi kebijakan, hubungan antara kemampuan pelaksana dengan implementasi kebijakan program PPK, dan yang terakhir untuk mengetahui hubungan antara variabel lingkungan dengan implementasi program PPK. Cara pengolahan rumus tersebut peneliti tidak menggunakan cara yang manual tetapi yang digunakan untuk mencari korelasi tersebut dengan mengolahnya dengan program yang telah disediakan oleh komputer yaitu program SPSS.

Adapun tabel korelasi tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel VI. 116
Korelasi antara variabel isi kebijakan, kemampuan pelaksana , dan lingkungan
dihubungkan dengan implementasi program PPK

		Correlations				
		TOT_X1	TOT_X2	TOT_X3	TOT_Y	
Kendall's tau_b	TOT_X1	Correlation Coefficient	1.000	.637(**)	.450(**)	.529(**)
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000
		N	107	107	107	107
	TOT_X2	Correlation Coefficient	.637(**)	1.000	.583(**)	.652(**)
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000
		N	107	107	107	107
	TOT_X3	Correlation Coefficient	.450(**)	.583(**)	1.000	.627(**)
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000
		N	107	107	107	107
	TOT_Y	Correlation Coefficient	.529(**)	.652(**)	.627(**)	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.
		N	107	107	107	107

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Sumber : olahan jawaban total yang telah discor dari vriabel X1,X2, X3 terhadap variabel Y

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa semua variabel X baik X1,X2, dan X3 mempunyai korelasi yang positif dan signifikan terhadap Y. Atau isi kebijakan mempunyai korelasi yang positif dan cukup kuat terhadap implementasi kebijakan dengan angka korelasi kendall sama dengan 0,529. Sedangkan untuk kemampuan pegawai dengan implementasi program PPK diperoleh angka korelasi kendal sebesar 0,652, dan untuk lingkungan dengan implementasi Program PPK diperoleh hasil 0, 627. Dengan pengtesan signifikansi 5% maka semuanya signifikan karena semuanya diperoleh Approx sig. $0.000 < 0,05$. Artinya hipotesa N₀ yang mengatakan tidak ada

hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y dan X3 dengan Y ditolah. Berarti ketiga variabel dalam penelitian ini semuanya mempunyai korelasi yang positif dan signifikan.

Untuk melihat korelasi secara bersama-sama antara variabel X1, X2 dan X3 dengan Y dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VI. 117
Korelasi antara isi kebijakan, kemampuan pelaksana,
dan lingkungan secara bersama-sama terhadap implementasi

Test Statistics	
N	107
Kendall's W(a)	.141
Chi-Square	45.147
Df	3
Asymp. Sig.	.000
a Kendall's Coefficient of Concordance	

Sumber : olahan dari jawaban responden

Berdasarkan perhitungan tersebut maka korelasi secara bersama-sama antara X1, X2 dan X3 dengan Y diperoleh hasil 0,141 artinya ada hubungan yang positif tetapi lemah karena hasil korelasi tersebut dibawah 0,5.

E. DISKUSI

Menurut teori yang telah ditulis di bagian landasan pemikiran dikatakan bahwa variabel isi kebijakan, kemampuan pelaksana dan lingkungan berpengaruh terhadap implementasi program atau faktor yang mempengaruhi implementasi program adalah ketiga variabel tersebut diantaranya. Setelah diuji dengan rumus-rumus yang sesuai yaitu rank kendall hasilnya adalah semua variabel independen yaitu isi kebijakan, kemampuan

pelaksana, dan lingkungan semuanya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dalam hal ini Implementasi kebijakan Program Kecamatan hasilnya adalah bahwa semua variabel X baik X1, X2, dan X3 mempunyai korelasi yang positif dan signifikan terhadap Y. Atau isi kebijakan mempunyai korelasi yang positif dan cukup kuat terhadap implementasi kebijakan dengan angka korelasi kendall sama dengan 0,529. Sedangkan untuk kemampuan pegawai dengan implementasi program PPK diperoleh angka korelasi kendal sebesar 0,652, dan untuk lingkungan dengan implementasi Program PPK diperoleh hasil 0,627. Dengan pengujian signifikansi 5% maka semuanya signifikan karena semuanya diperoleh $\text{Approx sig. } 0.000 < 0,05$. Artinya hipotesa H_0 yang mengatakan tidak ada hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y dan X3 dengan Y ditolak. Berarti ketiga variabel dalam penelitian ini semuanya mempunyai korelasi yang positif dan signifikan.

Setelah dihitung dengan konkordan W maka korelasi bersama-sama diperoleh hasil sebesar 0,141 artinya ada hubungan yang positif tetapi lemah karena hasil korelasi tersebut di bawah 0,5.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan oleh penulis di muka, dapat diambil beberapa hal sebagai kesimpulan, sebagai berikut :

1. Isi kebijakan berdasarkan hasil penelitian diperoleh angka tertinggi adalah sebesar 41(38,3%) tinggi. Artinya pendapat kebijakan baik tentang modal produksi, peralatan produksi, tentang uang sudah dapat dianggap memadai. Kemudian tentang kejelasan petunjuk pelaksanaan peraturan-peraturan sudah dianggap jelas, petunjuk teknisnya juga jelas, peraturan tentang kriteria penerima bantuan dana juga jelas, petunjuk pendampingan juga dianggap jelas petunjuk pendampingan bagi fasilitator juga dianggap jelas, petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan bagi pelaksana program juga jelas, petunjuk tentang pengembangan usaha juga jelas, ada kesesuaian antara pemahaman kelompok sasaran dengan isi kebijakan, juga ada kejelasan antara pemahaman pelaksana dengan isi kebijakan, ada kejelasan tentang syarat penerimaan bantuan dana, ada kejelasan tentang prosedur pengajuan dana dan ada pemahaman yang baik dari kelompok sasaran terhadap peraturan penggunaan dana, output program dari fasilitator, Camat maupun dari Kepala Desa atau LKMD.
2. Kemampuan pelaksana, setelah disimpulkan memperoleh hasil cukup tinggi atau 38 (35,5%) responden menjawabnya. Hal ini dapat dibuktikan seperti pendidikan minimal yang dimiliki pelaksana sudah cukup memadai, adanya pelatihan – pelatihan yang berhubungan dengan tugas-

tugasnya, menganggap pengalaman adalah sesuatu hal yang penting, pemahaman pelaksana tentang isi kebijakan cukup baik, pemahaman pelaksana tentang sosialisasi cukup baik, pemahaman pelaksana tentang pelaksanaan program cukup baik, ketrampilan pelaksana tentang tugasnya cukup baik, kecakapan pelaksana dalam menjalankan tugas cukup baik, ketelitian pelaksana dalam menjalankan tugas cukup baik, keseriusan dalam menjalankan tugas cukup baik, wawasan pelaksana cukup baik tentang, kriteria penerima, prioritas penerima, penyimpangan penggunaan dana PPK, pemecahan masalah dalam pelaksanaan program. Tingkat kedisiplinan pelaksana yang cukup baik misalnya tentang pelaksanaan tugas, evaluasi pelaksanaan tugas, akurasi laporan, intensitas laporan, dan faktualitas laporan.

3. Lingkungan, diperoleh angka yang tinggi atau 44 (41,1%) responden menjawabnya. Tingginya variabel lingkungan ini antara lain karena adanya perhatian dari masyarakat penerima program terhadap pendidikan, penerimaan saran dan kritik dari masyarakat penerima program, penerima program mau menerima pembangunan, perhatian terhadap peningkatan ekonomi, adanya sifat gotong royong, mendukung kegiatan program, menerima kegiatan program, menerima kegiatan program, cukup senang berperan serta pada kegiatan program, cukup setuju terhadap isi kebijakan program, percaya terhadap keberhasilan pelaksanaan program, cukup menerima seluruh isi kebijakan program,. Sedangkan kondisi ekonomi dapat dilihat dari cukup banyaknya kegiatan transaksi ekonomi seperti pasar, adanya wirausaha, cukup banyaknya hasil kerajinan tangan, home industri, cukup banyaknya beras dan buah-buahan. Cukup dukungan

masyarakat untuk mengetahui hasil program PPK, cukup adanya lahan pertanian yang subur, cukup tersedia jalan yang memadai, cukup tersedia transaksi ekonomi yang memadai. Adanya tanggapan masing-masing individu misalnya cukup setuju terhadap isi program, cukup percaya terhadap keberhasilan program, cukup menerima seluruh isi kebijakan, cukup mendukung program diwilayahnya, cukup mengharapkan hasil dari pelaksanaan program dapat membantu meningkatkan ekonomi, cukup mengharapkan keberhasilan program dapat membantu kebutuhan keluarga. Institusi terkait cukup berpartisipasi dalam kegiatan program, cukup membantu menyelesaikan masalah pada pelaksanaan program, cukup tinggi dukungannya terhadap pelaksanaan program. Institusi terkait yang cukup mendukung terhadap program misalnya Bappeda, Camat, Kelurahan Desa, LKMD.

4. Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah cukup tinggi atau 44(41.1%). Hal ini antara lain karena Bappeda telah melakukan sosialisasi program dengan cukup baik, demikian juga yang dilakukan oleh Camat serta Kepala Desa dan LKMD. Pemahaman sosialisai juga cukup baik atau cukup banyak masyarakat yang paham tentang program PPK, Apabila dilihat dari ketepatan alokasinya dapat dikatakan cukup tepat, urutan kegiatannya cukup tepat, cukup sesuai dengan kegiatan dengan program, cukup sesuai dengan dana dengan kegiatan, cukup baiknya komunikasi yang diterima masyarakat, cukup berhasilnya penyaluran dana untuk pelaksanaan program, cukup merata penyaluran dana untuk kegiatan ekonomi serta untuk kegiatan prasarana. Cukup bermanfaatnya program dirasakan masyarakat, cukup berhasilnya

program menurut pendapat masyarakat, cukup baiknya monitoring dan evaluasi dilaksanakan serta kesesuaian dengan perencanaan, kesesuaian hasil program dengan *time shcedule*, cukup sesuainya manfaat program dengan perencanaan program, cukup sesuainya tujuan program dengan perencanaan program, cukup sesuainya sasaran program dengan perencanaan program.

5. Hubungan antara isi kebijakan dengan implementasi, ternyata berdasarkan hasil perhitungan kendall menunjukkan adanya hubungan yang positif antara isi kebijakan dengan implementasi kebijakan PPK. Artinya semakin orang memahami isi kebijakan semakin tercapai kebijakan PPK tersebut atau demikian sebaliknya. Hal ini ditunjukkan dengan angka sebesar 0,529 (diatas 0,5) yang artinya adanya hubungan positif yang cukup kuat. Apabila kita lihat dengan taraf kepercayaan 5% ternyata hasil kendal tersebut dapat dikatakan signifikan dimana $0,000 < 0,05$.
6. Kemampuan pelaksana program mempunyai hubungan yang positif dengan implementasi program. Hal ini ditunjukkan dari angka perhitungan Rank Kendall sebesar 0,652 (diatas 0,5) yang artinya ada korelasi yang kuat antara kemampuan pelaksana dengan implementasi program PPK. Semakin tinggi pelaksana mempunyai kemampuan yang baik di bidang pendidikan formal, pengalaman dan training maka akan meningkatkan implementasi program PPK. Apabila kita lihat dengan taraf signifikansi 5% ternyata hasil kendall tersebut dikatakan signifikan karena $0,000 < 0,05$.
7. Hubungan antara lingkungan dengan implementasi program, ternyata diperoleh hasil dari perhitungan Rank Kendall bahwa ada hubungan yang

positip antara lingkungan dengan Implementasi Kebijakan Program PPK, artinya semakin lingkungan mendukung program maka akan semakin tercapai implementasi program PPK. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan angka korelasi sebesar 0,627 (diatas 0,5) artinya ada korelasi yang kuat. Apabila dilihat dengan taraf signifikansi 5% maka hubungan yang positip tersebut dapat dikatakan signifikan karena $0,000 < 0.05$.

8. Korelasi secara bersama-sama antara X1, X2 dan X3 dengan Y diperoleh hasil 0,141 artinya ada hubungan yang positip tetapi lemah karena hasil korelasi tersebut dibawah 0,5.

B. Saran-saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas, bersama ini direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kemampuan pelaksana supaya lebih ditingkatkan lagi termasuk kesiapan tim PPK dalam menyelenggarakan kegiatan program PPK , kemampuan penyediaan sarana dan prasarana dan penyediaan waktu yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan, pendidikan pelaksana program, supaya diadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pelaksanaan program.
2. Kegiatan sosialisasi tentang program PPK supaya lebih ditingkatkan lagi, hubungan dengan instansi terkait supaya lebih ditingkatkan lagi, karena sering membantu dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
3. Supaya lebih ditingkatkan adanya prasarana yang digunakan untuk meningkatkan sosial ekonomi rakyat.
4. Supaya lebih meningkatkan pengawasan untuk lancarnya kegiatan program PPK. Mengaktifkan sarana komunikasi yang baik misalnya

adanya musyawarah (Musbangdes), adanya prinsip keterbukaan , demokratisasi dan akuntabilitas.

5. Memperhatikan kebutuhan – kebutuhan masyarakat serta mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
6. Memperhatikan faktor lingkungan untuk lancarnya implementasi kebijakan Program PPK.
7. Perlu adanya penegasan kembali standar pembukuan yang diberlakukan pada tingkat Unit Pngelola Keuangan (UPK), hal ini untuk menjawab keraguan UPK dalam menerapkan sistem pembukuan yang mengacu pada Peraturan Akuntansi seperti yang disosialisasikan oleh *National Management Consultant* (NMC).
8. Sebagai tindak lanjut dari tahap pelestarian kegiatan, perlu adanya bantuan teknis, manajemen serta peningkatan keterampilan kepada lembaga-lembaga yang telah terbentuk di tingkat kecamatan seperti UPK, TPK dan Tim Pemelihara Sarana Fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusin, Syahri, *Aplikasi Statistik Praktis Dengan SPSS 9*, Elex Media Komputindo, Semarang, 2001.
- Edward III, George C, *Implementing Public Policy*, Congressional Quartely Press, Washington DC, 1980.
- Goggin, L.Malcoln, *Implementation Theory and Practise*, Cott, Frosman and Company Glenview, Illinois London, England, 1980.
- Grindel, Marilee S, *Politic And Policy Implementation In The Third World*, Princenton, NJ.Princenton Univ.Press, 1980.
- Hadi Sutrisno, *Motodologi Research*, PT. Andi, Yogyakarta, 2001.
- Kartasasmita, G, *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat, Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana Studi Pembangunan*, ITB, Bandung, 1996.
- Laporan Harian Umum, Bali Post, 24 Mei 2002, halaman 12.
- Laporan Harian Umum, Republika, 13 September 2001, Kolom 1-9.
- Laporan Harian Umum, Republika, 19 Mei 2001, Kolom 2 – 3.
- Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Miles, M dan A.Michael Hubermen, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta, UI-Press, 1992.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Quade, ES, *Analysis For Public Decision*, Second Edition, Fourth Printing, Elsevier Science Publishing, New York, 1984.
- Riply, Randall B. Dan Grace A, Franklin, *Bureuacracy And Policy Implementation*, Homewood III, Dorsey, 1997.
- Singarimbun, M dan Effendy, Sofian, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Bumi Aksana, Semarang, 1998.

- Sumodiningrat, G, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Penerbit CV.Rajawali, Jakarta, 1983.
- Tim Pembina PPK Tingkat Pusat, *Pedoman Umum Program Pengembangan Kecamatan Tahun Anggaran 2001*, Bappenas, Jakarta, 2002.
- Todaro, M, *Economic Development*, 5 th Edition, Longman, New York, 1994.
- Wahab, A.Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Penerbit Bumi Aksara, Semarang, 1999.
- Wibawa, et all, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994.
- _____, *Penduduk Indonesia, hasil sensus penduduk 2000, angka sementara, s/d Desember 2000*, BPS, Jakarta, 2001.
- _____, *Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, Labor Force Situation in Indonesia*, BPS, Jakarta, 2002.
- _____, *Statistik Indonesia, Statistical Year Book of Indonesia*, BPS, Jakarta, 2001.
- _____, *Laporan dan Evaluasi Ekonomi Indonesia*, BPS, Jakarta, 2000.
- _____, *Laporan Tim Survey Program PPK*, Bappeda Jabar, Bandung, 2001.
- _____, *Katalog BPS : 2321, Penyempurnaan Metodologi Penghitungan Penduduk Miskin dan Profil kemiskinan 1999*, BPS, Jakarta, 2001.